

**ANALISIS YURIDIS PERTENTANGAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2206 K/Pdt/2012 DENGAN PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI NOMOR 319 PK/Pdt/2015 TENTANG SENGKETA PERDATA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-
Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

M. USMAN SYAHIRUL AZMANI

NIM: 105010107111087



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Kajian Umum Perjanjian.....	13
2.1.1 Jenis – Jenis Perjanjian	17
2.1.2 Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian	23
2.1.3 Asas- asas Perjanjian.....	26
2.1.4 Akibat Suatu Perjanjian	33
2.2. Kajian Umum <i>Letter of Credit</i> dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	36
2.2.1 Terminologi dalam Ketentuan Penggunaan SKBDN	37
2.2.2 Mekanisme Transaksi Menggunakan SKBDN	39
2.2.3 Hubungan Hukum dalam <i>L/C</i> dan SKBDN	40

2.2.4 Penerbitan SKBDN	41
2.2.5 Akuntansi SKBDN	44
2.3. Kajian Umum Tentang Konosemen.....	46
2.3.1 Pengaturan Konosemen di Indonesia.....	47
2.3.2 Fungsi Konosemen	49
2.3.3. Jenis Konosemen	52
2.3.4. Klausul Terkait Dengan Konosemen	54
2.4 Kajian Umum Hak Kebendaan	55
2.4.1 Asas- asas Hukum Benda	60
2.4.2 Pembagian Benda Menurut KUHPerdota	73
2.4.3 Macam- macam Hak Kebendaan Menurut KUHPerdota	83
2.5 Kajian Umum Mengenai Hukum Jaminan	91
2.5.1 Pengertian Jaminan dan Jenis- jenis Jaminan	95
2.5.2 Ketentuan- ketentuan Dasar Hukum Jaminan	102
2.6Kajian Umum Jaminan Fidusia	106
2.6.1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	108
2.6.2. Asas- Asas Hukum Jaminan Fidusia	109
2.6.3. Subyek Hukum Jaminan Fidusia	114
2.6.4. Obyek Hukum Jaminan Fidusia	114
2.6.5. Dasar Hukum yang digunakan dalam Jaminan Fidusia	116
2.6.6. Hak Kebendaan dalam Jaminan Fidusia	114

2.6.7. Tahap Proses pada pembuatan Jaminan Fidusia	120
2.6.8. Berakhirnya Jaminan Fidusia	124
2.7 Kajian Umum tentang Putusan Pengadilan	125
2.8 Kajian Umum Penyelesaian Konflik Antar Sumber Hukum	128
BAB III METODE PENELITIAN	132
3.1. Jenis Penelitian	132
3.2. Pendekatan Penelitian	132
3.3. Jenis Bahan Hukum	134
3.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	134
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	135
3.6. Definisi Konseptual	135
BAB IV PEMBAHASAN	138
4. 1. Kasus Posisi	138
4.1.1 Kepemilikan Barang Bergerak Menurut KUH Perdata	162
4.1.2 Kepemilikan Benda Bergerak Berdasarkan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia	176
4.2.1 Analisis Hukum Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 2206 K/Pdt/2012.	183
4.2.2 Analisis Hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 319 PK/Pdt/2015..	188
4.2.3 Analisis pertentangan kedua putusan berdasarkan teori konflik hukum.....	191
BAB V PENUTUP.....	195
5.1. Kesimpulan	195
5.2. Saran.....	197
DAFTAR PUSTAKA	199

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak cara memperoleh dan mengalihkan status kepemilikan benda bergerak, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang cara memperoleh atau beralihnya hak milik benda bergerak, yaitu melalui jual beli, penyerahan (*levering*), dan sita jaminan. Perjanjian jual beli barang adalah perjanjian antara pihak pembeli dan pihak penjual untuk menyerahkan suatu barang dengan menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati antara keduanya¹, Pasal 1458 KUH Perdata mengatur secara tegas “Jual Beli dianggap sah antara kedua belah pihak, ketika kedua pihak telah menyepakati terhadap harga dan benda dalam jual beli tersebut, meskipun belum terjadi serah terima atas benda dan pembayaran, namun perjanjian jual beli tersebut harus dilandasi itikad baik berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, karena jika dalam perjanjian dilandasi oleh itikad buruk dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.

Di era modern ini jual beli bisa dilakukan kapanpun, dampak dari perkembangan zaman yang semakin pesat menimbulkan perputaran arus ekonomi yang cepat, akibatnya banyak lembaga - lembaga maupun badan usaha yang menyediakan sistem baru karena kebutuhan masyarakat. Munculnya sistem baru dalam kebutuhan masyarakat yang bisa diajukan oleh seseorang maupun badan usaha yang belum memiliki dana untuk pembelian barang dalam hal memenuhi kebutuhan, atau yang dalam usahanya dilakukan peningkatan, contohnya badan

¹Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan- persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal 17

usaha maupun badan hukum yang menyediakan kredit dan jaminan, dan produk hukum yang mengatur pun dibentuk demi memberi perlindungan dan menjamin keadilan. Khusus dalam jaminan, bisa diajukan untuk memperoleh sejumlah uang dengan menjaminkan barang bergerak maupun tidak bergerak oleh pemberi jaminan kepada penerima jaminan dengan jangka waktu tertentu, jika pemberi jaminan telah melunasi hutangnya maka hak milik barang akan kembali pada pemberi jaminan, jika pemberi jaminan tidak sanggup lagi membayar hutangnya maka hak milik barang yang dijaminkan tersebut beralih kepada penerima jaminan melalui sita eksekusi.

Dalam memperoleh status kepemilikan berdasarkan sita jaminan, telah diatur dalam beberapa aturan atau Undang- Undang, KUHPdata hanya mengatur sebatas jaminan gadai dan hipotik, adapun kekurangannya diatur oleh undang-undang khusus atau aturan yang baru, Peralihan status kepemilikan benda bergerak melalui sita jaminan khususnya jaminan fidusia, yaitu penjaminan dengan mengikatkan barang jaminan dengan sertifikat dan penguasaan barang tetap pada pemberi jaminan (debitur) telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu melalui sita eksekusi dalam keadaan tertentu, artinya dalam posisi pemberi jaminan yang menjaminkan barangnya secara fidusia kepada penerima jaminan sudah tidak mampu membayar utangnya hingga jatuh tempo, penerima jaminan berhak melakukan sita eksekusi terhadap benda milik pemberi jaminan yang sudah diikat dengan sertifikat jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,

sehingga pemberi jaminan fidusia yaitu pemilik barang sekaligus pihak yang menjaminkan dan mengikat barangnya dengan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia, jika angsurannya tidak dibayarkan hingga jatuh tempo, si penerima jaminan berhak melakukan sita eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan karena piutangnya sudah dijamin pembayarannya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam pasal tersebut.

Kembali ke jual – beli, adanya sarana yang memadai membuka peluang untuk dilakukannya jual beli tidak hanya dalam satu negara saja namun juga antar negara, dimana transaksi ini dikenal dengan nama ekspor – impor, ekspor –impor antar negara bisa dilakukan dengan pengangkutan darat, laut, dan udara, untuk antar negara yang terpisah oleh laut dan ekspor impor barang bergerak dalam jumlah besar lebih sering menggunakan pengangkutan laut, dan untuk pengangkutan itu diperlukan konosemen, dimana konosemen itu merupakan surat yang dicetak 3 lembar yang masing- masing dipegang oleh pengirim barang (eksportir), Pengangkut dan juga penerima barang (importir). Konosemen tersebut berfungsi sebagai syarat administratif kepada petugas bea dan cukai serta sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang harus ditunjukkan kepada pengangkut sebagai bukti orang tersebut adalah pihak yang berhak atas barang muatan yang ada pada kapal pengangkut tersebut.

Pasal 506 – 517 KUHD mengatur tentang konosemen dan cara pengalihannya, termasuk jenis, fungsi konosemen dan hak-hak pemegang konosemen, yang dimana dalam pasal 506 konosemen tersebut memiliki fungsi sebagai Tanda bukti penerimaan barang dari pengirim, Persyaratan Pengangkutan, Bukti hak milik atas barang yang sudah dimuat dalam pengangkutan kapal dan

sarana negosiasi, namun karena pasal tersebut diatur dalam buku kedua KUHD bab Va tentang pengangkutan barang-barang, maka konteks konosemen sebagai bukti kepemilikan barang hanya melingkupi antara pemegang konosemen dengan pengangkut saja, dan sebagai surat berharga konosemen adalah salah satu jenis surat berharga karena sifatnya mudah dialihkan, pemegang konosemen yang mengalihkan konosemennya kepada pihak lain maka berlaku pengalihan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam konosemen tersebut.

Dalam kasus posisi yang penulis dapatkan dari 2 putusan pengadilan yang bertentangan, yaitu Putusan Mahkamah agung nomor 2206 K/Pdt/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015, diketahui telah terjadi perjanjian jual beli Komoditas Kacang Kedelai kuning antara Quadra Commodities SA, sebagai eksportir dengan PT. Alam Agri Adiperkasa (PT.AAA) sebagai importir, sebagai importir yang akan menerima muatan Kacang kedelai tersebut, PT AAA telah menerima lembar konosemen. Perjanjian tersebut dilakukan dengan syarat yaitu importir tidak serta merta menjadi pemilik barang sebelum dilakukan pelunasan, yang artinya ketika pelunasan tidak dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan, barang tersebut akan ditarik kembali oleh eksportir.

Selanjutnya selama pengiriman berlangsung, PT. Alam Agri Adiperkasa menggunakan dan menunjukkan lembar konosemen yang dipegangnya sebagai bukti hak milik untuk menjual kacang kedelai kuning tersebut kepada pihak pembeli yaitu PT. Sekawan Makmur Bersama (PT. SMB) tanpa mengalihkan konosemen tersebut, Jual beli antara PT. AAA dengan PT. SMB dilakukan melalui L/C dalam negeri yaitu di Indonesia dikenal dengan nama SKBDN (Surat

Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, dimana PT. AAA menggunakan *Advising Bank* BCA, dan dibayar oleh PT. SMB menggunakan *issuing Bank* Mandiri, karena PT. SMB sebagai pembeli belum memiliki dana untuk membayar, ia mengajukan fasilitas *NCL (Non-Cash Loan)* kepada Bank Mandiri sebagai *Issuing Banknya* untuk melunasi terlebih dahulu pembayarannya kepada PT. AAA dengan menjaminkan secara fidusia seluruh muatan kacang kedelai yang dibelinya dari PT. AAA.

PT. AAA sebagai importir setelah menerima muatan kacang kedelai yang diimportnya meskipun ia belum melakukan pelunasan kepada Quadra Commodities sebagai eksportirnya, mengirimkan muatan kacang kedelai tersebut ke gudang milik PT. SMB dan gudang yang disewa oleh PT. SMB.

Masalah terjadi ketika PT. AAA yang sebelumnya sudah menerima pelunasan dari PT. SMB tidak juga melakukan pelunasan kepada Quadra, diketahui bahwa beberapa orang dengan surat kuasa dari Quadra Commodities mengambil alih secara paksa kacang kedelai kuning yang terletak di Cilegon, serang dengan melakukan pengusiran secara paksa kepada penjaga gudang yang disewa oleh PT. SMB disebabkan belum mendapat pelunasan dari PT. Alam Agri Adiperkasa sehingga PT. SMB mengalami kerugian besar yang membuat PT. SMB tidak mampu menjalankan usahanya lagi sekaligus tidak mampu lagi membayar utangnya sebagai debitur kepada PT. Bank Mandiri sebagai kreditur terhadap barang yang dijaminankannya secara fidusia hingga jatuh tempo, akhirnya PT. SMB mendatangi PT. Bank Mandiri sebagai pemberi jaminan fidusia atas komoditas kacang kedelai tersebut untuk bersama-sama menggugat

Quadra Commodities, adapun barang yang disita secara paksa dan sebelumnya sudah diikat dengan sertifikat jaminan fidusia dan hak sita eksekusi fidusia oleh PT. Bank Mandiri itu diketahui telah dipindahkan ke gudang yang dijadikan sengketa dalam kedua putusan yang bertentangan tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini, telah terjadi pertentangan putusan ditingkat kasasi yaitu Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 yang baru dibacakan putusannya tahun 2013 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari pemohon PT. Sekawan Makmur Bersama dan PT. Bank Mandiri terhadap hasil Banding dari Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PDT/2012/PT.BTN yang memenangkan pihak Quadra dalam tuntutan perlawanan serta menguatkan putusan sita eksekusi dari Putusan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor putusan 03/Pdt.sita.Eks/2011/PN.Srg.jo.Nomor13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, yang menyatakan status kepemilikan barang tersebut tetap menjadi milik Quadra Commodities SA (eksportir) dan membatalkan hak sita jaminan fidusia Bank Mandiri dengan pertimbangan bahwa Bank Mandiri sebagai pemberi fidusia telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga menerima barang yang bermasalah sebagai jaminan fidusia, sedangkan setelah dimohonkan Peninjauan Kembali, Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 mengabulkan dan memenangkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tersebut dan membatalkan Putusan sita eksekusi yang sebelumnya dimenangkan oleh Quadra. Dengan alasan putusan Mahkamah Agung nomor 2206 K/Pdt/2012 merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Sekaligus pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki hak sita eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pertentangan yurisprudensi antara kedua putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana ada ketidakpastian hukum, disitu tidak ada hukum atau tidak ada keadilan.²

George Simmel sebagai penemu teori konflik menjabarkan macam-macam bentuk konflik salah satunya adalah konflik hukum. Teori konflik yang di adopsi di Indonesia berdasarkan teori konflik Simmel ini dikenal sebagai Teori konflik hukum, teori konflik hukum menjelaskan bahwa di Indonesia berlaku 3 komponen sistem hukum, yaitu hukum yang dibuat oleh negara melalui lembaga negara yang berwenang dalam Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), hukum yang terbentuk oleh hakim melalui yurisprudensi (putusan pengadilan), dan hukum yang terbentuk dalam hukum adat melalui kebiasaan di masyarakat (hukum kebiasaan). Seharusnya ketentuan- ketentuan yang dimuat dalam ketiga komponen tersebut tidak saling bertentangan atau berjalan secara harmonis yaitu tidak menimbulkan konflik hukum.³

Namun dalam prakteknya seringkali terjadi konflik hukum, jenis konflik hukum tersebut meliputi konflik hukum antara perundang-undangan dengan putusan pengadilan, perundang- undangan dengan hukum adat , maupun konflik hukum antara sesama peraturan perundang undangan dan konflik hukum antara

²Maranus Gaharpaung, S.H. M.S., Dosen Fakultas Hukum Ubaya, *Ubi Ius, Ubi Lustrum*, artikelhari senin, 28 November

2011<http://www.surabayapagi.com/index.php/23b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962ee3543237619ec4408f24ff88a8d7695>.(online) , diakses pada senin, 28 November 2016

³Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hal 73

sesama putusan pengadilan, untuk itu akan diatasi atau diselesaikan berdasarkan asas- asas hukum yang ada dalam sistem hukum tersebut.⁴

Untuk itu perlu diketahui berdasarkan pertimbangan dari kedua Putusan terakhir yang bertentangan tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015, manakah putusan yang lebih tepat dalam menentukan pemilik muatan kacang kedelai (benda bergerak) tersebut yang harganya belum dibayar oleh importer namun telah dijual kepada pembeli sebagai pihak yang kemudian menguasai barang dan telah dijaminkan secara fidusia kepada bank, berdasarkan aturan syarat sahnya perjanjian, aturan Jual - beli dan beralihnya hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan aturan peralihan hak milik melalui sita jaminan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia serta perlu dianalisis berdasarkan asas- asas dalam menyelesaikan konflik hukum dalam teori konflik hukum, karena akibat adanya pertentangan putusan MA dengan putusan PK ini menyebabkan pihak bersengketa yang awalnya menang menjadi kalah dan pihak yang awalnya kalah menjadi menang, tentunya obyek atau status kepemilikan barang yang disengketakan menjadi berubah atau berpindah karena adanya perbedaan putusan tersebut.

Adapun sebagai tambahan yang menurut penulis juga penting untuk dimasukkan, yaitu terkait dengan kasus posisi dimana importir melakukan penjualan barang dengan pembeli atas muatan kacang kedelai yang masih diangkut dengan menunjukkan saja konosemen yang dipegangnya tanpa melakukan pengalihan konosemen, meskipun akhirnya muatan kacang kedelai

⁴*Ibid*, hal 74

tersebut telah dikirim sampai ke gudang pembeli, namun mengakibatkan pembeli akhirnya mendapatkan masalah hukum dengan eksportir, akan penulis analisis berdasarkan aturan KUHPerdata tentang asas itikad baik, yaitu penggunaan konosemen yang dilakukan importir dirasa tidak sesuai dengan aturan umum surat berharga.

Karena kasus ini diputus dalam kategori perkara perdata, maka berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut: **Analisis Yuridis Pertentangan Putusan Mahkamah**

Agung Nomor 2206 K/Pdt/ 2012 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 tentang Sengketa Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana analisis hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 K/Pdt/ 2015 berdasarkan KUHPerdata dan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Peninjauan

Kembali Nomor 319 K/Pdt/2015 berdasarkan KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum diharapkan penulisan ini pada akhirnya dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini nantinya memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait antara lain:

- a. Pelaku usaha ekspor- impor melalui laut
- b. Badan Usaha yang membeli barang dari importir
- c. Bank sebagai *Issuing* dalam *L/C* sekaligus Pemberian Jaminan Fidusia
- d. Para ahli maupun sarjana hukum dalam mempraktekkan penyelesaian konflik hukum
- e. Mahasiswa Fakultas Hukum

1.5. Sistematika Penulisan

Bahan Penelitian akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan

permasalahannya. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Terkait dengan putusan pengadilan akan diambil dari putusan terkait yaitu putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015, Sementara untuk buku, jurnal, dan makalah, akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah proses analisis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan rincian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan menggunakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di dalam kajian pustaka, akan menyajikan landasan teori yang relevan dengan penelitian yaitu: Kajian umum tentang status perjanjian jual beli, kajian hukum tentang konosemen, kajian hukum tentang jaminan fidusia dan kajian hukum tentang surat kredit berdokumen dalam negeri serta kajian umum pertentangan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Pertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Peninjauan kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 tentang Sengketa perdata berdasarkan KUHPdata dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya dimulai dari penguraian posisi kasus, lalu pembahasan mengenai analisis hukum kedua putusan yang bertentangan berdasarkan, KUHPPerdata, dan analisa yuridis kedua putusan yang bertentangan berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, dan analisis hukum putusan Pengadilan mahkamah agung yang menolak permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi yang membatalkan perjanjian jual beli antara pembeli dengan importir sekaligus penjual tanpa diikutkannya importir kedalam phak yang bersengketa, serta analisa yuridis Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Perjanjian

Pengertian orang awam perjanjian dipahami sebagai perjanjian dalam arti sempit. Dalam kehidupan sehari-hari istilah perjanjian diartikan sebagai perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya kontrak rumah. Tetapi menurut hukum istilah perjanjian adalah sama pengertiannya dengan perjanjian. Dengan demikian menurut hukum istilah perjanjian rumah adalah tidak benar, yang benar adalah perjanjian sewa rumah.⁵

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti:

- a) Dalam KUH Perdata (Subekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b) Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- c) Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid I* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.

Hal tersebut berarti bahwa untuk *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perikatan sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313

⁵R. Soeroro, *Perjanjian di Bawah Tangan : Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011. Hlm. 6

ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme;
3. Bersifat dualisme

Ketidakjelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut⁶:

1. Adanya perbuatan hukum
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antar dua orang atau lebih
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal. 15

7. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik

8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya⁷. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

1. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak
3. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan *contract is:*

An agreement between two or more persons-not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them. Artinya perjanjian adalah suatu persetujuan antara

dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.⁸

Di dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan dengan *contract* adalah *an agreement between two or more person which creates an obligation to do or*

⁷Salim H.S., *Op.Cit*, Hal 25.

⁸Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal 26

not to do particular thing. Artinya, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.⁹ Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa perjanjian dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi perjanjian yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam perjanjian semata-mata hanya orang-perorangan. Akan tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang-perorangan yang membuat perjanjian, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian, definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan bahwa perjanjian adalah¹⁰:

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”

Unsur yang tercantum pada definisi terakhir adalah:

1. Adanya hubungan hukum, hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

⁹I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2008, Hal 12

¹⁰*Ibid*, hlm. 17

3. Adanya prestasi, prestasi terdiri atas menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan.

Menurut namanya, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian *nominaat* dan *innominaat*. Perjanjian *nominaat* merupakan perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata dan disebut dengan perjanjian bernama. Perjanjian *innominaat* merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berperjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama) yaitu:

“Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij autonomi* yang berlaku dalam perjanjian.”¹¹

Dari uraian itu dapat dikemukakan unsur perjanjian *innominaat*, yaitu

1. Perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata
2. Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
3. Didasarkan pada asas kebebasan berperjanjian.

2.1.1 Jenis – Jenis Perjanjian

Para ahli di bidang perjanjian tidak ada kesamaan sudut pandangan tentang pembagian perjanjian. Masing-masing ahli mempunyai pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada ahli yang mengkaji jenis-jenis

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994, hal. 6

perjanjian itu dari sumber hukumnya, dari bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Adapun beberapa pembagian jenis-jenis perjanjian.¹²

1. Perjanjian menurut sumbernya

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan perjanjian yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (perjanjian) dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan,
- b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik,
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban,
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*,
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

2. Perjanjian Menurut Namanya Pasal 1319 KUH Perdata

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Dalam pasal 1319 KUH Perdata hanya disebutkan 2 (dua) macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Perjanjian *nominaat* adalah perjanjian

¹² *Ibid*, hlm. 18.

yang dikenal dalam KUH Perdata, yang termasuk dalam perjanjian *nominaat* adalah jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, jenis perjanjian ini belum dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam perjanjian *innominaat* adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, perjanjian *rahim*, *joint venture*, perjanjian karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain. Namun Volmaar mengemukakan perjanjian jenis ketiga yaitu perjanjian jenis campuran. Perjanjian campuran, yaitu perjanjian atau perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang perjanjian). Tetapi dalam perjanjian itu terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contohnya seperti seorang pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) yang menyewakan kamar-kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyediakan makanan (jual beli), dan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa). Perjanjian campuran ini juga disebut dengan *Contractus Sui Generis*. Artinya ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus paling banter dapat diterapkan secara analogi (Arrest HR, 10 Desember 1936) atau orang menerapkan teori absorpsi (*Absorptietheorie*). Artinya diterapkanlah peraturan perundang-undangan dari perjanjian, di dalam peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa yang paling menonjol (HR, 12 April 1935), sedangkan

dalam tahun 1947 Hoge Raad menyatakan diri (HR, 21 Februari 1947) secara tegas sebagai penganut teori kombinasi.

3. Perjanjian Menurut Bentuknya, (Pasal 1320 KUH Perdata; Pasal 1682 KUH Perdata)

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita melihat pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya cukup dengan lisan atau kesepakatan saja. Dengan adanya konsensus maka perjanjian itu telah terjadi, termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Perbedaan ini diilhami dari hukum Romawi yaitu *Corpus Juris Civilis*. Di dalam hukum Romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetapi perlu diucapkan kata-kata yang suci dan perjanjian itu harus didasarkan atas penyerahan nyata dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.¹³

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata). Perjanjian ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam

¹³Damang Averroes Al-Khawarizmi 2011. Jenis- Jenis Kontrak <http://www.negarahukum.com/hukum/jenis-jenis-kontrak.html> (online), diakses pada Kamis 10 November 2016.

bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta pejabat. Di samping pembagian menurut bentuk tersebut, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir dan memiliki ketentuan atau klausula baku yang berlaku kolektif.¹⁴

4. Perjanjian Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.¹⁵

- a. Perjanjian timbal balik tidak sempurna senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak adanya prestasi yang seimbang satu sama lain.
- b. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 87

¹⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok- Pokok Hukum jaminan dan jaminan Perorangan di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 1980. Halaman 6.

pinjam mengganti. Pentingnya perbedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

5. Perjanjian Cuma- cuma atau Dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya: hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu dan senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berhubungan. Misalnya A menjanjikan kepada B sesuatu dengan jumlah tertentu, B menyerahkan sebuah benda tertentu kepada A.

6. Perjanjian Berdasar Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang ditimbulkan oleh hal kebendaan, diubah atau dihilangkan, hal itu untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Disamping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok

merupakan perjanjian yang utama, yaitu pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun kepada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian aksesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.¹⁶

2.1.2 Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata (*Civil Law*) adalah sebagai berikut.

1. Menurut KUH Perdata (*Civil Law*)

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

(1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak,

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

(2) Kecakapan melakukan perbuatan hukum,

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum,

¹⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Ibid*, Halaman 7.

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum:

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*)
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata)

Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963. SEMA tersebut menghapuskan ketentuan Pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum karena menyebabkan adanya perbedaan diantara semua warga Indonesia, gagasan sema tersebut digunakan Pada Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur mengenai seimbangannya kedudukan suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum.

(3) Adanya objek

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.¹⁷ Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

¹⁷Sudigno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta: Liberty, 2005: Halaman 37.

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu,
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang

- (4) Adanya kausa yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak*

(kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya

disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila

bertentangan dengan UU, Kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge

Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang

menjadi tujuan para pihak.

Syarat yang pertama dan yang kedua disebut sebagai syarat Subjektif

karena menyangkut para pihak yang mengadakan

perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan yang keempat adalah

syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila

persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akibatnya adalah bahwa

dengan tidak dipenuhinya persyaratan subjektif (kesepakatan dan

kecakapan) maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak

melalui pengadilan, sedangkan apabila yang tidak terpenuhi syarat

obyektif (suatu hal tertentu dan kausa yang halal) maka perjanjian

batal demi hukum. Mengenai batal demi hukum atau batal dengan

sendirinya adalah apabila persyaratan obyektif tidak dipenuhi. Ini

berarti bahwa perjanjian tersebut seolah-olah tidak pernah ada, atau

sejak semula secara yuridis tidak pernah ada perikatan. Ini berarti pula bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pihak yang lain, karena tidak ada dasar hukumnya, sehubungan dengan hal tersebut maka hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau perikatan.¹⁸

2.1.3 Asas- Asas Perjanjian

dikenal tiga belas asas perjanjian dalam hukum, tetapi menurut para ahli perdata terdapat lima asas yang penting di antaranya yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan dalam asas tersebut merupakan perwujudan dari kehendak bebas, cerminan hak asasi manusia.¹⁹

Dengan asas tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata, namun bisa diatur sendiri dalam perjanjian. Pasal-pasal di dalam Buku III KUH Perdata baru mengikat terhadap pihak yang berkontrak, jika mereka tidak mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian, tetapi aturan kepentingan itu tidak lengkap sehingga soal-soal yang tidak diatur sendiri itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan.

¹⁸Op.cit. hlm. 23 - 25

¹⁹Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal 86

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dengan bebas dalam beberapa hal yang ada kaitannya dengan perjanjian, yaitu:²⁰

- a. bebas untuk menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. bebas untuk menentukan atau memilih dengan pihak mana ia akan melakukan perjanjian;
- c. bebas untuk menentukan isi atau klausul dalam suatu perjanjian;
- d. bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan ia lakukan; dan
- e. kebebasan- kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Pada awalnya, suatu perjanjian atau kesepakatan harus diperjelas dengan pengucapan sumpah, tetap sejak abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja, dan kemudian terbentuklah paham yang menyatakan adanya kesepakatan di antara para pihak, suatu perjanjian dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Asas ini bisa ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun seperti itu perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan (levering) ataupun pemenuhan suatu

²⁰Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1998, hal 15

bentuk tertentu yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku²¹.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini disebut dengan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang menjelaskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang yang berlaku terhadap para pihak yang membuatnya. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.²² Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Setiap orang yang membuat suatu kontrak, dia terikat kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam kontrak tersebut karena kontrak tersebut terdapat janji-janji atas prestasi yang harus dipenuhi dan janji tersebut memiliki kekuatan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya aturan undang-undang.²³

4. Asas Iktikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas iktikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama

²¹Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 29

²²Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 9

²³Riduan Syahrani, Op.cit., hal. 5

sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak si debitor maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya selain pihak yang melakukan perjanjian.²⁴ Dalam hukum perjanjian, itikad baik memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif, bisa diartikan sebagai taraf kejujuran seseorang, yaitu apa yang terdapat pada seseorang atau subyek hukum pada saat melakukan perbuatan hukum dalam menjalin hubungan hukum.
- b. Itikad baik dalam pengertian obyektif adalah jika pelaksanaan suatu prestasi dalam perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa saja yang bisa dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.²⁵

5. Asas kepribadian (*Personalia*)

Asas personalia diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPdata, yang menyebutkan: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya menempatkan hak-hak dan kewajiban- kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).²⁶

Selain kelima asas di atas, M. Hamidi Masykur, SH, MKn dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Prof. Dr. Bakrie SH., MS., DKK menuliskan materi Asas – asas yang berkaitan dengan Hukum Perikatan

²⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hapusnya Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2003. *Hal 80*.

²⁵A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 19

²⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal. 15

dan menempatkan beberapa asas lain yang diatur dalam KUHPerdara
yaitu:²⁷

6. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang dilakukan para pihak di kemudian hari.

7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan prestasi dalam perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan berhak menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memiliki kewajiban pula untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Jika tidak maka berlaku asas *Exemptio non adimpleti contractus* yaitu gugurnya kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi prestasi disebabkan pihak lain juga belum melaksanakan prestasinya (Pembatalan Perjanjian)

8. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menjelaskan jika subyek hukum yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain, walaupun subyek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

9. Asas Moral

Asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk

²⁷M. Bakrie, DKK, *Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-asas Hukum Jilid*
2, Malang, Tim UB Press, Hal 28- 30

menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal tersebut terlihat di dalam *Zaakwerneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan secara sukarela (moral). Yang bersangkutan memiliki kewajiban atau tanggungjawab hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nurani. Misalnya suatu perusahaan induk berdasarkan asas moral menanggung kerugian pihak lain yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan cabangnya.

10. Asas Keadilan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini memiliki kaitan dengan ketentuan atau klausula mengenai isi perjanjian. Dalam asas tersebut harus mengandung rasa keadilan yang dianggap patut oleh masyarakat. Gagasan kontrak sosial dalam teori keadilan oleh John Rawls yang memuat beberapa unsur, yakni:²⁸

- a. Mengizinkan kita untuk memandang prinsip keadilan sebagai hasil kesepakatan bersama yang rasional.
- b. Gagasan kewajiban yang berdasar perjanjian menekankan pihak-pihak yang ambil bagian dalam kesepakatan bersama tersebut harus membuat komitmen dasar terhadap prinsip-prinsip keadilan harus didukung.

²⁸ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Vol.9 No. 2 Juli – Desember 2013, Hal. 40

c. Gagasan kontrak sebagai perjanjian demi keuntungan timbal balik memuat anjuran agar prinsip- prinsip keadilan yang ada untuk mendukung kerjasama setiap pihak dalam perjanjian.

Sejajar dengan keadilan yang dianggap patut dalam suatu perjanjian menurut Ulpianus adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing- masing apa yang seharusnya ia terima. Artinya keadilan dapat diwujudkan apabila sesuatu yang diperjanjikan sebanding dengan apa yang seharusnya ia terima, sebanding antara hasil yang diperjanjikan dengan tanggung jawab maupun kewajiban prestasi yang harus dilakukan antara para pihak, sehingga adil disini adalah proporsional.²⁹

11. Asas Kebiasaan

Asas ini menjelaskan jika dalam suatu perjanjian tidak hanya dapat mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, namun juga mengikat pada hal- hal apa saja yang menurut kebiasaan masyarakat lazim atau wajar harus diikuti. Dasar yang digunakan dalam asas ini adalah Pasal 1365 KUHPerdara, yakni mengenai sanksi. Meskipun dalam perjanjian tidak diatur mengenai sanksi, pihak yang melanggar perjanjian bisa dikenakan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar gugatan wanprestasi, sebagai suatu kontrak sosial, sebab hukum mengandung sanksi hukum. Klausul-klausul dalam kontrak merupakan norma primer, bila tidak mengatur secara tersendiri norma sekunder mengenai sanksi, maka berlakulah norma sekundair dalam pasal 1365 KUHPerdara.

²⁹Shidarta, *Keadilan menurut ulpianus*, <http://business-law.binus.ac.id/2014/11/03/keadilan-menurut-ulpianus/>, (online) diakses hari sabtu 17 desember 2016.

Perikatan tidak hanya bersumber pada perjanjian, tetapi juga bersumber pada undang-undang.

2.1.4 Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

(Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas janji itu mengikat).

2. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata) diperjelas dalam Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata dengan bunyi “perjanjian tidak dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya selain yang diatur dalam Pasal 1317 ayat (1) dan (2)”.

3. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat mereka namun Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata).

4. Janji untuk kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dalam 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut.

- a) Jika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain
- b) Jika seseorang dalam perjanjian membuat suatu janji untuk kepentingan sendiri.

5. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik itu harus ada sesudah perjanjian itu ada.
6. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hak yang diperjanjikan juga mengikat hal-hal berikut.
- a) Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, (Pasal 1339 KUH Perdata)
 - b) Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata)
7. Dalam pemberlakuan unsur-unsur penambah yang menentukan isi perjanjian harus diperhatikan pembatasan umum yakni unsur-unsur penambah baru ditambahkan, kalau sifat perjanjiannya memang membutuhkan penambahan dan yang ditambahkan itu harus sesuai dengan sifat perjanjian yang mau ditambah (Pasal 1339 KUH Perdata)
8. Dengan demikian yang menentukan isi suatu perjanjian adalah³⁰:
- a) Undang-undang yang memaksa, karena perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, maka undang-undang yang seperti itu dapat mempengaruhi isi perjanjian tersebut,
 - b) Kata-kata dalam perjanjian yang bersangkutan,
 - c) Janji yang selalu diperjanjikan,

³⁰Dewi Asmawardhani, *Analisis Asas Konsensualisme terkait dengan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual-Beli Di Bawah Tangan*, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Jurnal Ganec Swara vol.9 No.1 Maret 2015, hal. 9

d) Undang-undang yang menambah/mengatur,

e) Kebiasaan,

f) Keputusan.

9. Undang-undang yang memaksa berarti kepada para pihak yang

membuat perjanjian tidak diberikan kesempatan untuk memilih

menggunakan atau mengesampingkan ketentuan yang bersangkutan.³¹

10. Undang-undang yang bersifat menambah atau mengatur berarti

kepada para pihak yang membuat perjanjian ketentuan yang

bersangkutan boleh secara tegas disingkirkan, tetapi jika para pihak

tinggal diam, maka secara otomatis ketentuan yang bersifat mengatur

mengisi kekosongan perjanjian yang dibuat tersebut.³²

11. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa

dikesampingkan/disingkirkan para pihak dalam membuat perjanjian,

maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang

bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi

batal. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 AB yang menyatakan tiada

suatu perbuatan hukum maupun perjanjian dapat menyingkirkan

undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban atau

kesusilaan.³³

12. Isi perjanjian salah satunya ditentukan oleh kebiasaan, kebiasaan

menurut hukum ada 2 (dua) bentuk, yakni:

³¹ Dewi Asmawardhani, *Ibid*, hal 9

³² Wibowo Tunardy, 2012, *Sumber- sumber hukum*, <http://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/> (Online), diakses pada Kamis 10 November 2016

³³ Wibowo Tunardy, *Ibid*

a) Kebiasaan menurut Pasal 1339 KUH Perdata, yakni suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang dalam hubungan yang jenis yang berlaku di suatu wilayah,

b) Kebiasaan menurut Pasal 1347 KUH Perdata, yakni suatu ketentuan/janji tertentu yang diperjanjikan berulang-ulang dalam perjanjian jenis tertentu (janji yang selalu diperjanjikan).

2.2 Kajian Umum *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen

Dalam Negeri (SKBDN)

L/C adalah metode atau cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor, diatur dalam UCP 600 sebagai seperangkat ketentuan *L/C* yang berlaku secara universal. Inti dari pengertian *L/C* menurut UCP yaitu merupakan janji pembayaran, dilakukannya pembayaran oleh Bank penerbit kepada penerima baik secara langsung maupun melalui bank lain adalah atas instruksi oleh pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri pada dasarnya adalah *Letter of Credit (L/C)* Dalam Negeri yaitu penerbitan SKBDN yang hanya berlaku selama Bank, Pemohon dan Penerima berkedudukan di Indonesia berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI Tahun 2003, dan hanya berlaku untuk transaksi barang dalam hal perpindahan barang dilakukan di Indonesia.³⁴

³⁴Pasal 1 Bagian Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

2.2.1 Terminologi Dalam Ketentuan Penggunaan SKBDN

Sebagaimana *L/C*, SKBDN sebagai salah satu bentuk *L/C* memiliki istilah-istilah yang isinya meliputi nama subyek maupun obyek dalam SKBDN yang ditentukan dalam Pasal 2 – pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 dan dalam penggunaannya meliputi³⁵:

1. Bank, adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bank Pembuka (*Issuing Bank*) adalah Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon (*Applicant*).
3. Bank Penerus (*Advising Bank*) adalah Bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima (*Beneficiary*).
4. Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) adalah Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan Negosiasi (*Negotiation*).
5. Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*) adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.
6. Bank Penegosiasi (*Negotiating Bank*) adalah Bank yang melakukan Negosiasi (*Negotiation*).

³⁵ Pasal 2 – pasal 17, *Ibid*

7. Bank Pembayar (*Paying Bank*) adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima (*Beneficiary*) atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.
8. Bank Peremburs (*Reimbursing Bank*) adalah Bank yang ditunjuk oleh Bank Pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement*) kepada Bank Pembayar.
9. Bank Pengirim (*Remitting Bank*) adalah Bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.
10. Bank Pentransfer (*Transferring Bank*) adalah Bank yang atas permintaan Penerima (*Beneficiary*) melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
11. Bank Tertarik adalah Bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya.
12. Bank Pengaksep (*Accepting Bank*) adalah Bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN.
13. Negosiasi (*Negotiation*) adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank dengan disertai pembayaran.
14. Pemohon (*Applicant*) adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada Bank.
15. Penerima (*Beneficiary*) adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.

16. Janji Tertulis adalah janji Bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.

1.5.1 Mekanisme Transaksi Menggunakan SKBDN

SKBDN diterbitkan oleh bank penerbit yang sering disebut bank pembuka (*Issuing Bank*). *Issuing Bank* dapat menunjuk bank tertentu untuk meneruskan SKBDN kepada *beneficiary*. Bank yang meneruskan ini disebut bank penerus (*Advising Bank*). Bank ini akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* bila mendapat persetujuan dari bank penerbit untuk SKBDN operatif. Namun apabila SKBDN bersifat non operatif maka pembayarannya harus konfirmasi terlebih dahulu dengan bank pembuka. SKBDN operatif maupun non operatif juga berlaku untuk *sight* maupun *usance* SKBDN.

Bank pembayar bagi SKBDN non operatif perlu mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka/penerbit. Bila ini yang dilakukan maka bank pembayar/bank pengkonfirmasi juga bertindak sebagai bank pengirim (*Remitting Bank*). Hasil konfirmasi dengan bank pembuka akan diteruskan ke *beneficiary*. Bila bank meneruskan SKBDN ini maka disebut bank penerus (*Advising Bank*). Penerusan SKBDN terhadap *beneficiary* untuk bernegosiasi pembayaran serta wesel yang diterbitkan akan menempatkan bank itu sebagai *negotiating bank*. Khusus untuk bank penerbit yang tidak mempunyai cabang di wilayah bank tertuju akan menunjuk bank koresponden. Bila

bank koresponden juga ditunjuk untuk melakukan penggantian pembayaran terhadap bank pembayar, maka bank tersebut disebut Bank Peremburs (*reimbursing bank*).

2.2.3. Hubungan Hukum Dalam L/C Dan SKBDN

Dalam transaksi L/C dan SKBDN terdapat pihak- pihak yang memiliki hubungan hukum. Hubungan – hubungan hukum antar pihak yang utama sebagai berikut:

- a. Hubungan Hukum antara pembeli (Pemohon) dan Penjual (Penerima) berdasarkan kontrak penjualan.
- b. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C maupun SKBDN sebagai kontrak.
- c. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerbit berdasarkan L/C maupun SKBDN sebagai kontrak.
- d. Hubungan hukum antara Bank penerbit dengan Bank penerus berdasarkan kontrak keagenan.
- e. Hubungan hukum antara Bank Penerus dan Penerima berdasarkan pembayaran L/C maupun SKBDN.³⁶

Kontrak dasar yang menjadi landasan penerbitan keduanya adalah penjualan. Kontrak jual beli memuat hak dan kewajiban pembeli menjadi pemohon dan penjual menjadi penerima. Isi dari kontrak jual beli secara garis besarnya melingkupi identitas penjual dan pembeli yaitu nama dan alamat.

³⁶Ginting, Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal 15- 16.

Kemudian faktur penjualan yaitu daftar dokumen yang berisikan rincian biaya yang diterima oleh pembeli atas barang atau jasa yang dibelinya.³⁷

2.2.4. Penerbitan SKBDN

Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk melakukan penerbitan

SKBDN adalah:

1. Pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri,
2. Dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, Bank Peremburs dapat berkedudukan di luar negeri.
3. SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang.
4. Dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa.
5. Transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar L/C dan non L/C untuk tujuan ekspor.
6. SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.
7. SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan perdagangan internasional.

³⁷ Norman, A. Hart, *Kamus Marketing*, Bumi Aksara, Jakarta 1995, hal 111.

8. SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada dan Penerima.
9. Jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Bank Pembuka.
10. Dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminandan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon.
11. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran dimuka (*red clause*), bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.
12. Permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya.
13. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama jelas dan alamat pemohon
 - b. Nama jelas dan alamat penerima.
 - c. Nilai SKBDN
 - d. Syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi.
 - e. Rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan.
 - f. Tanggal terakhir pengajuan dokumen.

- g. Tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi.
- h. Tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN.
- i. Media penerbitan SKBDN: surat, teleks, *swift* atau sarana lainnya.
- j. Uraian barang.
- k. Tanggal terakhir pengiriman barang.
- l. Tempat tujuan pengiriman barang.
- m. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN.

Layaknya *L/C*, diterbitkannya SKBDN oleh Bank penerbit atas permintaan pemohon sesuai dengan kontrak penjualan. Bank penerbit atau Bank penerus bukan pihak dalam kontrak penjualan, walaupun nama kedua Bank tersebut dimuat dalam kontrak penjualan. Para pihak dalam kontrak tersebut adalah pembeli dan penjual. Adapun jika terjadi sengketa mengenai barang yang menjadi subyek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dengan penjual merujuk pada kontrak tersebut.³⁸

Dalam lalu lintas transaksi melalui SKBDN memiliki resiko terjadinya sengketa yang mungkin terjadi, maka selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak ada yang dirugikan. Salah satu pihak tersebut bisa saja pembeli, penjual atau bahkan *issuing bank* sebagai bank penerbit ataupun juga pihak *advising bank* sebagai bank pembayar. Dalam hal terjadi sengketa pasti menyangkut dengan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang ikut terkait secara langsung

³⁸Gerhart Gregorius, *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pembayar Dalam Transaksi Letter of Credit apabila terjadi Non Akseptasi oleh Bank Penerbit*- Tesis, Prigram Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009, Semarang, hal 27

dalam arus lalu lintas transaksi SKBDN. Dalam transaksi melalui SKBDN terdapat suatu mekanisme aturan yang telah dibuat agar para pihak dapat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi menggunakan SKBDN, aturan tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai aturan-aturan baku dan mekanisme pelaksanaan SKBDN, tetapi juga mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang mungkin saja terjadi karena kelalaian maupun kesengajaan para pihaknya. Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri merupakan salah satu bentuk perangkat perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan para pihak, disamping perangkat-perangkat hukum lain yang dibuat agar menjamin keamanan dalam bertransaksi menggunakan fasilitas SKBDN.³⁹

2.2.4 Akuntansi SKBDN

Pada dasarnya SKBDN tak dapat dibatalkan (*irrevocable*), kecuali ada persetujuan bank pembuka, bank pengkonfirmasi dan penerima. Oleh karena itu penerbitan SKBDN dapat berupa SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan yang dapat dibatalkan. SKBDN yang tak dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat komitmen, sedangkan yang dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat kontijensi (bersyarat)⁴⁰. Sebagai komitmen, tak dapat dibatalkan dan ada kepastian. Sedangkan kontijensi memberikan indikasi bahwa kelanjutan transaksi ini akan tergantung bank penerbit, bank pengkonfirmasi dan penerima (transaksi

³⁹Gerhart Gregorius, *Ibid*, hal. 28

⁴⁰Pasal 5 ayat (2), *Ibid*

bersyarat). Keduanya dicatat dalam rekening administratif SKBDN dan/tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN ada dua macam :

1. *Sight* SKBDN

Adalah SKBDN atas unjuk, artinya kapanpun ditunjukkan SKBDN dapat dicairkan. SKBDN tersebut sewaktu-waktu dapat dicairkan sepanjang hasil konfirmasi telah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Dalam SKBDN seperti ini harus dicantumkan secara jelas persyaratan pembayaran atas unjuk.⁴¹

2. *Usance* SKBDN

Adalah SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka yaitu surat wesel dengan syarat pembayaran pada tanggal tertentu, beberapa hari setelah ditandatangani atau beberapa hari sebelum ditunjukkan. Pihak *beneficiary* tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli (*applicant*).⁴²

Penerbitan *Usance* SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian pihak *applicant* harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau pada saat SKBDN efektif. Pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan *Usance* SKBDN maupun wesel harus diselesaikan. Penyelesaian wesel merupakan berakhirnya

⁴¹ Amanita Novi Yushita, *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-se-msi/bab-17-skbdn.pdf> (online), diakses hari kamis tanggal 10 november 2016

⁴² Amanita Novi Yushita, *Ibid*

SKBDN. Penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo, sangat tergantung pemegang wesel tersebut.

Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya/ menjualnya.⁴³

Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo.⁴⁴

2.3. Kajian Umum Tentang Konosemen

Konosemen atau yang dikenal dalam transaksi internasional dengan nama *Bill of Lading* adalah dokumen pengangkutan yang berfungsi sebagai tanda terima barang dan dapat dipindah tangankan.⁴⁵ Menurut pengertian bahasa, *Conosement* berasal dari bahasa Belanda dalam bahasa Inggris *Bill of Lading* disingkat *B/L* yang berarti surat pengangkutan barang. Perbedaan keduanya adalah hukum yang mengatur, dimana Konosemen diatur dalam aturan hukum *Civil Law* yang di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan *Bill of Lading* diatur dalam aturan hukum *Common Law* dengan bentuk hasil konvensi internasional yang dikenal dengan "*Hague - Visby Rules 1968* yaitu *Hague Rules 1924* yang diamandemen melalui protokol brussels di tahun 1968."

Konosemen adalah sepucuk surat yang diberi tanggal, yang berisi keterangan menyangkut, biasanya kapten kapal, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu supaya diangkut seluruhnya atau sebagian melalui laut ke suatu tempat tujuan yang telah ditunjuk dan untuk itu diserahkan di situ kepada

⁴³ Amanita Novi Yushita, *Ibid*

⁴⁴ Amanita Novi Yushita, *Ibid*

⁴⁵ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Hlm. 127

sesorang yang telah ditunjuk dan pula atas syarat-syarat apa penyerahan itu akan dilakukan.⁴⁶

Konosemen diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau agennya dan menjelaskan rincian barang-barang yang diangkut oleh armada angkutan tertentu, dalam konosemen menjelaskan nama armada angkutannya, dan sifat pengangkutan tersebut, apakah dapat dialihkapalkan atau tidak. Demikian pula moda transportasi yang digunakan, misalnya hanya sepenuhnya melalui perairan sungai, laut, atau juga melalui angkutan darat untuk sampai ke tempat atau pelabuhan tujuan. Konosemen dapat diterbitkan untuk pengangkutan barang secara sebagian (parsial) dan secara borongan atau charter party.⁴⁷

2.3.1 Pengaturan Konosemen di Indonesia

Konosemen diatur dalam pasal 506 Bab VIA KUHD tentang pengangkutan barang. KUHD menyebutkan konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu dilakukan.⁴⁸

Pasal 507 KUHD menerangkan Konosemen diterbitkan atau dikeluarkan dua lembar dan dapat diperdagangkan. Jumlah dua lembar dalam klausul ini menyatakan jumlah sekurang-kurangnya, karena jika diterbitkan lebih maka harus disebutkan jumlahnya. Jumlah lembar yang diterbitkan itu dapat dijadikan objek perdagangan, maka berlaku adagium “Semua untuk satu, dan satu untuk

⁴⁶Herman. *Opcit.* Hlm. 1

⁴⁷Sufirman. *Opcit Hlm 130*

⁴⁸*Ibid* . Hlm. 130

semua”. Namun dari penerbitan tersebut harus diberi tanda jumlah lembar yang tidak dapat diperdagangkan.⁴⁹

Pasal 470 KUHD menyebutkan bahwa “pengangkutan tidak bebas, bahwa ia tidak bertanggung jawab dan tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan kurang cukupnya usaha untuk dan seterusnya.” Klausul ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan pelayaran harus dapat mengetahui minimal jenis dan kuantitas barang yang dibawanya. Dengan demikian Konosemen yang dalam uraian barang dijelaskan “tidak diketahui”, maka konosemen ini batal demi hukum⁵⁰

Pasal 517b KUHD menetapkan konosemen yang diterbitkan, yang isinya bertentangan dengan pasal 470 KUHD tidak boleh diterbitkan dalam pengangkutan dari pelabuhan Indonesia.⁵¹

Pasal 517 KUHD menegaskan bahwa pemegang seluruh lembaran Konosemen adalah pemegang yang memiliki hak kuat atas barang-barang yang dijelaskan dalam Konosemen. Sesuai dengan adagium “semua untuk satu dan satu untuk semua”, yang berarti bahwa setiap lembar Konosemen dapat berfungsi sebagai lembaran asli.⁵²

Untuk perdagangan internasional seperti L/C dan lain-lain, Konosemen atau *Bill of Lading* dapat dilihat dalam Pasal atau *Article* 20 UCP 600. Dalam pasal ini diterangkan persyaratan bagaimana B/L harus diterbitkan, yaitu wajib:

1. mengindikasikan nama pengangkut dan ditandatangani oleh :

⁴⁹*Ibid.* Hlm. 130

⁵⁰*Ibid.* Hlm. 131

⁵¹*Ibid.* Hlm. 131

⁵²*Ibid.* Hlm. 131

a. Pengangkut atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut, atau.

b. Nahkoda kapal atau agen yang ditunjuk, untuk atau atas nama nahkoda kapal.

2. mengindikasikan bahwa barang yang telah dimuat di atas sebuah kapal yang ditunjuk di pelabuhan muat yang dinyatakan dengan kredit (L/C) dengan.:

a. rumusan kata yang dicetak, atau.

b. notasion *board* yang mengindikasikan tanggal pada saat mana barang telah dimuat di atas kapal.;

c. mengindikasikan pengiriman dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar yang dinyatakan dalam kredit (L/C).

d. merupakan satu-satunya *bill of lading* asli atau, jika diterbitkan lebih dari satu asli merupakan seperangkat lengkap sebagaimana diindikasikan pada *bill of lading*.

e. memuat syarat dan kondisi pengangkutan atau membuat rujukan pada sumber lain yang memuat syarat dan kondisi pengangkutan (*short term* atau *blank bill of lading*) isi dari syarat dan kondisi pengangkutan tidak akan diperiksa.

f. tidak memuat indikasi bahwa *bill of lading* tunduk pada *charter party*⁵³.

2.3.2 Fungsi Konosemen

Fungsi konosemen dapat dilihat sebagai berikut.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 132

1. Tanda terima penyerahan barang (*receipt of goods*) yaitu Konosemen menyebutkan tentang jumlah (kuantitatif) koli baran, berat barang, kualitas dan lainnya. Konosemen dibuat berdasarkan resu mualim (*Stuurman's recu*), yang secara otomatis sebagai tanda terima barang di atas kapal, yang mana konosemen tersebut ditandatangani oleh pihak pemilik kapal atau agennya. Hal ini berarti bahwa nahkoda kapal telah menerima barang dan bertanggung jawab terhadap barang tersebut untuk disampaikan kepada pihak penerima.
2. Perjanjian penyerahan barang (*contract of delivery*). Yaitu perjanjian penyerahan barang tersebut adalah antara pemilik barang atau pengguna jasa (*shipper*) dan perusahaan pelayaran yang mana perusahaan pelayaran berjanji akan membawa barang dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak.
3. Bukti kepemilikan barang atau pihak yang berhak mengambil barang di pelabuhan pembongkaran (*document of title* atau *title of document*) yaitu konosemen memberikan legitimasi atas kepemilikan barang. Hal ini berarti pihak yang memegang atau menguasai Konosemen adalah pemilik barang yang disebutkan dalam Konosemen tersebut. Konosemen yang merupakan Surat Berharga kepemilikan barang, maka instrumen ini dapat diendosir atau dapat diperdagangkan. Sesuai dengan sifatnya bahwa setiap lembar konosemen dapat berfungsi sebagai lembar asli, maka dengan memperlihatkan konosemen kepada pihak pelayaran, maka barang dapat diambil dengan *Delivery*

Order(DO), sedangkan penyerahan konosemen asli oleh pelayaran kepada penerima barang, setelah penerima memenuhi kewajiban-kewajiban, seperti biaya bongkar, sewa gudang, dan lainnya.

4. Perlindungan terhadap barang yang diangkut. Yaitu konosemen merupakan jaminan terhadap barang-barang yang diangkut, karena mengikat tiga pihak yaitu pengangkut (kapal), pengirim barang (*shippers*), dan penerima barang (*consignee*), praktis barang akan terlindungi dari perbuatan yang tak diinginkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dapat dilihat pihak mana yang harus bertanggung jawab.

5. Kuitansi (bukti pembayaran) uang tambang. Pada dasarnya Konosemen diterbitkan setelah biaya pengangkutan atau pengiriman barang dibayar. Namun dalam realisasinya terdapat minimal dua syarat pembayaran uang tambang atau biaya pengiriman barang, yaitu pembayaran dimuka (*freight prepaid*) dan pembayaran kemudian atau di pelabuhan tujuan (*freight to be collected*). Sesuai dengan ketentuan di bidang pelayaran yaitu Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang pengangkutan di perairan, biaya pengiriman atau tarif pengangkutan barang ditetapkan berdasarkan jenis barang, sarana yang digunakan, atau sifat barang yang akan diangkut (misalnya, *bulk cargo* atau *packing cargo*) dan jarak atau waktu tempuh.

6. Tanda bukti lawan. Yaitu konosemen adalah satu-satunya dokumen sah atas kepemilikan pengiriman suatu partai barang. Artinya jika seseorang mengakui kepemilikan suatu barang tanpa memperlihatkan

konosemen maka yang bersangkutan akan ditolak untuk menguasai barang yang di”akui”nya itu.

Fungsi – fungsi ini yang akan memberikan bahwa pemilik barang adalah pihak yang namanya tercantum dalam konosemen dan berhak untuk mengambil barang. Di samping itu, memberikan hak kepada pemilik barang untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain atas pengganti maupun atas unjuk dilakukan dengan cara endosemen yaitu penyerahan secara fisik lembar konosemen tersebut kepada pihak lain atau pemegang baru, sehingga pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dalam lembar konosemen tersebut. Kondisi ini bagi sebagian pendapat menggolongkan konosemen sebagai Surat Berharga. Konosemen merupakan satu-satunya dokumen pelayaran yang mempunyai fungsi *document of title*.⁵⁴

2.3.3 Jenis Konosemen

Konosemen dilihat dari bentuknya terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Konosemen yang dapat diperdagangkan atau disebut *Negotiable B/L*.

Konosemen yang bisa diperdagangkan dan mengalihkan semua hak yang terdapat dalam konosemen tersebut oleh pemilik lama kepada pemilik baru, dan konosemen ini mempunyai ciri pada kolom *consignee* tertulis “consigned to...”, lazimnya diisi dengan nama importir dan tanpa kata “order”.

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 134

2. Konosemen yang tidak dapat diperdagangkan atau *Non- Negotiable*

B/L yaitu konosemen ini hanya memiliki arti administratif dan untuk itu ditandai sesuai kepentingannya (*Captain's copy, Copy not negotiable, non-valid*). Sebagai mana diketahui Nakhoda harus menyimpan di kapal konosemen - konosemen (atupun turunan - turunannya). Konosemen yang diperdagangkan jarang disimpan di kapal, baru dititipkan pada kapal jika ada kekhawatiran akan keterlambatan tibanya dipelabuhan pembongkaran yang membawa akibat biaya-biaya tambahan untuk sewa gudang dan sebagainya.

Di samping itu, beberapa istilah yang umum berkaitan dengan konosemen adalah sebagai berikut.

1. *Full set Conosement or Bill of Lading* adalah berjumlah 3 (tiga) rangkap, maka pada saat negosiasi harus diserahkan semuanya kepada pihak bank.
2. *1/3 set Conosement or Bill of Lading*, memberikan pengertian jika konosemen diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) maka hanya 1 (satu) lembar yang dianggap asli atau original. Lembaran itu dapat yang pertama, kedua atau ketiga dan diserahkan kepada bank pada saat negosiasi. Sedangkan lembar lainnya dikirim langsung kepada importir.
3. *2/3 set Conosement or Bill of Lading*, memberikan pengertian jika konosemen atau B/L diterbitkan dalam 3 (tiga) set atau rangkap, maka hanya 2 (dua) B/L yang dianggap asli, yaitu apakah lembar

pertama dan lembar kedua, atau lembar kedua dan lembar ketiga atau lembar pertama dan lembar ketiga.

4. *3/3 set Conosement or Bill of Lading*, memberikan pengertian bahwa semua lembar konosemen yang terdiri dari 3 (tiga) lembar merupakan lembar yang asli dan wajib diserahkan kepada bank sebagai salah satu syarat dalam negosiasi.⁵⁵

2.3.4. Klausul Terkait Dengan Konosemen

Terdapat 2 (dua) klausul yang terkait dengan penerbitan Konosemen yaitu sebagai berikut:

1. Klausul Kasatoria (*Casatoria Clause*), adalah klausul yang memberikan pengertian bahwa setiap lembar Konosemen yang diterbitkan dapat berlaku dan dapat digunakan sebagai tanda terima barang, sehingga tidak ada pemisahan fungsi lembar asli atau *original* dan lembar tembusan atau *duplicate*. Akan tetapi jika salah satu lembar telah digunakan maka lembaran lainnya menjadi tidak berfungsi sebagai tanda terima barang. Lazimnya klausul ini dicetak dengan huruf berwarna merah (*bold*) yang dikenal dengan *red clause*,
“*In accepting this bill of lading, the shipper, consignee, and owner of the goods to bound by all of this stipulations, exceptions and conditions whether written printed or stemped on the front of back here if any, local customs or provilages to the contrary not with standing*” (Dengan diterimanya Konosemen ini, pengirim, penerima dan pemilik barang menyetujui dan mengikat untuk semua

⁵⁵*Ibid.* Hlm. 137

pernyataan, pengecualian dan syarat-syarat baik yang tertulis, dicetak, distempel di belakang atau di muka halaman ini, dikecualikan peraturan-peraturan bea dan cukai atau yang diutamakan lainnya).⁵⁶

2. Klausul Paramount (*Paramount Clause*) adalah klausul yang memberikan perlindungan kepada pihak pengiriman barang (*shipper*) berkenaan dalam proses angkutan melalui laut. Perlindungan dimaksud terkait hal-hal yang terjadi atas barang-barang atau angkutan yang jika ternyata di kemudian hari, misalnya rusak dalam proses muat atau bongkar, atau hilang karena proses perjalanan yang tidak baik dan lain sebagainya tidak menjadi tanggungjawab pihak pengangkut. Artinya, pihak pengirim (*Shipper*) dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud, jika terjadi di luar perbuatan yang disengaja. Klausul Paramount merupakan *best practice* yang bersifat internasional, yang dapat disebut sebagai *The International Convention* dan menjadi *The Hague Rules*.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa klausul kasatoria adalah klausul yang memberikan perlindungan kepada pemilik barang (*Carrier*), sedangkan klausul paramount merupakan klausul yang memberikan perlindungan kepada pihak pengirim barang (*shipper*).⁵⁷

2.4. Kajian Umum Hak Kebendaan

Hukum mengenal pembagian hak menjadi 2, yakni hak perseorangan (*jus in personam*) dan hak kebendaan (*jus in rem*).⁵⁸ Hak perseorangan secara sederhananya adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak tersebut

⁵⁶*Ibid.* Hlm. 138

⁵⁷*Ibid.* Hlm. 139

⁵⁸Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, Harvard University Pers, 1949, Cambridge.

merupakan kewajiban bagi pihak yang dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak lainnya.⁵⁹

Dalam hal ketika seseorang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain maka timbul suatu perikatan antara orang-orang tersebut, dan ketika perikatan⁶⁰ itu berkaitan tentang pemenuhan suatu prestasi berupa melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu⁶¹ maka disini muncul hak perseorangan tersebut, sedangkan mengenai perbuatan prestasi untuk memberikan sesuatu selain terhadapnya melekat suatu hak perseorangan, melekat juga padanya suatu hak kebendaan.

Dalam pembahasan yang terkait dalam asal usul lahirnya hak kepemilikan, dua masalah cenderung untuk dicampur adukkan, terkait dengan hak kebendaan dan hak perorangan sebenarnya sama namun tidak dapat dicampur adukkan. Yang pertama bagaimana orang mendapatkan milik, dan yang kedua bagaimana orang memperoleh hak atas barang yang dimilikinya. Thomas Hill Green dalam prinsip tentang milik menjelaskan bahwa hak milik tidak hanya menyiratkan kepemilikan yang bersifat tetap atas sesuatu, atau milik yang hanya dapat diserahkan atas kehendak baik pemilik, tetapi juga suatu kepemilikan yang diakui sebagai hak. mengenai hak milik kebendaan penting untuk diketahui segala sesuatu yang umpamanya mengenai jenis barang yang mula-mula dan kemudian

⁵⁹E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, 1982, Makassar, hal. 2

⁶⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 1982, Jakarta, hal 122

⁶¹Pasal 1234 KUHPerdata.

seterusnya menjadi miliknya, serta bagaimana orang atau perkumpulan tertentu memiliki barang tersebut.⁶²

Jus in rem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu hak atas suatu benda.⁶³ Perbedaan yang paling mendasar dari kedua hak tersebut adalah bahwa hak perseorangan merupakan hak yang bersifat relatif, yakni hak yang hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertentu saja yaitu kepada subyek hukum yang kepada siapa seseorang melakukan hubungan hukum dengannya, sehingga hak perseorangan tidak dapat dituntut kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum tertentu dengan orang yang memiliki hak tersebut.⁶⁴ Kecuali seseorang sebagai pihak debitur yang memiliki kewajiban hukum yang timbul karena hak dari seseorang tersebut telah menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu dengan pihak yang lain tersebut, atau karena debitur tersebut memiliki suatu hak tertentu terhadap pihak lain tersebut. Sebagai contoh dari hak perseorangan adalah ketika seseorang memiliki suatu utang berupa sejumlah uang tertentu kepada pihak lain dengan dasar perjanjian utang-piutang. Dalam hal ini pihak kreditur memiliki suatu hak perseorangan kepada pihak debitur untuk melakukan sesuatu yakni melakukan pembayaran, maka kreditur tidak dapat menuntut orang lain atas pembayaran kepada pihak lain kecuali debitur berdasarkan suatu hak tertentu terhadap pihak lain telah mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tersebut untuk melakukan

⁶² Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hal 126

⁶³ Hans Kelsen, *Op.Cit.*

⁶⁴ J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, 1999, Bandung, hal 5

pembayaran utangnya atau kecuali di dalam perjanjian utang-piutang tersebut melekat suatu perjanjian *assesoir* berupa perjanjian pertanggungan (*bortocht*).⁶⁵

Berbeda dengan hak perseorangan yang bersifat relatif, hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang mempunyai ciri-ciri: bersifat absolut (bisa ditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu.⁶⁶Oleh karena itu, suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang dapat dituntut terhadap setiap orang yang berkaitan dengan benda yang diiliki oleh seseorang, karena hak kebendaan itu sendiri adalah hak yang mengikuti kemanapun benda itu berada (*droit de suite*).

Hak kebendaan yang mengikuti kemanapun bendanya berada memiliki sifat yang bertingkat dalam artian bahwa ada suatu hak kebendaan yang tingkatannya lebih tinggi dari hak kebendaan yang lainnya dan begitu pula sebaliknya bahwa ada suatu hak kebendaan yang tingkatannya lebih rendah dari hak kebendaan yang lainnya. Tinggi rendahnya tingkatan hak kebendaan tersebut akan berimplikasi mengenai luasnya cakupan hak terhadap suatu kebendaan tertentu. Misalnya ada suatu hak kebendaan yang hanya memberikan kepada orang yang memiliki hak kebendaan tersebut sekedar menguasainya atau menggunakan manfaat kebendaan tersebut, dan ada juga suatu hak kebendaan yang selain memberikan hak untuk menguasai benda tersebut dan menggunakan benda tersebut kepada si pemegang hak kebendaan tersebut memberikan juga hak untuk mengalihkan kepemilikan dari benda tersebut.

⁶⁵Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁶J. Satrio, *Op.Cit*, hal 6- 11.

Hak atas suatu kebendaan dalam hukum common law, dikaji dalam law of property. Secara etimologi, *law of property* dapatlah diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang *property*. Berkaitan dengan pengertian dari *property* tersebut C.R. Noyes menyebutkan bahwa “*the term of property may be defined to be the interest which can be acquired in external object or things. The things themselves are not in a true sense, property, but they constitute its foundation and material, and the idea of property springs out the connection or control, or interest which, according to law, may acquired in them or over them*”.⁶⁷ Dari pendapat yang dikemukakan oleh Noyes tersebut maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan *property* adalah suatu kepentingan yang dapat diberikan atas suatu objek atau benda. Benda- benda tersebut sendiri bukanlah dalam artian sesungguhnya tetapi benda-benda tersebut menentukan pondasi atau material dan ide dari *property* yang memunculkan hubungan atau kontrol atau kepentingan yang dapat diberikan oleh hukum subyek hukum atas benda-benda tersebut. Sedangkan C.B Macpherson menyebutkan bahwa *Property* bukanlah tentang benda itu sendiri melainkan tentang hak atas benda tersebut.⁶⁸

Dari pendapat kedua sarjana tersebut maka dapatlah dipahami bahwa *property* bukanlah berbicara tentang suatu kebendaan tertentu melainkan berbicara tentang hak yang berada di atas benda tersebut, dan hak dalam hal ini juga diartikan sebagai suatu kepentingan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *property* adalah sesuatu yang sama dengan hak kebendaan yang dapat diartikan sebagai suatu suatu kepentingan seseorang, kelompok ataupun asosiasi yang oleh “hukum” atas suatu kebendaan tertentu yang dijamin keberadaannya, dan

⁶⁷ C. R. Noyes, *The Institution of Property*, Longmans. Green & Company, 1936, New York, hal 357.

⁶⁸ C. B. Machpherson, *Op.Cit*, hal 7

pelaksanaan pada kepentingan tersebut dapat dipaksakan kepada tiap- tiap orang lain dihadapan “hukum” yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut.

2.4.1Asas- Asas Hukum Benda

Untuk dapat mengerti dan mengetahui apa-apa saja yang merupakan asas-asas dalam hukum kebendaan maka perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan asas itu sendiri. Secara sederhana yang dimaksud dengan asas adalah suatu meta-norma, atau suatu rumusan yang sebenarnya di dalamnya telah terkandung suatu muatan hukum berupa landasan berpikir bagi terbentuknya suatu norma, hanya saja sifatnya masih abstrak dan belum memuat subjek hukum apa yang kepadanya dibebankan objek muatan hukum tersebut.

Asas atau prinsip dalam bahasa Belanda disebut “*beginsel*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*principle*”. Asas dalam bahasa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar yang menjadi suatu tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita, atau hukum dasar. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri sebagaimana dikutip dari *Cambridge Dictionary*, kata *principle* berarti “*a basic idea or rule that explains or control how something happens or works*”. Sedangkan asas atau prinsip dalam bahasa latin disebut sebagai “*principium*” yakni berasal dari kata “*primus*” yang berarti “pertama”, dan kata “*capere*” yang berarti “menangkap”, secara leksika berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kokohnya suatu norma hukum.⁶⁹ Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan asas hukum, beberapa ahli memberikan batasan atau pengertian sebagai berikut:

1. **Paul Scholten** menguraikan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁷⁰
2. **Van Eikema Homes** menjelaskan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum.⁷¹
3. **Bellefroid** mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.⁷²

⁶⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, 2009, Surabaya, hal 21

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hal 22.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 2003, Yogyakarta: Liberty, hal 34.

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis.⁷³ Dalam satu mata rantai sistem, asas, norma, dan tujuan hukum berfungsi, sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.⁷⁴ Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari “*ratio legis*”-nya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang terdapat di dalamnya.⁷⁵

Adapun di dalam hukum kebendaan dikenal beberapa asas sebagai berikut:⁷⁶

1. Asas Hukum Memaksa (*dwingend recht*)
2. Hak kebendaan dapat dipindahkan
3. Asas Individualitas (*Individualiteit*)
4. Asas Totalitas (*Totaliteit*).
5. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*).
6. Asas Prioritas (*Prioriteit*)
7. Asas percampuran (*vermenging*).
8. Asas publisitas (*publiciteit*)

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung hal 49.

⁷⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006, Semarang, hal 47

⁷⁶Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, Kencana Prenada Media, 2003, hal 226

9. Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak.

10. Asas adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak.

I. Asas Hukum Memaksa (*Dwingend Recht*)

Asas hukum memaksa dalam hukum kebendaan berarti bahwa hukum yang mengatur tentang benda adalah sesuatu yang bersifat memaksa dan bukan bersifat mengatur, oleh karenanya para pihak yang mempunyai hak tertentu atas suatu benda tidak dapat menyimpangi ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Para pihak tersebut juga tidak dapat mengadakan suatu hak yang baru selain yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum perjanjian yang bersifat terbuka (*openbaar system*) yang mana para pihak yang terlibat di dalam perjanjian dapat saja menyimpangi ketentuan yang ada diatur di dalam undang-undang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian itu, sedangkan dalam hukum kebendaan para pihak yang mempunyai hubungan hukum tersebut tidak dapat menyimpangi atau mengadakan suatu hak yang baru selain dari yang telah ditentukan di dalam undang-undang walaupun para pihak telah menyepakati mengenai hal itu. Berikut adalah beberapa sifat dari asas hukum memaksa (*dwingend recht*) pada kebendaan :

a. Hak milik atas suatu kebendaan yang bersifat memaksa

Sifat memaksa dari hak milik atas suatu kebendaan pertama-tama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 584 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdota tersebut dapatlah dipahami bahwa undang-undang telah memberikan batasan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan hak milik atas suatu kebendaan tertentu melalui 5 perbuatan hukum sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 584 KUHPerdota tersebut. Selain dari pada kelima perbuatan hukum tersebut maka seseorang tidak akan memperoleh hak milik atas suatu kebendaan tertentu.

Dalam hal ini proses atau perbuatan hukum yang paling sering mengakibatkan seseorang memiliki hak milik atas suatu hak kebendaan tertentu adalah penyerahan. Penyerahan disini harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan bebas untuk menyerahkan kebendaan tersebut (*beschikkingsbevoegd*). Sistem levering yang terdapat di dalam Pasal 584 KUHPerdota tersebut merupakan suatu sistem causal, yaitu suatu sistem yang menggantungkan sah atau tidaknya suatu penyerahan pada 2 syarat yaitu :

- 1) Sahnya Titel yang menjadi dasar dilakukannya *levering*

- 2) Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (*beschikkingsbevoegd*).

Dengan titel dimaksudkan perjanjian *obligatoir* yang menjadi dasar *levering* itu harus sah menurut hukum, jadi apabila dasar titel itu tidak sah menurut hukum baik karena batal demi hukum (*null and void*) atau dibatalkan oleh hakim (*voidable*), maka *levering* tersebut menjadi batal juga, yang berarti bahwa pemindahan hak milik dianggap tidak pernah terjadi. Begitu pula halnya apabila orang yang memindahkan hak milik itu ternyata tidak berhak melakukannya karena ia bukan pemilik maupun orang yang secara khusus dikuasakan olehnya.⁷⁷ Hal tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata yang menyebutkan “Jual beli atas barang orang adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

b. Hak Gadai bersifat memaksa.

Sebenarnya di dalam ketentuan KUHPerdata tidak satupun ada Pasal yang menyebutkan secara eksplisit bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa.⁷⁸ Akan tetapi beberapa ketentuan di dalam KUHPerdata yang antara lain Pasal 1152, Pasal 1152 bis, Pasal 1153, dan Pasal 1154 KUHPerdata menandakan bahwa hak gadai adalah bersifat memaksa. Pasal 1152, 1152 bis, 1153, 1154 KUHPerdata menyebutkan :

⁷⁷R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung, Hal 12-13.

⁷⁸Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media Group, 2004, Jakarta, hal 182.

Pasal 1152 KUHPerdata

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.”

“Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.”

Pasal 1152 bis KUHPerdata.

“Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.”

Pasal 1153 KUHPerdata

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

Pasal 1154 KUHPerdata

“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

Dari perumusan Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tidak memungkinkan untuk dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai gadai yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata.⁷⁹

2. Hak Kebendaan Dapat Dialihkan

Asas dalam hukum kebendaan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu benda adalah suatu hal yang dalam hal ini dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini yang terjadi adalah peralihan atas hak kebendaan dari seseorang kepada orang lain dengan segala akibat hukum yang ada.⁸⁰ Peralihan hak atas kebendaan tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomsten*). Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian dengan mana suatu hak kebendaan dilahirkan, dipindahkan, dirubah atau dihapuskan.⁸¹ Dapat dikatakan pula bahwa perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk langsung meletakkan atau memindahkan hak kebendaan. Sekalipun istilah “perjanjian kebendaan” sudah umum dipakai dalam literatur hukum perdata, namun demikian istilah itu tidak dikenal dalam

KUHPerdata.⁸² Perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomsten*) memiliki ciri

⁷⁹*Ibid*, Hal 183.

⁸⁰*Ibid*, hal 180.

⁸¹Satrio, J., *Cessie.Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, 2009 Purwokerto, hal 43.

⁸²*Ibid*.

khusus, yakni bahwa walaupun terminologi perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomsten*) menggunakan kata perjanjian akan tetapi perjanjian kebendaan tidak melahirkan suatu perikatan tertentu seperti perjanjian lain pada umumnya,⁸³ karena perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomsten*) merupakan suatu penyelesaian bagi suatu perjanjian obligatoirnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak akan ada suatu perjanjian kebendaan tanpa dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian obligatoirnya (titelnya).

Mengenai asas bahwa hak kebendaan dapat dialihkan di dalam KUHPerdota dapat dilihat pada ketentuan Pasal 584 KUHPerdota yang antara lain menyebutkan bahwa hak milik atas suatu benda dapat timbul karena adanya penyerahan (*levering*) berdasarkan titel yang sah dan dilakukan oleh orang yang berwenang bebas terhadap benda terserbut. Sahnya titel dan berwenangnya orang yang mengalihkan benda tersebut merupakan suatu syarat yang memaksa sebagai akibat dari dianutnya sistem kausal dalam sistem penyerahan (*levering*) di dalam KUHPerdota.⁸⁴ Pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUHPerdota itu di dalam KUHPerdota ada 3 macam, yakni penyerahan nyata (*feitelijk levering*)⁸⁵, cessie⁸⁶, dan lembaga balik nama.⁸⁷

3. Asas Individualisme (*Individualiteit*).

Asas ini berarti bahwa apa yang dapat diberikan menjadi kebendaan adalah apa yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah.⁸⁸ Maksudnya adalah

⁸³ Pitlo, A., *Het Zakenrecht naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, 1949 Harleem, Tjeenk Willink en zoon.

⁸⁴ R. Subekti, *Op.cit*, hal. 12- 13.

⁸⁵ Pasal 612 KUHPerdota.

⁸⁶ Pasal 613 KUHPerdota.

⁸⁷ Pasal 616 jo. Pasal 620 KUHPerdota.

⁸⁸ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 180.

bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau diberikan sebagai benda adalah segala sesuatu yang dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai suatu jumlah atau ukuran tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1333 misalnya yang menyebutkan “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dari ketentuan dalam Pasal 1333 maka dapatlah dipahami bahwa ketika seseorang membuat suatu perjanjian mengenai suatu kebendaan (perjanjian *obligatoir*) tertentu kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomsten*) maka sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau objek penyerahan (*levering*) adalah sesuatu yang jelas jenisnya apa, dapat diukur, dihitung, atau suatu hal yang dapat dijumlah.

4. Asas Totalitas (*Totaliteit*)

Asas ini mengartikan bahwa kepemilikan suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara utuh.⁸⁹ Maksudnya adalah bahwa sesuai dengan sifat individualitas dari suatu kebendaan tersebut, maka tiap-tiap benda yang menurut sifatnya atau menurut undang-undang tidak dapat dibagi maka penyerahan kepemilikan atas benda tersebut harus dilakukan secara keseluruhan benda itu. Di dalam asas totalitas ini tercakup suatu asas perlekatan (*accessie*) karena perlekatan terjadi dalam hal

⁸⁹ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal. 180.

benda pokok (*hoofdzaak*) berkaitan erat dengan benda-benda pelengkapya yaitu benda tambahan (*bijzaak*) dan benda pembantu (*hulpzaak*). Oleh karena itu seorang pemilik benda pokok dengan sendirinya adalah pemilik benda pelengkapya.⁹⁰

Contoh dari asa totalitas ini misalkan saja seseorang memiliki sebuah rumah maka otomatis dia adalah pemilik jendela, pintu, kunci, genteng rumah tersebut.⁹¹ Asas totalitas ini juga menentukan bahwa penjualan dan peralihan suatu kepemilikan suatu benda dari seseorang kepada orang diikuti oleh peralihan segala embel-embel yang melekat pada benda itu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan jual-beli piutang misalnya, bahwa segala piutang yang dijual dan dialihkan kepada orang lain maka peralihan tersebut diikuti juga dengan peralihan dari segala-segala jaminan yang melekat pada piutang tersebut.⁹²

5. Asas Tidak Dapat Dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Asas ini merupakan konsekuensi dari asas totalitas (*totaliteit*), dimana dikatakan bahwa seseorang tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (*jura in re aliena*), namun pembebanan yang dilakukan itupun hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya

⁹⁰ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan, Ind-Hill- Co, 2005, Jakarta, Hal. 36.

⁹¹ *Ibid*

⁹² Pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut. Jadi *jura in re aliena* tidak mungkin dapat diberikan untuk sebagian benda melainkan harus untuk seluruh benda tersebut sebagai suatu kesatuan.⁹³

6. Asas Prioritas (*Prioriteit*)

Asas ini berarti bahwa antara hak kebendaan yang satu dengan hak kebendaan yang lain di atas suatu kebendaan yang sama memiliki tingkatan atau kedudukan yang berjenjang-jenjang (*hierarkis*). Jika dilihat dari sisi penuh atau tidaknya suatu hak kebendaan maka hak yang memiliki kedudukan yang paling tinggi adalah hak milik⁹⁴ baru diikuti oleh hak *bezit*,⁹⁵ dan hak atas kebendaan milik orang lain (*jura in re aliena*)⁹⁶. Jika terjadi perselisihan mengenai hak-hak kebendaan tersebut maka hak yang kedudukannya hierarkinya lebih tinggi lebih diprioritaskan dari pada hak yang kedudukannya prioritasnya lebih rendah. Sedangkan apabila di antara hak-hak kebendaan yang kedudukannya hierarkinya sama maka diberikan prioritas kepada hak yang muncul lebih awal, kecuali untuk hak *bezit* karena hak *bezit* hadir karena penguasaan atas suatu benda tertentu,⁹⁷ dan akan lepas jika penguasaan itu pun lepas.

7. Asas Percampuran (*vermenging*).

Asas percampuran ini terjadi bila dua atau lebih hak melebur menjadi satu.⁹⁸ Hal ini berarti bahwa adanya suatu percampuran yakni peleburan 2 hak apabila 2 hak itu dimiliki oleh orang yang sama dan atas kebendaan yang sama.

⁹³ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal. 180.

⁹⁴ Pasal 570 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

⁹⁵ Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁶ Pasal 674, 711, 720, 756, 1150 dan Pasal 1162 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

⁹⁷ Pasal 1977 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

⁹⁸ Frieda Husni Abdullah, *Op.Cit*, hal. 37.

Misalnya jika A menyewa sebuah rumah milik si B, kemudian A membeli rumah tersebut, maka hak sewa tersebut menjadi lenyap.⁹⁹

8. Asas Publisitas (*Publiciteit*)

Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak kepada masyarakat. Hak milik, penyerahan dan pembebanan hak atas tanah misalnya wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Tanah dan ditulis dalam Buku Tanah (register) agar diketahui oleh umum. Sedangkan untuk benda bergerak, tidak perlu didaftarkan artinya cukup melalui penguasaan dan penyerahan nyata.¹⁰⁰

9. Asas Perlakuan yang Berbeda antara Benda Bergerak dengan Benda Tidak Bergerak.

Pengaturan dan perlakuan dapat disimpulkan dari cara membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak serta manfaat atau pentingnya perbedaan antara kedua benda tersebut. Cara atau kriteria pembedaannya ditentukan oleh undang-undang.¹⁰¹ Sedangkan apa manfaat pembedaannya dapat ditinjau dari sudut penyerahannya, penguasaannya kadaluarsa dan pembebanannya.¹⁰²

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*.

¹⁰¹ Pasal 506-511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰² Frieda Husni Abdullah, *Op.Cit*, hal 37.

10. Adanya Sifat Perjanjian Dalam Setiap Pengadaan atau Pembentukan Hak Kebendaan.

Asas ini berarti bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula setiap hukum perjanjian di dalamnya. Sifat perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (*jura in re aliena*), sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang.¹⁰³

2.4.3 Pembagian Benda Menurut KUHPdata

Di dalam KUHPdata pembagian benda yang relevan bagi tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Benda berwujud dan benda tak berwujud.
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

1. Benda berwujud dan benda tak berwujud.

Pembagian benda adalah sesuatu yang penting, karena dengan pembagian tersebut maka hukum akan memberikan perlakuan yang berbeda antara benda-benda yang dibedakan tersebut. KUHPdata memberikan pengertian benda sebagai barang dan hak-hak yang dapat menjadi objek hak milik. Oleh karenanya dari definisi benda yang diberikan oleh KUHPdata tersebut dapatlah dipahami bahwa ada perbedaan terminologi antara benda dan barang. Dimana dalam hal ini benda diberikan pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang, yakni selain meliputi barang itu sendiri meliputi juga hak-hak lain. Benda adalah segala

¹⁰³Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal. 180.

sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, disini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek hukum. Ada juga benda diberikan makna yang sempit yakni segala sesuatu yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang dimaksudkan adalah kekayaan seseorang.¹⁰⁴

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ada pembagian mengenai benda menjadi benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, akan tetapi jika kita melihat perumusan-perumusan yang terdapat di dalam KUHPerdara, sebenarnya benda yang tidak berwujud walau benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi sebenarnya merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud. Misalnya saja hak guna usaha, yang mana menurut terminologi KUHPerdara disebutkan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdara.

Selain dari pada yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa benda tak berwujud itu sebenarnya adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud, maka sifat itu dapat juga dilihat dari penggolongan bagi perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak sebagai suatu hak (benda tak berwujud) yang digolongkan sebagai benda bergerak. Dari ketentuan KUHPerdara yang menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai

¹⁰⁴Subekti, *Op.Cit* hal. 60

barang bergerak tersebut dapatlah dilihat bahwa hak tersebut merupakan hak yakni benda tak berwujud yang memberikan manfaat kepada seseorang atas sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perjanjian pinjam-meminjam/pinjam pakai habis atau karena perbuatan melawan hukum dan atas suatu benda bergerak tertentu. Oleh karenanya dari ketentuan tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hak-hak yang terkandung di dalam apa yang disebut sebagai surat muatan dan konosemen/bill of lading adalah termasuk hak yakni benda tak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak karena di dalam kedua dokumen tersebut terkandung hak bagi orang-orang yang namanya tercantum di dokumen tersebut untuk menuntut pihak tertentu untuk menyerahkan suatu benda bergerak tertentu. Dengan demikian dari pemaparan tersebut semakin terlihatlah bahwa hak yakni benda tak berwujud merupakan hak yang melekat pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.

Akibat dari pembedaan atau pembagian benda menjadi benda berwujud dan benda tak berwujud adalah mengenai penyerahannya. Di dalam KUHPdata mengatur 3 cara penyerahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 612, 613, 616 dan Pasal 620 KUHPdata. Untuk benda-benda berwujud yang tergolong sebagai benda tidak bergerak maka penyerahannya dilakukan dengan penyerahan nyata yakni adanya suatu peralihan secara fisik dari benda tersebut, atau penyerahan kunci apabila benda-benda tersebut berada di dalam suatu gudang. Sedangkan untuk benda-benda tak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak yang merupakan piutang atas nama dan benda-benda lain yang tak bertubuh penyerahannya dilakukan dengan pembuatan suatu akta baik berupa akta otentik ataupun berupa akta di bawah tangan kemudian memberitahukan penyerahan

tersebut kepada debitur (pihak yang berutang) yang bersangkutan, sedangkan untuk surat-surat piutang atas unjuk penyerahannya dilakukan dengan penyerahan surat tersebut, sedangkan untuk surat piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan penyerahan surat tersebut disertai dengan endosemennya.

Pembedaan cara penyerahan itu dilakukan karena hakikat dari benda tak berwujud tersebut yang tentunya tidak memiliki wujud tertentu sementara penyerahannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan benda tak bergerak. Dengan latar belakang seperti itu bisa dibayangkan, bahwa untuk adanya peralihan atas suatu benda yang tidak ada wujudnya, tentunya perlu suatu tanda, yang bisa nampak keluar, bahwa disana ada tindakan penyerahan, maka dalam Pasal 613 disyaratkan bahwa cession itu dinyatakan melalui suatu akta, bisa otentik bisa di bawah tangan.¹⁰⁵

2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Pembagian benda selanjutnya yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pembagian benda antara benda bergerak (*roerend zaak*) dan benda tidak bergerak (*onroerend zaak*). Dari berbagai pembagian-pembagian benda sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara, maka pembagian benda yang paling penting adalah pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak ini karena menimbulkan berbagai akibat-akibat yang penting dalam hukum.¹⁰⁶ Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat James Schouler yang menyebutkan "*Mobility is leading essential quality of personal property, in all systems of jurisprudence, as distinguished from real property. Things real, like lands, trees, and houses have*

¹⁰⁵ J. Satrio, Cession Atas Nama, Yayasan DNC, 2009 Purwokerto, hal 58-59

¹⁰⁶ Subekti, *Op. Cit.* Hal. 63

fixed locality; they are immovable so to speak. But things personal, such as money, jewelry, clothing, household furniture, boats, and carriages are said to follow the person of the owner wherever he goes; they need not be enjoyed in any particular place; and hence they are movable. This fundamental division of property into immovables and movables is the primary and most obvious one; and to each class we find that a separate set of legal principles has been universally applied."¹⁰⁷ Pembagian benda ini ada sebagaimana diatur dalam Pasal 504

KUHPerdata yang menyebutkan " Ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini ".

a. Benda Tidak Bergerak (*Onroerend Zaak*)

Suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena 2 hal yakni, karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya.¹⁰⁸ Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya maksudnya adalah bahwa karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Adapun yang menjadi barang tak bergerak menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; :
- 2) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510 KUHPerdata.
- 3) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang

¹⁰⁷James Schouler, *Law of Personal Property*, Little Brown and Company, 1907, Boston, hal 7.

¹⁰⁸Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 63.

tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;

4) Kayu belukar dari hutan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang ;

5) Pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari tanah rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama.¹⁰⁹ Adapun yang termasuk benda-benda tak bergerak karena tujuan pemakaian antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada pabrik; barang hasil pabrik, pengilangan, penempatan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;
- 2) Pada rumah; Cermin, lukisan, dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar, atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
- 3) Dalam pertanian; lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati, sarang burung yang

¹⁰⁹ Subekti, *Ibid.* hal 62

biasa dimakan, selama belum dikumpulkan, ikan yang ada di dalam kolam;

4) Runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali;

5) Semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya.

Dari penjabaran di atas maka dapatlah dipahami bahwa benda-benda yang tadinya dianggap sebagai benda bergerak dapat berubah menjadi benda tidak bergerak begitu juga sebaliknya ada juga benda-benda yang tadinya tergolong sebagai benda tak bergerak dapat berubah menjadi benda bergerak. Proses untuk membuat suatu benda tidak bergerak menjadi benda bergerak disebut sebagai severance, sebagaimana yang diungkapkan oleh James Schouler "*The act of complete severance is commonly what changes property from real to personal, from immovable to movable*".¹¹⁰

Sedangkan suatu benda yang tadinya benda bergerak menjadi benda tidak bergerak, misalkan saja batu bata, semen, dan pasir, menurut sifatnya masing-masing adalah benda bergerak, akan tetapi ketika benda-benda tersebut kemudian dibuat menjadi suatu gedung maka benda-benda berubah menjadi benda tidak bergerak, hal tersebut dapat dilihat apabila kita menarik kesimpulan dari Pasal 507 angka 4 KUHPerdara yang menggolongkan runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali sebagai benda tidak bergerak.

¹¹⁰James Schouler, *Op.cit*, Hal 3

b. Benda Bergerak (*Roerend Zaak*)

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan atau benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda bergerak karena ditetapkan oleh undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda tidak bergerak, *liefrenten*, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseorang perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. Selanjutnya dalam *auteurswet* dan *octrooiwet* ditetapkan bahwa hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (*octrooirecht*) adalah benda yang bergerak.¹¹¹

c. Akibat Hukum dari Pembedaan antara Benda Tidak Bergerak dengan Benda Bergerak

Pembedaan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak mengakibatkan beberapa akibat hukum mengenai pembedaan perlakuan bagi kedua jenis benda tersebut. Sedangkan apa manfaat pembedaannya dapat ditinjau dari sudut penyerahannya, penguasaannya kadaluwarsa dan pembebanannya, dan juga penyitaannya.¹¹²

Mengenai penyerahan misalnya, bagi benda tidak bergerak menurut KUHPdata penyerahannya harus dilakukan melalui lembaga balik

¹¹¹Subekti, Op.cit, hal 62

¹¹²Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, hal 40

namasedangkan untuk benda bergerak penyerahannya dilakukan secara penyerahan nyata (*feitelijk levering*) dan dilakukan oleh orang yang berwenang untuk itu atau oleh orang lain atas kepentingan orang yang berwenangan untuk menyerahkan benda bergerak tersebut. Apabila penyerahan itu dilakukan oleh yang tidak berwenangan maka tentu penyerahan itu menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam suatu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh bukan orang atas nama orang yang memiliki benda tersebut maka jual- beli tersebut menjadi batal. Sebenarnya menurut ketentuan mengenai jual- beli tersebut yang batal adalah perjanjian obligatoir-nya bukan mengenai perjanjian kebendaannya (*zakelijk oveerenkomsten*), akan tetapi karena mengenai penyerahan KUHPdata menganut sistem kausal, maka tentu apabila perjanjian *obligatoir*-nyabatal demi hukum atau dibatalkan maka perjanjian kebendaannya pun ikut batal. Penyerahan yang menggunakan sistem kausal maksudnya adalah yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahny penyerahan (*levering*) itu kepada 2 hal yaitu :¹¹³

- 1) Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan (*levering*)
- 2) Penyerahan (*levering*) itu dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (*beschikkingsbevoegd*) terhadap barang dilever itu.

Hal mengenai bahwa KUHPdata menganut sistem kausal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 584 KUHPdata yang antara lain menyebutkan bahwa hak milik dapat diperoleh melalui suatu penyerahan berdasarkan suatu

¹¹³Subekti, *Op.Cit.*, Hal 12.

peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Sedangkan mengenai pembebanannya menurut KUHPerdata bagi benda tidak bergerak hanya dapat dibebankan melalui Hipotek untuk hak-hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, sedangkan untuk hak-hak atas benda tidak bergerak berdasarkan Hukum Adat maka menggunakan lembaga *credietverband*¹¹⁴ (sejak diberlakukannya UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria maka kedua lembaga tersebut sejauh mengenai tanah menjadi tidak berlaku dan digantikan menjadi hak tanggungan), sedangkan pembebanan bagi benda-benda bergerak dilakukan melalui lembaga gadai (namun sekarang untuk bendabenda bergerak dapat juga dibebankan melalui lembaga jaminan fidusia.

Sedangkan mengenai penyitaan, untuk benda-benda bergerak hanya dapat dilakukan melalui lembaga sita hak milik (*revindicatoir beslag*) yaitu sita yang diajukan oleh penggugat terhadap penggugat mengenai suatu barang bergerak berdasarkan alasan hak milik penggugat yang sedang berada di bawah tangan si tergugat. Benda tersebut dikuasai secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau tergugat tidak berhak atasnya, dan itupun terbatas untuk benda-benda milik penggugat pemohon sita.¹¹⁵ Sedangkan untuk benda tidak bergerak penyitaannya dilakukan melalui lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang tidak

¹¹⁴Staatsblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190

¹¹⁵Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktik Kejaksaan Pengadilan*, Tatanusa, 2004, Jakarta, hal 23

bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Penggugat, sehingga sita itu memberikan jaminan kepada Penggugat bahwa kelak gugatannya “tidak *illusoir*” atau “tidak hampa” pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan). Sebenarnya sita ini dapat dilakukan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak akan tetapi pembedaan ini penting mengingat bahwa sita hak milik tidak dapat diberlakukan atas benda-benda tidak bergerak, namun mengenai penguasaannya, bagi benda bergerak berlaku yang namanya bezit, dan untuk benda tidak bergerak berlaku daluwarsa.¹¹⁶

2.4.4 Macam-Macam Hak Kebendaan Menurut KUHPerdara

Adapun macam-macam hak kebendaan menurut KUHPerdara secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yakni antara lain sebagai berikut :

1. Hak Milik
2. Bezit
3. Hak-Hak Kebendaan di atas kebendaan milik orang lain. (*recht op eenanders zaak/Jura in re aliena/right over another property*)

1. Hak milik

Hak milik atas suatu kebendaan merupakan hak yang paling kuat atau paling penuh diantara hak-hak yang lainnya. Hak milik yang bersifat penuh tersebut diakui oleh hukum karena dianggap merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh

¹¹⁶ Wildan Suyuthi, *Op. Cit*, hal. 21.

Macpherson yang menyebutkan "*property is not thought to be a right because it is an enforceable claim : it is an enforceable claim because it is thought to be human right*".¹¹⁷

Hak milik ini dulunya pada zaman kolonial Belanda disebut sebagai Eigendom. Menurut ketentuan Pasal 570 KUHPdata menyebutkan "hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan per undang-undangan".

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPdata tersebut dapatlah dilihat bahwa suatu hak milik walaupun bersifat terkuat atau terpenuh tetapi tetap bersifat terbatas yakni dibatasi oleh undang-undang, peraturan umum, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, selain dibatasi oleh ketiga hal tersebut, hak milik juga dapat dicabut untuk kepentingan umum. Hak kebendaan merupakan hak yang paling lengkap dan paling kuat karena disebabkan oleh 2 unsur yaitu:¹¹⁸

- a. Hak milik adalah hak atas benda sendiri (*recht op eigen zaak*) yakni benda itu merupakan kepunyaan dari yang berhak. Hak-hak

¹¹⁷C.B. Machperson, *Op.Cit*, hal 3

¹¹⁸E. Utrecht, Moh Saleh Djindang, *Op.cit*, hal 288

kebendaan lain hanya menjadi hak-hak atas kebendaan orang lain/
subjek hukum lain (*recht op een anders zaak*).

- b. Hak milik memberikan kepada yang berhak 2 kekuasaan, yakni kekuasaan untuk memungut kenikmatan bendanya, dan kekuasaan untuk mengasingkan seperti menjual, memberi, menghibahkan, menukar dan sebagainya.

Dahulunya hak milik (*eigendom*) dipandang sebagai suatu hak yang sungguh-sungguh “mutlak”, dalam arti tak terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini dimana-mana timbul pengertian tentang asas kemasyarakatan (*sociale functie*) dari hak tersebut. Juga undang-undang Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 1960) menonjolkan asas kemasyarakatan hak milik itu dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang sudah tidak dapat lagi berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak miliknya sendiri.¹¹⁹ Sifat sosial dari hak milik ini dapat dilihat di dalam ilustrasi perkara “*schoorsteen-arrest*” di Perancis, dimana dalam perkara tersebut telah dikalahkan seseorang yang membuat suatu pipa asap di atas atap rumahnya yang ternyata tidak ada gunanya dan hanya dimaksudkan untuk mengganggu tetangganya agar orang ini kehilangan suatu pemandangan yang indah. Hakim menyatakan perbuatan tersebut sebagai “*misbruik van recht*” dan memerintahkan untuk menyingkirkan pipa asap tersebut.¹²⁰

Menurut ketentuan Pasal 584 KUHPerdara menyebutkan bahwa “hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan

¹¹⁹Subekti, *Op.cit*, hal 69-70.

¹²⁰*Ibid*.

untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu". Dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdara tersebut maka dapatlah dilihat bahwa hak milik atas suatu kebendaan tertentu hanya dapat didapatkan melalui 5 cara yakni antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengambilan (contoh : membuka tanah, memancing ikan, dll)
- 2) Perlekatan (*netrekking*) , yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam, (contoh : tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, kuda beranak , pohon berbuah, dll)
- 3) Lewat Waktu (*verjaring*)
- 4) Pewarisan baik karena undang-undang maupun surat wasiat.
- 5) Penyerahan ("overdracht" atau "levering") berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak memindahkan *eigendom*.

2. Bezit

Pengertian tentang bezit di dalam KUHPerdara dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 529 KUHPerdara yang mana Pasal 529 KUHPerdara tersebut menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan *bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu

miliknya sendiri”. Sedangkan menurut Prof Subekti yang dimaksud dengan *bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Pihak yang menjalankan *bezit* adalah subjek hukum yang pada kenyataannya mempunyai hak kuasa, jadi merupakan kekuatan nyata atas suatu benda sehingga benda itu kepunyaannya sungguh-sungguh.¹²¹

Perkatan *bezit* berasal dari kata *zitten* sehingga secara *letterlijk* berarti “menduduki”. Untuk *bezit* diharuskan adanya 2 unsur yakni adanya penguasaan atas suatu benda tertentu dan adanya niat atau maksud untuk memiliki benda tersebut. *Bezit* harus dibedakan dengan *detentie* yakni suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda tertentu karena adanya suatu hubungan hukum tertentu dengan orang lain yang memiliki benda tersebut. Misalkan dalam hubungan sewa menyewa, seorang penyewa rumah, yang mana si penyewa dalam hal ini menguasai rumah yang disewakan oleh pihak yang menyewakan, dalam hal ini si penyewa dianggap tidak memiliki maksud untuk memiliki benda yang berada di dalam penguasaannya tersebut yakni berupa rumah.¹²²

Sedangkan di dalam sistem hukum common law hak yang serupa dengan *bezit* adalah apa yang disebut sebagai *chattel*. *Chattel* sendiri di dalam sistem

¹²¹E. Utrecht, Moh Saleh Djindang Op.cit hal 291

¹²²Subekti, *Op.Cit.*

hukum common law dibagi menjadi 2 yakni chattel real dan chattel personal.¹²³

James Scholer menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan chattel real adalah "*chattels real are interests less than freehold, which are annexed to or concern real estate*".¹²⁴

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan *chattels real* adalah kepentingan yang kurang penuh bila dibandingkan dengan hak milik atas benda tidak bergerak yang diduduki atau dikuasai dan menyangkut tentang benda-benda bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan *chattels personal* adalah, "*....are, properly an strictly speaking, things movable, which may be carried about byt the owner. And which accompany him at law wherever he may go. Animals, household goods, stock in trade, money and jewels, are chattels personal. So also are bill and notes, certificates of public debt, corporation shares, legacies, laon on collateral, security, and indeed, debts demands, and claims generally*". Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan *chattels personal* adalah suatu kepentingan atas suatu benda bergerak yang mungkin dibawa oleh si pemilik, dan yang menemaninya dalam hukum kemanapun si pemilik pergi.¹²⁵

Dari pemahaman tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan *bezit* dan *chattels* merupakan hak yang dapat berupa hak atas benda bergerak ataupun hak atas benda tidak bergerak.

¹²³ James Schouler, *Law of Personal Property*, Little Brown and Company. 1907, Boston, Hal 4.

¹²⁴ *Ibid*, hal. 5

¹²⁵ *Ibid* hal. 6

3. Hak-Hak Kebendaan di atas kebendaan milik orang lain. (*Jura in re Aliena*)

Hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu kebendaan tertentu yang benda tersebut merupakan benda milik orang lain. Hak tersebut memberikan kekuasaan/kewenangan bagi pemegangnya untuk menguasai atau mengambil manfaat dari benda tersebut. Keadaan dimana suatu pihak tertentu menguasai benda tersebut secara nyata disebut sebagai *detentie*.¹²⁶ Adanya suatu hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain itu selalu muncul karena adanya hak yang dimiliki oleh si pemegang hak milik atas suatu kebendaan untuk memberikan hak yang sifatnya terbatas atas benda yang dimilikinya tersebut. Hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu kebendaan milik orang disebut sebagai *jura in re aliena*.

Beberapa hak yang merupakan atau tergolong sebagai hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain antara lain sebagai berikut :

- a. Hak Guna Bangunan
- b. Hak Tanggungan
- c. Hak Gada

a. Hak guna bangunan

Hak guna bangunan secara sederhana dapat dimengerti atau dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanah hak milik orang lain. Hal ini sesuai dengan

¹²⁶ Subekti, *Op.Cit*, Hal. 63.

ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria yang antara lain menyebutkan bahwa “Hak guna bangunan adalah

hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah

yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.

b. Hak Tanggungan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor

lain. Hak tanggungan memberikan hak kepada kreditor untuk

mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari penjualan atas benda yang

dibebankan hak tanggungan tersebut. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan menyebutkan “Apabila debitor cedera janji,

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek

hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

c. Hak Gadai

Hak Gadai adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan atas suatu

benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi utang

seseorang.¹²⁷ Hak Gadai sendiri menurut ketentuan Pasal 1150

¹²⁷Subekti, *Op.Cit.*, Hal. 77

KUHPperdata berarti suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

2.5 KAJIAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan

- jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Menurut J. Satrio hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.¹²⁸ Hemat Salim berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹²⁹

Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas yang intinya pengertian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap

¹²⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hal.3

¹²⁹Hemat Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hal 6.

kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang atau hukum jaminan tidak hanya mengatur hak - hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan hutang utang tertentu namun sama - sama mengatur hak - hak kreditur dan hak - hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda - benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga - lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang.

Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan jaminan. Berdasarkan pengertian di atas, unsur - unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan ialah sebagai berikut :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang hukum jaminan dapat dibedakan menjadi

- 2 macam yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan

tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah - kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang - undangan, traktat, yurisprudensi.

Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah - kaidah hukum jaminan yang bertumbuh, hidup dan berkembang didalam masyarakat.

2. Adanya pemberian jaminan dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Pemberian jaminan dapat juga dikatakan orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit disebut sebagai debitur. Penerimaan jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan atau dari debitur. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit. Lembaga yang memberikan fasilitas kredit tersebut dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada pihak kreditur adalah jaminan materil yang merupakan jaminan berupa hak - hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau dari lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit ini merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan. Maksud dari kata berdasarkan kepercayaan disini adalah

bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup mengembalikan pokok pinjaman dan membayar bunga serta biaya yang dikeluarkan untuk memelihara obyek gadai atau benda jaminan. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.¹³⁰

Menurut Rahmadi Usman unsur - unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan ada sebagai berikut :

1. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan. Sedangkan ketentuan hukum jaminan tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang terpelihara didalam masyarakat.
2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan disebut sebagai debitur yaitu pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai jaminan kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hal ini yang dapat bertindak sebagai pemberi jaminan bisa orang atau badan hukum yang akan mendapatkan fasilitas kredit tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan disebut sebagai kreditur yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu utang piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu

¹³⁰ Hemat Salim, *Op.Cit*, Hal. 7

kebendaan tertentu sebagai jaminan dari pemberi jaminan. Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum. Sama halnya badan hukum yang dimaksud disini ialah bank atau lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena hutang yang dijamin itu berupa uang maka jaminan disini harus dapat dinilai dengan uang.

4. Pemberi jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang tertentu yang artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat hutang, pinjaman atau kredit yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan. Pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan hutang tertentu terhadap kreditur bila debitur mengalami wanprestasi.¹³¹

2.5.1 Pengertian Jaminan Dan Jenis - Jenis Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Di dalam seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Juli 1997 disimpulkan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan berhubungan erat dengan hukum benda. Jaminan didalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan

¹³¹ Rahmadi Usman, *Op Cit*, hal 2.

Hartono dan Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menibulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹³²

Defenisi jaminan yang dipaparkan diatas adalah :

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kreditur (bank).
- b. Perwujudan jaminan ini dapat dinilai dengan uang.
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

2. Jenis – Jenis Jaminan

1. Menurut terjadinya yaitu jaminan terdiri atas :

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang – undang yaitu jaminan yang diberikan oleh undang – undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur.
- b. Jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jaminan ini lahir atas kesepakatan para pihak bukan dikarenakan undang – undang.¹³³

2. Menurut objeknya bahwa jaminan terdiri atas:

¹³² M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, 2002, Jakarta:, hal 50.
¹³³ *Ibid*, Hal 15.

a. Jaminan umum yang merupakan jaminan yang diberikan oleh Undang – undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur. Menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada baik yang berwujud bendabерgerak maupun benda tetap akan menjadi jaminan untuk segala hutang – hutangnya dari para kreditur – krediturnya. Hasil dari penjualan harta benda tersebut menjadi pelunasan hutang debitur kepada kreditur sebanding dengan piutang yang diberikan kecuali ada alasan untuk lebih didahulukan pelunasannya.

b. Jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jadi jaminan khusus ini wujudnya adalah seorang pihak ketiga, yang disebut jaminan orang (borgtocht). Pelaksanaan jaminan perorangan ini adalah bilamana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada pihak kreditur, maka pihak ketiga yang dijadikan jaminan yang akan melaksanakan pembayaran kepada kreditur. Timbulnya jaminan yang bersifat khusus ini tidak dijamin dengan undang – undang melainkan lahir karena diperjanjikan antara pihak kreditur dan pihak debitur.¹³⁴

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku diluar negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

¹³⁴ *Ibid*, Hal. 16.

1. Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan kebendaan ;dan

2. Jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan memiliki ciri –ciri “kebendaan” yang maksudnya memberikan hak mendahului di atas benda – benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda – benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.¹³⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan pengertian jaminan materiil dan jaminan kebendaan, bahwa jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri – ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan yang langsung menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu.¹³⁶

Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan unsur – unsur yang tercantum pada jaminan materiil yaitu :

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
4. Selalu mengikuti bendanya;
5. Dapat dialihkan kepada pihak lain.

¹³⁵Hemat Salim, *Op. Cit*, hal 23.

¹³⁶Sri Soedewi Majchoen Sofwan, *Op Cit*, hal 46.

Menurut Soebekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Pihak ketiga bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut. Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.¹³⁷

Unsur jaminan imateriil (perorangan), yaitu Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.¹³⁸

Jaminan materiil (kebendaan) terdiri atas :

- a. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Hipotek, adalah menurut Pasal 1162 KUHPerdata bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda – benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.
- c. *Credietverband*, adalah hak kebendaan atas benda – benda untuk menuntut suatu perikatan, dengan adanya credietverband ini memberi kesempatan kepada golongan pribumi yang membutuhkan sejumlah uang untuk meminjam dari lembaga – lembaga kredit, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan

¹³⁷Subekti, *Op.Cit*, Hal. 22

¹³⁸Hemat Salim, *Op Cit*. hal 24

Stb.1937 Nomor 190; Hipotek ini diatur dalam Bab 21 Buku II Kitab

Undang - Undang Hukum Perdata.

d. Hak tanggungan, adalah hak atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

e. Jaminan fidusia, Hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana jaminan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Di luar negeri, jaminan terdiri atas 2 yaitu Jaminan dengan menguasai bendanya (*possessory security*), dan Jaminan tanpa menguasai bendanya.¹³⁹

Jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu jaminan di mana benda yang dijaminakan berada pada kreditur. Jaminan ini terdiri atas :

1. *Pledge or pawn* adalah benda yang dijadikan jaminan berada pada kekuasaan si penerima gadai.

¹³⁹ Sri Soedewi Majchoen Sofwan, *Op Cit*, hal. 25.

2. *Lien* adalah hak untuk menguasai bendanya sampai hutang yang berkaitan dengan benda tersebut dibayar lunas.

3. *Mortgage with possession* adalah pembebanan jaminan (hipotek) atas benda bergerak.

4. *Conditional sale* (pembelian bersyarat) adalah perjanjian jual beli dengan syarat bahwa pemindahan hak atas barang terjadi setelah syarat dipenuhi, misalnya jika harga dibayar lunas.

5. *Credit sale* adalah jual beli di mana peralihan hak telah terjadi pada saat penyerahan meskipun harga belum dibayar lunas.¹⁴⁰

Jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu jaminan yang di mana benda yang menjadi jaminan tidak dikuasai penerima jaminan. Yang termasuk jaminan ini adalah;

1. *Mortgage* adalah pembebanan atas benda tak bergerak atau sama dengan hipotek.
2. *Fiduciary* adalah perpindahan hak milik atas kepercayaan yang dipakai jaminan hutang;
3. *Leasing* adalah suatu perjanjian di mana si peminjam menyewa barang modal untuk usaha tertentu dan jaminan angsuran tertentu.¹⁴¹

Penggolongan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak debitur untuk membebani hak – hak yang akan digunakan dalam pemasangan jaminan, apakah yang bersangkutan menggunakan hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek untuk

¹⁴⁰ Hemat Salim, *Op. Cit*, hal 26.

¹⁴¹ *Ibid*, Hal. 27

mendapatkan fasilitas kredit pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.¹⁴²

2.5.2 Ketentuan – Ketentuan Dasar Hukum Jaminan

Ketentuan yang secara Khusus atau ketentuan yang berkaitan dengan jaminan dapat ditemukan dalam :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUHPerdata, bahwa didalam Buku II KUHPerdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak – hak kebendaan baik yang memberikan jaminan. Ketentuan dalam pasal – pasal Buku II KUHPerdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari title kesembilan belas sampai title dua puluh satu Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam pasal – pasal KUHPerdata tersebut diatur mengenai piutang – piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek.¹⁴³

Secara rinci materi kandungan ketentuan – ketentuan hukum jaminan yang termuat dalam Buku II KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

- a. Bab XIX: Tentang piutang – piutang yang diistimewakan (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149); bagian kesatu tentang piutang – piutang yang diistimewakan pada umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138); bagian kedua tentang hak – hak istimewa yang mengenai benda – benda tertentu (Pasal 1139 sampai dengan Pasal 1148); bagian ketiga

¹⁴² *Ibid*, Hal. 28

¹⁴³ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal 4.

tentang hak – hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya (Pasal 1149);

b. Bab XX: Tentang gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Pasal 1161 dihapuskan);

c. Bab XXI: Tentang hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232); bagian kesatu tentang ketentuan – ketentuan umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178); bagian kedua tentang pembukuan – pembukuan hipotek serta bentuk caranya pembukuan (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194); bagian ketiga tentang pencoretan pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197); bagian keempat tentang akibat – akibat hipotek terhadap orang ketiga yang menguasai benda yang dibebani (Pasal 1209 sampai dengan pasal 1220); bagian keenam tentang pegawai – pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab pegawai – pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek dan hal diketahuinya register – register oleh masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232).¹⁴⁴

Keluarnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Beserta Benda- Benda yang berkaitan dengan tanah, maka pembebanan hipotek atas hak atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan lembaga dan ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdota. Sementara itu pembebanan hipotek atas benda- benda yang berkaitan dengan tanah tidak bergerak lainnya selain hak atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, hipotek kapal laut misalnya, tetap menggunakan lembaga

¹⁴⁴Hemat Salim, *Op.Cit*, Hal. 5

dan ketentuan- ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdota.¹⁴⁵

Selain mengatur jaminan hak bendaan, dalam KUHPerdota juga mengatur mengenai jaminan hak perseorangan yaitu penanggungan utang dan perikatan tanggung menanggung. Jaminan hak perseorangan ini tidak diatur dalam buku II KUHPerdota, melainkan diatur dalam buku III KUHPerdota yaitu pada title ketujuh belas dengan judul penanggungan utang yang dimulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.¹⁴⁶

Secara rinci ketentuan- ketentuan hukum, jaminan yang termuat dalam buku III KUHPerdota sebagai berikut Bab ketujuh belas tentang penanggungan utang: bagian kesatu tentang sifat penanggungan (Pasal 1829 sampai dengan Pasal 1830), bagian kedua tentang akibat- akibat penanggungan antara debitur dan penanggung hutang (Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1838, bagian ketiga tentang akibat- akibat penanggung antara para penanggung hutang sendiri (Pasal 1839 sampai dengan Pasal 1844), bagian keempat tentang hapusnya penanggungan hutang (Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850).¹⁴⁷

Selain itu dalam buku III KUHPerdota juga diatur mengenai jaminan hak perseorangan yaitu :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Perjanjian tanggung – menanggung (perikatan tanggungan renteng)

sebagaimana diatur dalam title kesatu bagian kedelapan dari Pasal

¹⁴⁵ *Ibid*, Hal. 16

¹⁴⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal 5.

¹⁴⁷ *Ibid*, Hal. 6.

1278 sampai dengan Pasal 1295. dan Perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdota.

2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Pasal - pasal yang berkaitan dengan jaminan adalah pasal – pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut. Pasal – pasal yang mengatur hipotek kapal laut adalah Pasal 314 sampai dengan pasal 316 KUHDagang.¹⁴⁸

3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan jaminan adalah Pasal 51 dan Pasal 57 Undang - undang Pokok Agraria. Pasal 51 UUPA berbunyi “ Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 diatur dengan undang- undang “. Sedangkan dalam Pasal 57 UUPA berbunyi “Selama undang - undang mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan credietverband tersebut dalam Staatsblad 1908 nomor 542 sebagaimana telah diatur dengan Staatblad 1937 nomor 190, sepanjang hal - hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960.

4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda yang berkaitan dengan Tanah.

¹⁴⁸Hemat Salim, *Op Cit*, hal 16.

Setelah 30 tahun sejak mulai berlakunya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, baru terbentuk undang - undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah. Pada penjelasan Pasal 29 Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan dengan berlakunya undang- undang ini, ketentuan mengenai credietverband seluruhnya tidak perlu lagi. Sedangkan ketentuan mengenai *hypoteek* yang tidak berlaku lagi hanya yang menyangkut pembebasan *hypoteek* atas hak atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah.

5. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia

Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, oleh pemerintah disusun suatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu undang– undang.¹⁴⁹ Maka dengan adanya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan fidusia dan menampung kebutuhan hukum bagi dunia usaha terhadap pendanaan pembangunan ekonomi yang sebagian besar diperolehnya melalui kegiatan pinjam meminjam atau kredit. Sehingga diperlukan peraturan yang jelas, lengkap mengatur fidusia¹⁵⁰

2.6 Kajian Umum Jaminan Fidusia

¹⁴⁹Rachmadi Usman, *Op Cit.* Hal 13.

¹⁵⁰*Ibid*, Hal. 16.

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducia eigendomoverdracht (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.¹⁵¹ Didalam Pasal 1 angka (1) UUJF dijumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. A Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan fidusia adalah “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (Perjanjian Utang Piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis *levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houer yaitu pemegang barang yang dijaminan tanpa hak menguasai barang tersebut dan atas nama *kreditur-eigenaar*”.¹⁵² Dalam kedudukan sebagai kreditur penerima fidusia, maka dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya

“seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia yang dimaksud, bila debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Dengan kata

¹⁵¹ Hemat Salim, *Op. Cit*, Hal. 55.

¹⁵² Salim HS, *Ibid*, hal 56

lain selama debitur pemberi fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya. Artinya, jika utang debitur pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur penerima jaminan fidusia.

Dengan adanya penyerahan status “Hak Milik” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti bahwa kreditur penerima dari jaminan fidusia akan benar-benar menjadi pemilik kebendaan yang dijaminkan dengan fidusia tersebut.¹⁵³

2.6.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini disebut dan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJF. Jaminan fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan.
 - b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya yang tidak dibebani hak tanggungan.
- ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

¹⁵³ Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 284

c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur); dan

d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur/Penerima Fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya.¹⁵⁴

2.6.2 Asas- asas Hukum Jaminan Fidusia

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkrit dan bagaimana hukum itu dapat dialakan. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundangan-Undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum tidak boleh bertentangan dengannya.¹⁵⁵ Adapun asas-asas hukum jaminan fidusia sebagai berikut:¹⁵⁶

Pertama, asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas tersebut bisakah menemukan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 27 UUJF dijelaskan pengertian tentang hak yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang diutamakan

¹⁵⁴Salim HS, *Op. Cit*, hal 57

¹⁵⁵Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 45

¹⁵⁶Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan fidusia Suatu Yang Didambakan*, Medan, Alumni, hal 159

adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas ini dalam ilmu hukum disebut dengan *droit de preference* yaitu kedudukan penerima jaminan fidusia sebagai Kreditur preferen.

Kedua, asas yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut dengan "*droit de suite* atau *zaaksgesvolg*" asas ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Dengan demikian hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Konsekuensi pemberlakuan asas ini baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia. Maksud penegasan ini adalah jika jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia. Jika terjadi peralihan benda jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite*. dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen.

Ketiga, asas yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengartikan jika keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian utang-piutang yang melahirkan hutang dijamin dengan jaminan fidusia. dalam

UUJF asas ini secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Sesuai dengan sifat assesor ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Pencantuman asas assesoritas adalah untuk menegaskan atau menghilangkan adanya keragu-raguan mengenai karakter jaminan fidusia apakah bersifat assesor atau merupakan perjanjian yang berdiri sendiri.

Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Dalam UJF ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan akan ada. Jaminan atas hutang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu. asas ini adalah untuk menampung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Kelima, asas tentang jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang baru akan ada di kemudian hari. Pengaturan asas ini harus dilihat dalam kaitannya dengan sumber hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131

KUHPerdata. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Pasal ini adalah bahwa benda yang akan ada milik si debitur bisa digunakan sebagai jaminan hutang. berdasarkan Pasal tersebut benda yang akan ada adalah benda yang pada saat dibuat perjanjian jaminan belum ada tetapi di kemudian hari benda tersebut ada.

Benda yang akan ada di kemudian hari itu harus milik debitur. inti dari asas ini adalah bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada.

Pengaturan asas ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis dan sekaligus dapat menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada.

Keenam, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ rumah yang terletak diatas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan nama asas pemisahan horizontal. Dalam pemberian kredit oleh bank, penegasan asas ini bisa menampung pihak pencari kredit khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas bangunan/ rumah. Biasanya hubungan hukum antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa.

Ketujuh, asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah data perjanjian pokok yang dijaminakan, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan. Dalam ilmu hukum disebut asas spesialisasi atau pertelaan.

Kedelapan, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia.

Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang wenang berbuat. Dalam UUJF, asas ini belum dicantumkan secara tegas. Hal ini berbeda dengan jaminan hak tanggungan yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 UUHT.

Kesembilan, asas bahwa perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi. Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir, tercatat dan momentum tersebut menunjukkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.

Kesepuluh, asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia meskipun hal itu telah diperjanjikan. Dalam ilmu hukum disebut asas pendakuan.

Kesebelas, asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.

Keduabelas, asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Asas iktikad baik di sini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.

Ketigabelas, asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.6.3 Subyek Hukum Jaminan Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka (5) UUJF). Sedangkan penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi (Badan Usaha Berbadan Hukum) yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Pasal 1 angka (6) UUJF).

2.6.4 Objek Hukum Jaminan Fidusia

Sebelum Berlakunya UUJF, maka yang menjadi objek Jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan Berlakunya UUJF diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-Undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Karena dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan, bangunan yang bersatu dengan tanahnya yang berdiri di atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Negara yang wajib didaftar dan dapat dialihkan bisa dibebani dengan hak tanggungan, maka yang bisa dibebani dengan fidusia adalah bangunan-bangunan yang tidak berdiri

di atas hak atas tanah seperti yang disebutkan di atas. Misalnya adalah bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah hak pakai.¹⁵⁷

2.6.5 Dasar Hukum yang digunakan dalam Jaminan Fidusia

- a) *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri belanda).
- b) *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM- Clynet Arrest* (Indonesia).
- c) Pasal 1338 KUHPdata tentang kebebasan berkontrak.
- d) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.¹⁵⁸

2.6.6 Hak Kebendaan dalam Jaminan Fidusia

Fidusia mempunyai sifat kebendaan (*zakelijkrecht*), yang disebut dengan *droit de suite*, artinya hak- hak yang melekat pada benda itu mengikuti dimanapun bendanya berada dan dapat dipertahankan kepada siapa saja , dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Demikian seperti yang terkandung di dalam Pasal 1163 ayat (2) dan Pasal 1198 KUHPdata yang menyebutkan “Kreditur yang memegang hipotek yang telah terdaftar, dapat menuntut haknya atas barang tak bergerak yang terkait itu, biar di tangan siapa pun barang itu berada, untuk diberi urutan tingkat dan untuk dibayar menurut urutan pendaftarannya”, meskipun kedua pasal tersebut diatur dalam aturan jaminan hipotek namun kedua pasal tersebut terdapat kesamaan dalam hak penerima jaminan fidusia

¹⁵⁷Salim HS, *Op.Cit*, hal.64

¹⁵⁸Rachmadi usman, *Op.Cit*, hal 280

Hak kebendaan (*zakelijkrecht*) berbeda dengan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*), perbedaan tersebut adalah :

1. Hak Kebendaan itu adalah hak absolut atau mutlak, artinya hak ini dapat dipertahankan kepada setiap orang. Hak perorangan adalah hak relatif, yang berarti hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, ia hanya dapat dipertahankan melalui debitur itu saja atau dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Hak kebendaan mempunyai sifat *droite de suite*, artinya hak itu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Dalam hak perorangan sebaliknya mempunyai kekuatan yang sama atas hak-hak lainnya, tanpa memperhatikan saat kelahirannya.
3. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya, hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau digunakan sendiri. Hak perorangan memberikan kewenangan terbatas pada pemiliknya. Ia hanya dapat menikmati apa saja yang menjadi miliknya. Dan tidak dapat dialihkan kecuali dengan persetujuan oleh pemiliknya.
4. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas sedangkan hak perorangan terbatas. Selanjutnya dalam praktik pembedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan itu tidak mutlak lagi. Dengan kata lain sifat-sifat yang bertentangan itu tidak tajam lagi. Pada tiap-tiap hak mendapatkan adanya hak kebendaan dan hak perorangan, bahwa titik

beratnya saja yang berlainan. Mungkin pada hak kebendaannya atau bisa sebaliknya.¹⁵⁹

Adapun hak lain diluar dari hak kebendaan dan hak perorangan telah dikenal dengan nama hak privilegie, hak ini biasa ditemui dalam perjanjian jaminan. Hak tersebut merupakan hak untuk lebih mendahulukan dalam pelunasan atau pembayaran piutang suatu kreditur terhadap debitur, dan pentingnya hak tersebut hanya di dalam adanya *executie* atau pelelangan dari harta debitur, selain itu juga dalam hal kepailitan. Jadi privilegie ini juga merupakan hak yang memberi jaminan tapi bukan merupakan hak kebendaan. Perbedaan antara hak privilegie dengan hak kebendaan adalah, hak kebendaan merupakan hak atas suatu benda sedangkan hak privilegie adalah hak terhadap benda- benda yaitu benda milik debitur. Jika perlu benda debitur tersebut dapat dilelang untuk melunasi piutangnya.¹⁶⁰

Begitu sulitnya memperjuangkan kedudukan fidusia sebagai suatu hak kebendaan (yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung pada suatu benda dan berlaku terhadap sertiap orang utamanya untuk memberikan potensi kepada seorang kreditur diatas kreditur lainnya), disebabkan dalam hukum perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh Undang-Undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perorangan yang hanya memberikan hak- hak pada sutau pihak tertentu saja, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak. Tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya

¹⁵⁹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, I, 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal 75.

¹⁶⁰ Sri Soedewi masjhoen sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, 1981, Yogyakarta, Hal 32.

suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh si berhutang, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas.¹⁶¹

Dengan demikian sifat kebendaan yang terdapat dalam fidusia dalam pemenuhan akan pembayaran hutang-hutang maka ia tidak lebih diutamakan atau didahulukan pemenuhan hutang-hutangnya dan ia tidak lebih diutamakan atau didahulukan pemenuhannya dari piutang-piutang yang lain (*droite de preference*), ini disebutkan dalam Pasal 1133 KUHPerdara “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit berdasarkan hak istimewa dari gadai dan hipotik”.

Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan “Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”. Jadi sudah jelas perjanjian dengan jaminan hak kebendaan lebih menguntungkan dibanding jaminan lainnya.

Hak mendahului dalam pasal 1133 KUHPerdara ini juga diatur di dalam Bab IV Pasal 27 UUJF yang lengkapnya berbunyi :

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

¹⁶¹R. Subekti, 1991. *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hal 66

Mariam Darus mengatakan, bahwa pemilik fidusia mempunyai hak *preferen*. Jika pemberi jaminan secara fidusia berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan hutangnya.¹⁶²

Jika ditelusuri bahwa fidusia tercipta karena masyarakat menuntut, lembaga yang sedemikian adanya seperti fidusia ini, dimana kepercayaan merupakan faktor utamanya untuk penjaminan hutang. Dan hal pengaturannya tidak ada ditemui dalam Undang-Undang. Jadi berlakunya hak *preferen* pada lembaga fidusia ini tidak seperti yang dilihat pada lembaga jaminan hak tanggungan dan gadai yang jelas-jelas diatur di dalam Perundang-Undangan.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemegang fidusia mempunyai hak *preferen*. Sebagaimana terdapat di dalam gadai dan hak tanggungan, Dan dengan alasan yang lebih kuat lagi bahwa fidusia bukan diadakan oleh Undang- Undang tetapi oleh kebiasaan dan kebutuhan akan lembaga fidusia itu sendiri. Tetapi dengan keluarnya UUJF, maka setiap pengikatan jaminan fidusia harus berdasarkan ketentuan Undang- Undang tersebut.¹⁶³

Fidusia adalah perjanjian jaminan yang tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat *accessoir*, artinya hak fidusia ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri, akan tetapi adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, sifat *accessoir* dalam jaminan fidusia disebutkan dalam pasal 4 UUJF yang menegaskan “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pasal 25 juga

¹⁶² Mariam Darus Badruzaman, IV. 1997, *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung. hal 98

¹⁶³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang memberi jaminan*, Ind Hill Co, Jakarta, 2009, hal 17

menegaskan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

2.6.7 Tahap Proses pada pembuatan Jaminan Fidusia

Dalam Proses terjadinya Jaminan fidusia, dilaksanakan melalui dua tahapan, tahapan- tahapan tersebut meliputi:

1. Tahapan Pembebanan Pada Jaminan Fidusia

Pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat materiil untuk diberlakukannya ketentuan-ketentuan UUJF atas perjanjian penjaminan fidusia. Di samping juga sebagai alat bukti. Perlu diketahui, bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangannya dalam satu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antar para pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan Penuangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja.

Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sekurang- kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan dan tanggal lahir, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian, dan utang yang dijamin dengan jaminan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian tersebut cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai Penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.¹⁶⁴

2. Tahap dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang diahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

¹⁶⁴Rachmadi usman, *Op.Cit*, hal 188

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut meskipun berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang meliputi:¹⁶⁵

- a. Identitas pihak dan penerima fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kemudian kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran guna melakukan pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, maka kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia.

Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam

¹⁶⁵ Munir Fuady, 2000, *Jaminan fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 32

pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia.

Tanggal pencatatan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.

Penegasan ini lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 UUF yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan penerima jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Dalam sertifikat jaminan fidusia Pasal 14 ayat (1) UUF dicatumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁶⁶

2.6.8. Berakhirnya Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 25 UUJF menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya, apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang merupakan konsekuensi dari perjanjian assessor yaitu perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang. Maka, jika perjanjian pokoknya atau piutangnya lenyap dengan alasan apapun maka jaminan fidusia juga akan ikut menjadi lenyap.

Hapusnya utang ini dibuktikan antara lain dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur. Dengan hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga dapat dikatakan wajar, mengingat pihak penerima

¹⁶⁶Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal

fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu.

2.7 KAJIAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Tujuan diadakannya proses peradilan di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹⁶⁷ Putusan hakim atau yang juga lazim disebut sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa diantara mereka. Sebab, dengan lahirnya putusan pengadilan para pihak mengarapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi.¹⁶⁸

Terdapat banyak pengertian tentang putusan pengadilan yang dirumuskan oleh para akademisi dalam berbagai macam literatur, diantaranya adalah sebagai berikut:

Prof. Soedikno Mertokusumo memberikan pengertian putusan pengadilan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹⁶⁹ Dalam definisi ini Prof. Soedikno Mertokusumo mencoba memberikan pengertian bahwa putusan pengadilan adalah yang diucapkan di dalam persidangan. Putusan yang

¹⁶⁷ M. Nur Rasaid, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 48

¹⁶⁸ Moh. Taufik Makarao, **Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.

124

¹⁶⁹ Soedikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.

158

diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang kemudian tertulis (*vonnis*), namun apabila memang ada perbedaan maka yang sah adalah yang diucapkan, karena putusan dianggap sudah lahir sejak diucapkan di persidangan.¹⁷⁰

b. Asas Putusan Pengadilan

1) Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang diputus oleh hakim haruslah memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak memiliki cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan sebagai berikut:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini dinyatakan di dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Pasal ini mengharuskan hakim di dalam memutus suatu perkara hakim

¹⁷⁰ Soedikno Mertokusumo, *op cit*

harus memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh memeriksa dan mengadili secara sebagian saja dan mengabaikan sisanya. Apabila demikian terjadi, putusan hakim tersebut dapat dibatalkan pada tingkat peradilan selanjutnya.¹⁷¹

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini disebut *ultra petitem partium*. Asas ini terdapat di dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., 189 ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi tuntutan posita dan petitem gugat, dianggap telah melewati batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila demikian terjadi maka putusan harus dinyatakan cacat, meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan dasar itikad baik (*good faith*) maupun kepentingan publik (*public interest*).

4) Diucapkan Dimuka Umum

Prinsip atau asas ini terdapat di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan sebagai berikut:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

¹⁷¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 800

Asas ini juga tidak terkecuali pada pemeriksaan persidangan yang bersifat tertutup, seperti pada ranah bidang hukum keluarga. Walaupun proses pemeriksaan dalam persidangan bersifat tertutup, namun putusan harus tetap dibacakan dimuka umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan asas ini bersifat memaksa (*imperatief*).¹⁷² Pelanggaran terhadap asas ini dapat berakibat pada tidak sahnya putusan atau putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), sebagaimana ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) Nomor 4 Tahun 1974.

2.8 Kajian Umum Penyelesaian Konflik Antar Sumber Hukum.

Dibuat atau dibentuknya Sumber- sumber hukum formal yang satu dengan yang lainnya diharapkan terjadi keselarasan, dan tidak diharapkan terjadi suatu konflik maupun pertentangan, namun jika konflik tersebut terjadi maka dapat diselesaikan dengan asas-asas yang terdapat dalam sistemnya sendiri. Berikut ini adalah macam konflik antara sumber hukum Formal dan penyelesaiannya meliputi:¹⁷³

1. Konflik antara Peraturan Perundang-Undangan lainnya diselesaikan menggunakan asas- asas berikut:¹⁷⁴

- a. *Lex Specialis derogate lex Generalis*, yaitu jika terjadi konflik antara undang- undang yang bersifat khusus dengan Undang-Undang yang

¹⁷²Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 61

¹⁷³Umar Said Sugiarto, *Op.Cit*, hal 73

¹⁷⁴Umar Said Sugiarto, *Ibid*, hal 74

bersifat umum, maka Undang-Undang yang bersifat umum harus dikesampingkan.

- b. *Lex Superiori derogate lex inferiori*, yaitu jika ada dua Undang-Undang yang tidak sederajat tingkatannya mengatur objek hukum yang sama dan saling bertentangan, maka Undang-Undang yang tinggi tingkatannya mengesampingkan Undang-Undang yang tingkatannya di bawahnya.

- c. *Lex Posteriori derogate lex priori*, yaitu Undang-Undang atau peraturan yang baru mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan yang lama (terdahulu).

2. Konflik Hukum antara Undang-Undang dengan Kebiasaan.¹⁷⁵

Jika terjadi konflik antara Undang-Undang dengan kebiasaan, maka pada prinsipnya Undang-Undang yang harus diberlakukan atau digunakan, terutama Undang-Undang yang bersifat memaksa. Sebaliknya, terhadap Undang-Undang yang bersifat Pelengkap (*Accessoir*), maka Undang-Undanglah yang harus dikesampingkan.

3. Konflik Hukum antara Undang-Undang dengan Putusan Pengadilan¹⁷⁶

Jika terjadi konflik antara kedua sumber hukum tersebut maka dapat diselesaikan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang artinya “Putusan Hakim (Pengadilan) adalah benar”.

¹⁷⁵Umar Said Sugiarto, *Ibid*, hal 74

¹⁷⁶Umar Said Sugiarto, *Ibid*, hal 75

Dengan adanya asas tersebut, maka apabila ada konflik atau pertentangan antara Putusan Hakim (Pengadilan) dengan Undang-Undang, maka Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi yang dianggap benar dan harus dilaksanakan.

Putusan Pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan arti dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah:¹⁷⁷

1. putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding.
2. putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi.
3. Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi,

Adapun Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung hanya bisa diajukan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam peradilan di Indonesia.

Meskipun putusan pengadilan adalah salah satu sumber hukum berbentuk yurisprudensi yang dibuat berdasarkan keputusan hakim, namun kedudukan

¹⁷⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II*, 2008 Mahkamah Agung RI, Jakarta, Hal 94

hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sehingga meskipun keputusan hakim dalam putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap namun mengikatnya hanya berlaku kepada pihak- pihak yang bersangkutan atau bersengketa saja, dan kekuatan hukumnya tidak berlaku seperti peraturan-peraturan umum.¹⁷⁸

Selain tersebut, Hakim dan Hakim Konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali atau menemukan hukum (*Rechtsvinding*) yang hidup di masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 (UUKK), dan pengujian (Eksaminasi) terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila isinya bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat atau bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat maupun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

¹⁷⁸Kansil dan Kristine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, 2011, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 71

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai keputusan- keputusan yang diciptakan oleh hakim (*in konkreto*) dalam proses- proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara – perkara berikutnya.¹⁷⁹ Penelitian dengan jenis normatif ini mengkaji mendalam mengenai pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 Tentang Sengketa Perdata menurut Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

Pendekatan perundang-undangan, *Statute Approach*, dan juga pendekatan kasus, atau *Case Approach*

1) Pendekatan Perundang-undangan(*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tema pokok penelitian. Dalam pendekatan ini, Peraturan Perundang- undangan merupakan dasar awal melakukan

¹⁷⁹ Burhan Ashshofi, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 33

analisis, sehingga dengan pendekatan perundang-undangan akan diperoleh sebuah analisis yang jelas terkait permasalahan yang diteliti.¹⁸⁰, fokus pendekatan perundang-undangan ini akan dilakukan menggunakan KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2) Pendekatan kasus (*case-approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui penerapan norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dengan menelaah pada kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁸¹

Kasus – kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap khususnya dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dalam tingkat kasasi dan Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 319 PK/Pdt/2015. Dalam pendekatan kasus, yang menjadi kajian pokok adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁸²

¹⁸⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 185.

¹⁸¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 268

¹⁸² Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 29.

3.3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
 - b) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c) Pasal 506 -517 Kitab Undang –Undang Hukum Dagang
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
 - e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012
 - f) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015
- 3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli/pakar hukum.

3.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau *Library Research*, lokasi penelusuran bahan hukum dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) dan juga di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dengan menginventarisasi, mempelajari tentang asas- asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada penelitian.

Selain itu pengumpulan bahan sekunder juga dilakukan dengan studi kepustakaan serta dengan cara mengunduh lewat internet, dan dengan membaca buku literatur, makalah, disertasi, skripsi dan jurnal yang memuat materi tentang status kepemilikan benda bergerak melalui perjanjian jual beli maupun melalui sita jaminan fidusia.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum secara normatif ini menggunakan teknik penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik analisa menggunakan interpretasi terhadap yurisprudensi, yang pertama akan diidentifikasi kaidah hukumnya, keputusan hakim akan dianalisis isinya dari tiga sudut, yaitu:¹⁸³

1. Pertimbangan- pertimbangan tentang kenyataan – kenyataan yang didapati oleh hakim setelah memeriksa perkara itu.
2. Pertimbangan- pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara yang ditemukan oleh hakim, berdasarkan kenyataan yang ditemukan.
3. Keputusannya atau, *dictum*.

3.7 Definisi Konseptual

a. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung

Adalah putusan Pengadilan yang diputus oleh hakim lembaga pengadilan tertinggi Negara dan merupakan hasil kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi oleh pihak yang kalah dalam sengketa pengadilan serta merupakan suatu

¹⁸³ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 2013, Jakarta, Hal 68

putusan yang bersifat akhir, berkekuatan hukum tetap dan mengikat dalam upaya hukum biasa dalam sistem peradilan Indonesia.

b. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah Putusan Pengadilan yang diputus oleh hakim lembaga pengadilan tertinggi Negara terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh pihak yang kalah dalam putusan pengadilan sebelumnya dan hanya bisa diajukan jika dalam putusan sebelumnya terbukti terdapat hal-hal yang ditentukan dalam aturan pengajuan PK, serta merupakan upaya hukum luar biasa dalam Sistem peradilan Indonesia.

c. Barang Bergerak

Merupakan jenis barang yang sifatnya mudah dipindah tangankan, pengalihannya dimulai berdasarkan perjanjian disertai adanya *Levering* atau serah terima.

d. Status kepemilikan

Merupakan Hak milik yang melekat pada subyek hukum terhadap suatu barang atau benda dengan hak penuh untuk menikmati kegunaan maupun keuntungan pada barang tersebut untuk disewakan, dijual, dan sebagainya

e. Jaminan Fidusia

Merupakan suatu perjanjian antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan barang dimana pemberi jaminan berhutang tapi masih menguasai barangnya namun barang jaminan diikat dengan sertifikat fidusia sehingga setelah jatuh tempo dan hutang belum dilunasi penerima fidusia berhak menyita barang jaminan tersebut sebagai ganti piutangnya.

f. Sertifikat Fidusia

Merupakan surat bukti terjadinya perjanjian fidusia antara pemberi dengan penerima fidusia yang melekat pada barang yang dijaminkan dan memiliki hak sita yang memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan sita pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

g. Pemberi fidusia

Merupakan pihak pemilik barang yang menjaminkan barangnya secara fidusia kepada pihak penerima fidusia untuk mengajukan suatu utang.

h. Penerima Fidusia

Merupakan pihak yang memberikan piutang kepada pemberi fidusia dengan jaminan yang masih dikuasai pemberi jaminan dan diikat sertifikat fidusia serta memiliki hak sita jaminan sebagai ganti piutang jika dalam hal utang belum dibayar oleh pemberi jaminan melebihi batas waktu utang tersebut jatuh tempo.

BAB IV

PEMBAHASAN

4. 1. Kasus Posisi

Untuk mempermudah pemahaman dalam memahami alur kasus posisi, penulis telah menyusun bagan alur kasus yang diuraikan berdasarkan Putusan-putusan yang terkait dalam skripsi ini, karena hasil pengajuan tingkat kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 amar putusannya adalah Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, maka penulis mengambil data dari Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 03/PDT/2012/PT.BTN dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 yang mendeskripsikan secara lengkap dan akan dijabarkan di bawah ini. Dalam bagan telah digambarkan bahwa terdapat para pihak yaitu Quadra Commodities SA. yang melakukan jual beli ekspor impor dengan PT. Alam Agri Adiperkasa, setelah PT. AAA menerima Lembaran Konosemen untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan PT. AAA kemudian menjual muatan kacang kedelai yang disebutkan dalam B/L yang dipegangnya kepada PT. Sekawan Makmur Bersama (PT. SMB) dengan membuka L/C jenis UPAS (*Usance Payable At Sight*) atau di Indonesia dikenal dengan nama metode pembayaran SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan advising Bank BCA.

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah pada dasarnya sama dengan *Letter of Credit* yang digunakan dalam perdagangan luar negeri, yang membedakan adalah wilayah kepebannya dan valuta yang digunakan. SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta Rupiah dan perpindahan barang dilakukan di wilayah Indonesia, sedangkan L/C berlaku untuk

seluruh dunia dan bervaluta asing serta perpindahan barang boleh dilakukan antar negara. Bank yang menerbitkan SKBDN akan memberikan jaminan pembayaran kepada cabang atau Bank lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan dalam SKBDN. Bank penerbit merupakan Bank nasabah pembeli barang, sedangkan Bank Pembayar merupakan Bank Penjual barang.¹⁸⁴

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SKBDN atau lazim dikenal sebagai L/C dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis termohon (*applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:¹⁸⁵

- a) Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerimanya,
- b) Memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima,
- c) Memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerah dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

PT. SMB yang sepakat melakukan pembelian mengajukan permohonan SKBDN dengan fasilitas *non-cash loan* kepada issuing Banknya yaitu Bank Mandiri dengan mengajukan jaminan fidusia kepada Bank Mandiri berupa barang yang dibelinya namun masih dalam pengiriman yaitu komoditas kacang kedelai

¹⁸⁴ Amanita Novi. **Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri**. (online) (Staff.uny.ac.id). diakses 4 Agustus 2016 halaman. 164.

¹⁸⁵ Lihat Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

kuning tersebut yang terdapat pada kontrak antara PT. AAA dengan PT. SMB dan tercantum pada Konosemen yang dipegang oleh PT. AAA, dan PT. SMB telah mendapat fasilitas SKBDN dari PT. Bank Mandiri sejak tahun 2002 yaitu berdasarkan fasilitas *non-cash loan* no; KP. COD/007/PK. LC/2002 no.25 tanggal 18 Juni 2002 jo perubahan perjanjian *non-cash loan* no. KP.COD/018/PNCL/2006 yang minuta aktanya dibuat oleh notaris Desman. SH. M.Hum, MM notaris di Jakarta melalui akta No. 25 tanggal 14 Juli 2006 sampai dengan addendum V yaitu perpanjangan jangka waktu fasilitas *non-cash loan* No. TOP.CRO/CLA.200/ADD/ 2010 tanggal 24 Juni 2010, dan berdasarkan perjanjian *non-cash loan* beserta seluruh addendums, PT. SMB telah mendapat fasilitas *non-cash Loan* dari PT. Bank Mandiri hingga sejumlah Rp. 880.000.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh milyar rupiah), kemudian PT. SMB telah melakukan pembayaran kepada PT. AAA melalui prosedur mekanisme SKBDN yaitu harga kacang kedelai yang dibeli oleh PT. SMB telah dibayar dengan cara pengkreditan rekening atas nama PT. Alam Agri Adiperkasa pada Bank Central Asia melalui sarana transfer antar Bank, dan sebagaimana PT. AAA telah melakukan pengiriman atas kacang kedelai kuning tersebut ke gudang milik PT. SMB maupun gudang- gudang yang disewa oleh PT. SMB termasuk gudang KBS, Gudang KWT dan Gudang Permata di wilayah Cilegon yang berarti PT. SMB telah menguasai secara fisik kacang kedelai tersebut.

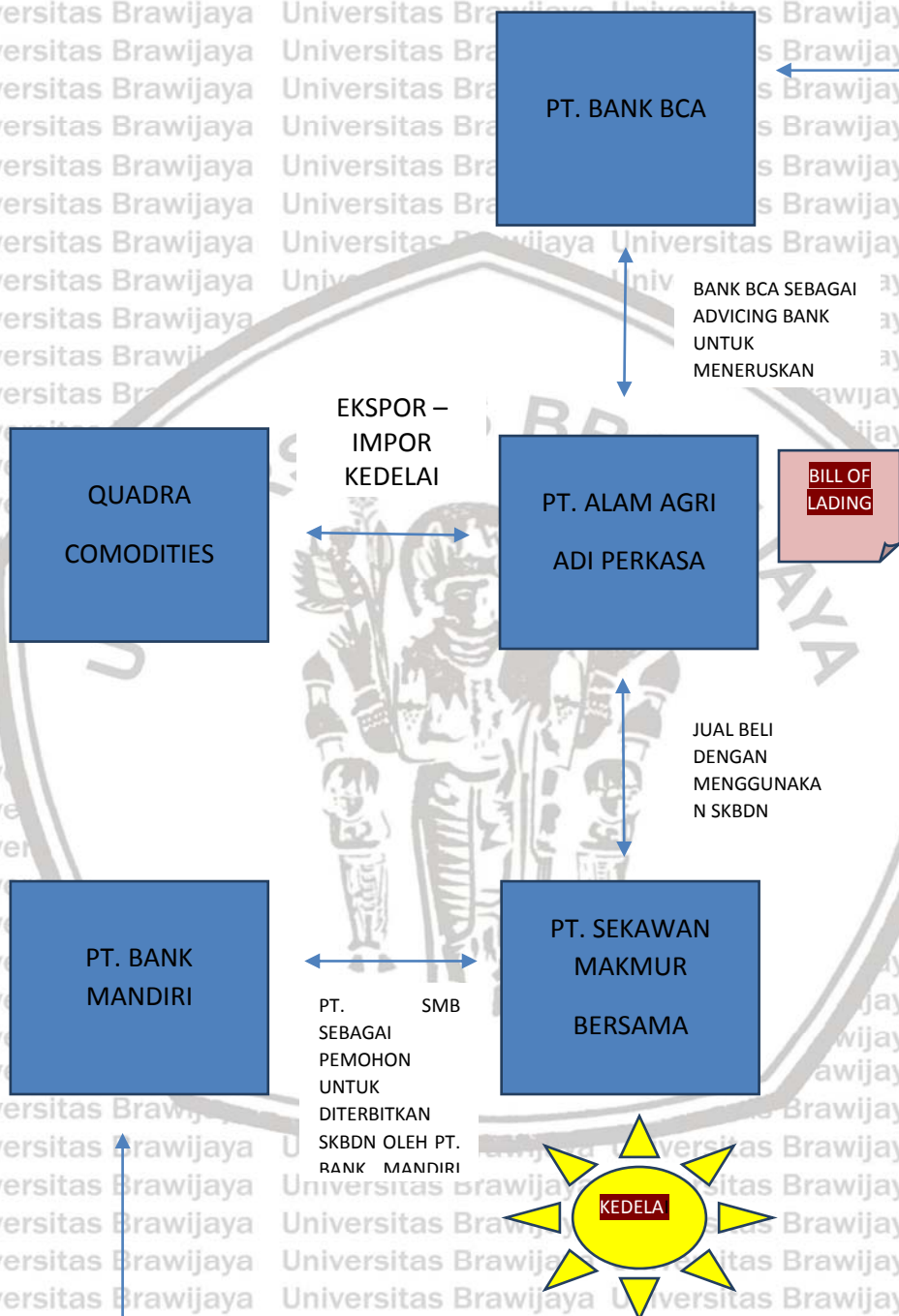
PT. SMB mengagunkan kacang kedelai yang telah dikuasainya secara fisik tersebut kepada PT. Bank Mandiri. Penyerahan kedelai tersebut sebagai agunan kredit kepada PT. Bank Mandiri adalah untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas *non-cash Loan* yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri

kepada PT. SMB, dan jaminan yang diberikan oleh PT. SMB kepada PT. Bank Mandiri telah diikat secara Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 25 Februari 2003 No. W7-002825 HT.04.06TH 2003/STD jo. Sertifikat jaminan Fidusia no. W7-1127.HT.04.07.TH.2007/P tanggal 29 Oktober 2007 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia no. W7-614.HT.04.07.TH.2008/P tanggal 9 Mei 2008 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia no. W7-797.HT.04.07.TH.2008/P tanggal 26 juni 2008 yang keseluruhannya telah didaftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dibawah ini telah disajikan alur kasus oleh penulis dalam bentuk bagan untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang alur nya dan para pihak yang bersengketa.



BAGAN 1. POSISI KASUS



Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2016.

Karena PT. Bank Mandiri merasa dirugikan akibat adanya perampasan sepihak yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap objek Fidusia nya dengan PT.

SMB maka Bank Mandiri mengajukan gugatan di Pengadilan.

Adapun bukti jual beli yang dilakukan antara PT. AAA dengan PT. SMB telah diakui oleh PT. AAA berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh PT. Bank Mandiri dalam gugatan yang terdiri dari:¹⁸⁶

- a) Faktur Penjualan No 004/Inv-smb/05/3a/10 tertanggal 10 Mei 2010 ;
- b) Faktur Penjualan No 005/Inv-smb/06/3a/10 tertanggal 01 Juni 2010 ;
- c) Faktur Penjualan No 007/Inv-smb/07/3a/10 tertanggal 29 Juli 2010 ;
- d) Faktur Penjualan No 008/Inv-smb/09/3a/10 tertanggal 02 September 2010
- e) Faktur Penjualan No 009/Inv-smb/10/3a/10 tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- f) Faktur Penjualan No 010/Inv-smb/11/3a/10 tertanggal 10 November 2010
- g) Faktur Penjualan No 011/Inv-smb/12/3a/10 tertanggal 02 Desember 2010

Vide Bukti TI-45C ;

- h) Faktur Penjualan No 001/Inv-smb/01/3a/11 tertanggal 07 Januari 2011 ;
- i) Faktur Penjualan No 002/Inv-smb/02/3a/11 tertanggal 31 Januari 2011

Vide Bukti TI-46E;

Bahwa berdasarkan kesepakatan telah dinyatakan oleh PT. AAA “Barang dikirim dari gudang PT. AAA ke gudang PT. SMB” hal tersebut dibuktikan

dengan adanya perintah pengiriman barang / *Delivery Order (DO)* yang dikeluarkan oleh PT. AAA yaitu antara lain:¹⁸⁷

- a) Delivery Order No 005/06/a3-smb/2010 tertanggal 01 Juni 2010 ;
- b) Delivery Order No 006/07/a3-smb/2010 tertanggal 30 Juni 2010 ;

¹⁸⁶ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PDT/2012/PT.BTN, halaman 11

¹⁸⁷ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PDT/2012/PT.BTN, halaman 12

- c) Delivery Order No 007/07/a3-smb/2010 tertanggal 29 Juli 2010 ;
 - d) Delivery Order No 008/09/a3-smb/2010 tertanggal 02 September 2010 ;
 - e) Delivery Order No 009/10/a3-smb/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 ;
 - f) Delivery Order No 010/11/a3-smb/2010 tertanggal 10 November 2010 ;
 - g) Delivery Order No 011/12/a3-smb/2010 tertanggal 02 Desember 2010
- Vide Bukti TI-45B ;
- h) Delivery Order No 001/01/a3-smb/2011 tertanggal 07 Januari 2011 ;
 - i) Delivery Order No 002/02/a3-smb/2011 tertanggal 31 Januari 2011 Vide Bukti TI- 46D ;

Dan hal tersebut yang digunakan oleh PT. Bank Mandiri dalam gugatan sebagai bukti telah terjadinya penyerahan barang dari PT. AAA sebagai penjual kepada PT. SMB sebagai pembeli, adapun bukti- bukti lain, sebagai bukti bahwa Kacang Kedelai yang dibeli oleh PT. SMB dari PT. AAA telah berada di dalam gudang milik PT. SMB maupun gudang yang disewa oleh PT. SMB, PT. Bank Mandiri juga melampirkan:¹⁸⁸

- a) Akta Sewa Menyewa No 10 Tanggal 09 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris David, S.H., Notaris di Jakarta
- b) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Tertanggal 31 Desember 2010 ;
- c) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Siani Setiawaty Goenadi, SH, Notaris di Tangerang Selatan
- d) Perjanjian Penitipan dan Penyimpanan Bahan Baku Makanan No. 15/SJ/IV/2011 tertanggal 10 Maret 2011 ;

¹⁸⁸ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PDT/2012/PT.BTN. halaman 13

Dalam gugatan yang diajukan PT. Bank Mandiri disebutkan beberapa pasal yang tertuang dalam Akta Perubahan Perjanjian Fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) nomor 25 yaitu Pasal 17 ayat 1 yang mengatur:¹⁸⁹

“Menyimpang dari jangka waktu kredit yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 perjanjian ini, Bank dapat menuntut dan menagih pembayaran dari pembayaran seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur berdasarkan akta perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus dan tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi apabila terjadi salah satu atau lebih peristiwa kelalaian sebagaimana tersebut di bawah ini.”

Pasal 17 Ayat 1 A ;

“Apabila debitur berhenti menjalankan usahanya atau jika izin usahanya dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang atau...” ;

Pasal 17 Ayat 1 B ;

“Apabila debitur menanggguhkan untuk sementara usahanya jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, atau debitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga, atau...” ;

Menurut gugatan yang diajukan PT. Bank Mandiri disebutkan bahwa debitur (PT. SMB) telah memenuhi ketentuan mengenai kejadian kelalaian dengan alasan PT. SMB telah menginformasikan adanya permasalahan dalam kegiatan usahanya, dimana stok dagang berupa kacang kedelai yang juga yang

¹⁸⁹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PDT/2012/PT.BTN. halaman 8

juga menjadi agunan pada Pembanding atas fasilitas *Non-Cash Loan* yang diterima oleh PT. SMB, telah dijarah oleh pihak ketiga. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terhentinya kemampuan PT. SMB untuk melakukan distribusi/ penjualan kacang kedelai dan/ atau pemenuhan kewajiban pembayaran kembali fasilitas *non-cash Loan* yang telah diterima oleh PT. SMB dari PT. Bank Mandiri, terhadap penjarahan atas barang/ stok kacang kedelai milik PT. SMB oleh pihak ketiga, yang juga merupakan barang agunan kredit PT. Bank Mandiri terkait dengan fasilitas kepada PT. SMB, PT. Bank Mandiri juga telah membuat laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

PT. Bank Mandiri telah menyampaikan surat kepada PT. SMB yang menyatakan hutang telah jatuh tempo tertanggal 31 Maret 2011 perihal kejadian kelalaian, dan karena PT. SMB tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap PT. Bank Mandiri hingga batas waktu yang ditentukan maka PT. Bank Mandiri selaku kreditur selaku pemegang jaminan fidusia mengajukan permohonan eksekusi atas kacang kedelai yang diberikan oleh PT. SMB dalam gugatan yang terdapat pada putusan tersebut.

Mengenai Kacang Kedelai yang dijadikan sengketa dalam wilayah hukum putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015. Adalah sebagai berikut:

Barang komoditas tipe US No. 2 atau Kacang kedelai Kuning (Better Yellow Soybeans in Bulk) yang disimpan pada :

- a. Gudang PT. Krakatau Waja Tama (KWT), yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon-Banten, sebanyak 20,279,341.34 Kg

(dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram).

b. Gudang PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jl.

Mayjen. S. Parman KM 13, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) ; dan -----

c. Gudang Permata, yang terletak di Jl. Raya Cilegon KM 2,5,

Bojanegara, Cilegon, sebanyak 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram).

Mengenai Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Serang Nomor 33/Pdt.G/2011/PN/Srg. Yang diajukan banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 03/PDT/2012/PT.BTN. adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan I (PT. Bank Mandiri) dan Terlawan II (PT. Sekawan Makmur Bersama) ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Pelawan (Quadra Commodities SA) tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
- 3) Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang

Nomor: 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. Jo Nomor :

13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, tanggal 26 April 2011 ;

4) Menetapkan dan menyatakan bahwa Barang komoditas tipe US No. 2

atau Kacang kedelai Kuning (Better Yellow Soybeans in Bulk) yang
disimpan pada :

a) Gudang PT. Krakatau Waja Tama (KWT), yang terletak di Jl. Jend.
Sudirman, Cigading, Cilegon-Banten, sebanyak 20,279,341.34 Kg
(dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus
empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) ;

b) Gudang PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jl.
Mayjen. S. Parman KM 13, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak
3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus
sembilan puluh koma empat puluh kilogram) ; dan

c) Gudang Permata, yang terletak di Jl. Raya Cilegon KM 2,5,
Bojanegara, Cilegon, sebanyak 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus
lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh
kilogram) ;

Adalah sah milik pelawan.

1) Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh
terhadap putusan dalam perkara ini ;

2) Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat

kini ditetapkan sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

3) Menolak gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya ;

Dalam gugatan dan banding tersebut juga terjadi pembahasan mengenai keabsahan Konosemen yang dimiliki PT Alam Agri Adiperkasa sebagai bukti kepemilikan barang, sehingga PT AAA berhak menjual kacang kedelai tersebut kepada PT. SMB. Sedangkan pihak Quadra dalam eksepsinya mengakuimemberikanKonosemenkepada PT. AAA, Namun Konosementersebut hanya sebagai dokumen pengangkutan barang, diberikan kepada pembeli (PT AAA) agar pembeli dapat memenuhi kewajiban Bea dan kewajiban lain yang dipersyaratkan atas barang tersebut setibanya di pelabuhan tujuan. Dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Serang menolak gugatan PT. Bank Mandiri, berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.Srg. dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 3/PDT/2012/PT.BTN sama-sama menyatakan dalam akhir pertimbangannya, jika memang PT. SMB telah melakukan pembelian secara sah komoditi kacang kedelai tersebut terhadap PT. AAA, menandakan bahwa PT. SMB telah tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan jual beli sehingga telah membeli komoditas kacang kedelai tersebut dari pihak yang bukan pemilik demikian juga PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Dalam menerima jaminan fidusia telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah menerima barang yang bermasalah sebagai jaminan fidusia.¹⁹⁰

¹⁹⁰PutusanPengadilan Tinggi BantenNo. 3/PDT/2012/PT.BTN.BagianMenimbang ,
Halaman 25

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi Banten juga menyatakan sebagai berikut:¹⁹¹

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusan nya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut baik Dalam Eksepsi, Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan saksama semua hal dan dalil yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak dan semua bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari bukti - bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan telah terbukti bahwa barang Komoditas Kacang Kedelai Tipe US No. 2 atau Kacang Kedelai Kuning (Better Yellow Soybeans in Bulk) sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tanggal 26 April 2011 adalah milik Terbanding semula Pelawan (Quadra Commodities SA), sedangkan dari bukti - bukti yang diajukan oleh Para Pembanding (PT. Bank Mandiri dan PT. SMB) semula Terlawan I dan Terlawan II tidak terbukti bahwa barang Komoditas Kacang Kedelai tersebut adalah milik PT. Alam Agri Adiperkasa, karena PT. Alam Agri Adiperkasa belum

¹⁹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 3/PDT/2012/PT.BTN. Bagian Menimbang, Halaman 24-25

membayar harga Komoditas Kacang Kedelai tersebut kepada Terbanding semula Pelawan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang Komoditas Kacang Kedelai tersebut bukan milik PT. Alam Agri Adiperkasa, maka tidak dapat dibenarkan PT.

Alam Agri Adiperkasa menjual Komoditas Kacang Kedelai tersebut kepada Pembanding semula Terlawan II;

Menimbang, bahwa mengenai masalah sah tidaknya jual beli Komoditas Kacang Kedelai tersebut antara PT. Alam Agri Adiperkasa dengan Pembanding semula Terlawan II, hal tersebut adalah merupakan urusan Pembanding semula Terlawan II dengan PT. Alam Agri Adiperkasa dan tidak ada hubungannya dengan Terbanding semula Pelawan ;

Menimbang, bahwa seandainya benar Pembanding semula Terlawan II telah membeli Komoditas Kacang Kedelai tersebut secara sah dari PT. Alam Agri Adiperkasa, menandakan bahwa Pembanding semula Terlawan II telah tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan jual beli sehingga telah membeli Komoditas Kacang Kedelai tersebut dari pihak yang bukan pemilik, demikian juga Pembanding semula Terlawan I dalam menerima jaminan fidusia telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah menerima barang yang bermasalah sebagai jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November 2011 Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Terlawan I dan Terlawan II tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Terlawan I dan Terlawan II harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Hakim Pengadilan Tinggi Banten juga memutuskan perkara sebagai berikut:¹⁹²

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Terlawan I dan Terlawan II**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November 2011 Nomor:33/Pdt.G/2011/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum **Para Pembanding** semula **Terlawan I dan Terlawan II** untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi dalam Putusan Pengadilan Banten nomor 3/PDT/2012/PT.BTN. yang isinya adalah menguatkan pertimbangan dan putusan pengadilan negeri Serang Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Srg. yang isinya menghasilkan putusan sita eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tertanggal 26 april 2011 yang dimenangkan oleh Quadra Commodities SA atas sengketa Kacang kedelai dimana kewajiban pihak yang kalah (PT. Bank Mandiri dan PT. SMB) adalah membayar ongkos perkara tersebut dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding pada penelitian ini diketahui sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

¹⁹²Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 3/PDT/2012/PT.BTN. Bagian Mengadili. Halaman 26.

ribu rupiah). Hal tersebut di tingkat kasasi juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor dengan Amar Putusan “Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi 1. PT. Sekawan Makmur Bersama, dan 2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.,”¹⁹³

Sedangkan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 menyatakan sebagai berikut:

1. Alasan putusan Jdex Juris terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, karena, Bahwa dalam pertimbangan putusan Jdex Juris pada pokoknya menyatakan:

- PT Alam Agri Adiperkasa (pembeli) belum membayar lunas objek sengketa (kedelai) kepada Quadra Commodities SA (penjual).
- PT Alam Agri Adiperkasa tidak berhak menjual objek sengketa kepada PT Sekawan Makmur Bersama (Turut Termohon Peninjauan Kembali).
- Walaupun PT Sekawan Makmur Bersama (Turut Termohon Peninjauan Kembali) telah membayar lunas kepada PT Alam Agri Adiperkasa namun tidak serta merta objek sengketa menjadi milik PT Sekawan Makmur Bersama (Turu Termohon Peninjauan Kembali);

Selanjutnya pertimbangan putusan Jdex Juris dalam putusan kasasi halaman 69 sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Sale of Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 Agustus 2010 (Bukti P-1) serta terjemahan resminya (Bukti P-1a) telah terjadi

¹⁹³<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01eec5c387dab6a9ec48ff48b1058e4c>, Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012, online, diakses pada hari Selasa 04-10-2016

perjanjian jual beli kacang kedelai curah antara Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai penjual dengan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli, dan dalam Pasal 18 perjanjian tersebut ditentukan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli harus membayar harga kacang kedelai berikut pajak-pajak dan ongkos-ongkos dan bunga kepada Quadra Commodities SA (Pelawan) dan apabila PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka kacang kedelai yang dijual tetap menjadi property Pelawan”;

“Bahwa oleh karena PT Alam Agri Adiperkasa ternyata belum membayar harga kacang kedelai tersebut maka kacang kedelai yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo masih menjadi milik Pelawan, sehingga PT Alam Agri Adiperkasa tidak berhak untuk menjual kacang kedelai (objeksengketa) kepada Terlawan II, sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan dengan alasan objek sengketa dijadikan jaminan fidusia oleh Terlawan II selaku debitur kepada Terlawan I selaku kreditur”

“Bahwa walaupun Terlawan I telah membayar harga kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual tidak serta merta kacang kedelai menjadi milik Terlawan II, karena PT Alam Agri Adiperkasa bukan sebagai pemilik kacang kedelai objek sengketa, sedangkan atas pembayaran yang telah diterima PT Alam Agri Adiperkasa menjadi tanggung jawab PT Alam Agri Adiperkasa”

2. Bahwa pertimbangan putusan Judex Juris di atas jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena:

a. Pertimbangan putusan Judex Juris hanya semata-mata didasarkan pada bukti fotocopy dari fotocopy saja tanpa ada bukti aslinya dan tanpa didukung oleh alat bukti lain

1) Bahwa pertimbangan putusan Judex Juris yang menyatakan PT Alam Agri Adiperkasa (pembeli) belum membayar lunas objek sengketa (kedelai) kepada Quadra Commodities SA (Termohon Peninjauan Kembali) selaku penjual adalah mendasarkan pada

Pasal 18 sale contract antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa dimana dokumen sale contract yang dijadikan bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali yang bertanda P-1 tersebut hanyalah fotocopy dari fotocopy.

Bahwa atas dokumen sale contract Bukti P-1 tersebut asli buktinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Bukti P-1 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali karena tanpa ada bukti asli dan tidak didukung oleh alat bukti lain (mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan saksama Bukti P-1).

Demikian pula Bukti Amendment Nomor 1 Sale Contract Nomor PQD 1008016, date 28 Agustus 2010 (Bukti P-2) juga tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ditandatangani oleh PT Alam Agri Adiperkasa dan tidak ada bukti terjemahan resminya sehingga harus dikesampingkan (mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan saksama Bukti P-2).

Bahwa bukti asli yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan

Kembali hanyalah Bukti P-1a yang merupakan terjemahan dari

Bukti P-1;

- 2) Bahwa hanya dengan berdasarkan pada bukti foto copy dan tidak ada aslinya maka pertimbangan putusan Judex Juris tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena telah melanggar hukum pembuktian, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek peradilan (yurisprudensi), yaitu:

- b) Kutipan Pasal 1888 KUHPerdara;

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya yaitu apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar- ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan- salinan beserta ikhtisar- ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKANNYA.”

- c) Yurisprudensi-yurisprudensi yang dimaksud di atas adalah:

- (1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 7011

K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyebutkan

“Putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah karena surat bukti fotokopi-fotokopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian Judex Facti telah

memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”

(2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609

K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyebutkan

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

b. Pertimbangan putusan Judex Juris yang menyatakan jual beli objek

sengketa belum lunas tanpa didasarkan pada alat bukti dari PT Alam

Agri Adiperkasa selaku pihak pembeli objek sengketa adalah salah,

dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1) Bahwa untuk menyatakan lunas/ tidaknya pembayaran dalam jual

beli kedelai objek sengketa oleh PT Alam Agri Adiperkasa selaku

pembeli, kepada Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali), selaku

penjual, mutlak harus ada bukti dari pihak pembeli dalam hal ini PT

Alam Agri Adiperkasa.

2) Bahwa bukti lunas atau tidaknya pembayaran barang objek jual beli

dalam hal ini kedelai mutlak harus ada bukti dari pihak pembeli

dalam hal ini PT Alam Agri Adiperkasa adalah sesuai dengan asas

objektivitas dan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram*

partem), yang mengharuskan pengadilan (Hakim) dalam mengadili

dan memutus perkara secara objektif dan mendengar pihak-pihak

yang terkait. Pengadilan (Hakim) tidak dibenarkan menerima

keterangan ataupun bukti dari salah satu pihak sebagai hal yang

benar. Dalam perkara perlawanan *a quo* bukti dari pihak pembeli kedelai dalam hal ini PT Alam Agri Adiperkasa mutlak harus ada, sedangkan dalam perkara *a quo* bukti tersebut sama sekali tidak ada, bahkan dalam perkara *a quo* PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli kedelai objek sengketa tidak diikutkan sebagai pihak atau tidak ditarik sebagai pihak.

3) Bahwa *Judex Juris* dalam membuktikan bahwa PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli kedelai objek sengketa belum membayar lunas harga kedelai kepada Quadra Commodities SA (Pelawan/ Termohon Peninjauan Kembali) hanya semata-mata mendasarkan pada bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang berupa dokumen Sale Contract Nomor 1008016 date 26 August 2010 (Bukti P-1) dan bukti itu jelas hanya fotocopy dari fotocopy dan tidak ada bukti aslinya serta tidak ada bukti dari PT Alam Agri Adiperkasa selaku pihak pembeli kedelai objek sengketa. Atas dasar fakta hukum di atas jelas tidak dapat dibuktikan secara objektif belum lunasnya pembayaran kedelai oleh PT Alam Agri Adiperkasa selaku pembeli kepada Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali) selaku penjual.

4) Bahwa dengan beranggapan bahwa pembayaran kedelai objek sengketa oleh PT Alam Agri Adiperkasa terbukti belum lunas, tanpa ada bukti dari PT Alam Agri Adiperkasa, maka *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata.

Demikian selanjutnya hingga:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan dua alasan dalam memori peninjauan kembali yaitu:

1. Adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* (kasasi).
2. Adanya dua putusan yang bertentangan yaitu antara Putusan Nomor 2206K/Pdt/2012 dengan Putusan Nomor 461 K/Pdt/2012;

Pelawan dalam gugatannya menyatakan bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini karena mempunyai kepentingan yaitu Pelawan sebagai pemilik barang berupa komoditas kacang kedelai tipe US Nomor 2 yang disimpan di gudang dengan adanya penetapan sita eksekusi Pelawan sebagai pemilik barang tersebut berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa yang sampai diajukan gugatan belum melakukan pembayaran/pelunasan atas komoditas milik Pelawan sehingga masih menjadi milik Pelawan dan tidak pernah dialihkan/dijaminkan pada Para Terlawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah benar PT Alam Agri Adiperkasa belum melunasi pembayaran barang tersebut seharusnya PT Alam Agri Adiperkasa tersebut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini agar diketahui secara utuh duduk persoalan dalam perkara ini sehingga perlawanan Pelawan dalam perkara ini kurang pihak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sehingga karenanya putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206 K/Pdt/2012 tanggal 22 Mei 2013 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206 K/Pdt/2012, tanggal 22 Mei 2013;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkerklaard*);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbedaan dari kedua putusan yang bertentangan tersebut yaitu Putusan Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Nomor 319 PK/Pdt 2015 menimbulkan Ketidakpastian hukum. Untuk itu akan dibahas penyelesaiannya dengan menganalisis menggunakan teori konflik hukum dan diselesaikan dengan asas-asas penyelesaian konflik antar sumber hukum.

4.1.2 Kepemilikan Barang Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Menurut KUHPerdata melalui Perjanjian jual beli

Menurut KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian jual – beli dari status kepemilikan barang bergerak. Seperti Kacang Kedelai yang disengketakan dalam putusan tersebut merupakan benda bergerak, yakni sesuai dengan pasal 509 KUHPerdata tentang benda bergerak yang menyebutkan “Barang bergerak adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”.¹⁹⁴

Telah terjadi penyerahan barang yang dilakukan oleh PT. AAA kepada PT. SMB. Berdasarkan bukti faktur penjualan serta perintah pengiriman *Delivery Order (DO)* yang dikeluarkan oleh PT. AAA kepada PT. SMB yang berarti barang tersebut telah dikuasai dan dibayar oleh PT. SMB, menurut KUHPerdata status kepemilikan barang tersebut telah diserahkan oleh PT. AAA sebagai penjual kepada PT. SMB sebagai pembeli yang berarti status Hak milik tersebut telah menjadi milik PT. SMB sesuai pasal 612 KUHPerdata yang menyebutkan “Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan kunci-kunci bangunan yang tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.¹⁹⁵ Ekspor – Impor antara

Quadra Commodities dengan PT. Alam Agri Adiperkasa dan jual – beli yang dilakukan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa dengan PT. Sekawan Makmur Bersama terlihat tidak ada kecacatan, adapun mengenai dipenuhi atau tidaknya itikad baik

¹⁹⁴ Lihat Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁹⁵ Lihat Pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

oleh PT. Alam Agri Adiperkasa sebagai Importir dan sebagai Penjual, hal tersebut terlampir dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 3/PDT/2012/PT.BTN jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2206 K/Pdt/2012 yang disebutkan oleh hakim di bagian menimbang yang secara jelas mengakui berdasarkan bukti- bukti yang ditunjukkan memang PT. Sekawan Makmur Bersama telah melakukan pelunasan kepada PT. Alam Agri Adiperkasa, namun PT. Alam Agri Adiperkasa belum membayar lunas kepada Quadra Commodities SA, dan PT. SMB dalam melakukan pembelian serta PT. Bank Mandiri sebagai penjamin fidusia, telah membeli kepada pihak yang salah karena membeli kepada yang bukan pemilik, disebabkan PT. AAA belum sah sebagai pemilik jika belum melakukan pelunasan sebelum melakukan pelunasan terhadap Quadra, namun penulis melihat dalam kasus tersebut yang lalai adalah Quadra sebagai Eksportir, karena berdasarkan bukti- bukti yang diakui oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten di bagian pertimbangan, beberapa bukti tersebut adalah bukti telah dilakukannya pelunasan PT. SMB sebagai Pembeli terhadap PT. AAA sebagai penjual dan bukti faktur penjualan serta bukti surat perintah pengiriman barang (*Delivery Order*) yang dikeluarkan oleh PT. AAA sebagai bukti adanya penyerahan barang dari gudang PT. AAA ke gudang PT. SMB yang berarti sebagai penjual PT. AAA telah mendapat penyerahan barang dari Quadra meskipun PT. AAA belum melakukan pelunasan, sehingga berdasarkan bukti – bukti tersebut status hak milik kebendaan berada pada PT. SMB yang menguasai barang, Peralihan Hak milik antara Quadra kepada PT.AAA dan antara PT. AAA dengan PT. SMB telah terjadi, dimana dapat dilihat secara yuridis bahwa jual beli merupakan perjanjian konsensual melalui rumusan Pasal 1458 KUHPerdota yang menyebutkan “Jual beli itu

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan, maupun harga belum dibayar”¹⁹⁶ sedangkan perjanjian ekspor-impor yang dilakukan antara Quadra dengan PT.AAA dan perjanjian jual beli antara PT. AAA dengan PT. SMB adalah perjanjian yang terpisah dimana perjanjian tersebut hanya mengikat terhadap pihak yang melakukannya saja menurut asas kepribadian (*Personality*) yang mengartikan isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain diluar kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.¹⁹⁷ Hal tersebut diperkuat dengan aturan pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Penggunaan Konosemen oleh Importir dalam Kitab Undang-undang Hukum

Dagang dan Kaitannya dengan Asas Itikad Baik dalam KUHPerdata:

Menurut gugatan yang terlampir dalam kedua Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan yaitu di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, telah ditemukan fakta-fakta yang menyatakan bahwa telah terjadi jual beli antara PT.

¹⁹⁶Lihat Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁹⁷Legal Akses, **Asas-asas Perjanjian** (online), <http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>. Diakses pada senin 9 Agustus 2016.

Sekawan Makmur Bersama sebagai pembeli dengan PT. Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual. Dan PT. Alam Agri Adiperkasa Sebagai Importir atas Komoditas

Kacang Kedelai yang diekspor oleh Quadra Commodities SA. Dasar pembelian yang digunakan PT. SMB untuk membeli kacang kedelai tersebut dari PT. AAA adalah karena PT. AAA sebagai pemegang konosemen atau *Bill of Lading (B/L)* atas komoditi tersebut yang diakui oleh pihak Quadra dalam putusan tersebut dimana sebagai pemegang konosemen PT. AAA adalah sebagai pihak yang berhak memiliki atau menerima komoditas tersebut dari pengangkut berdasarkan konosemen yang dimilikinya, dan diperkuat berdasarkan pendapat ahli yang menyebutkan bahwa fungsi konosemen adalah sebagai berikut.¹⁹⁸

- 1) Tanda terima penyerahan barang (*receipt of goods*). Konosemen menyebutkan tentang jumlah (kuantitatif) koli barang, berat barang, kualitas dan lainnya.
- 2) Kontrak penyerahan barang (*contract of delivery*) Kontrak penyerahan barang tersebut adalah antara pemilik barang atau pengguna jasa (*shipper*) dan perusahaan pelayaran; yang mana perusahaan pelayaran berjanji akan membawa barang dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak.
- 3) Bukti kepemilikan barang (*document of title atau title of document*) Konosemen memberikan legitimasi atas kepemilikan barang.
- 4) Perlindungan atas barang yang diangkut. Konosemen merupakan jaminan terhadap barang-barang yang diangkut, karena mengikat 3

¹⁹⁸Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, 2013, **Hukum Surat Berharga Pasar Uang**, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 132.

pihak yaitu pihak pengangkut, pengirim barang, penerima barang, praktis barang akan terlindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan.

- 5) Kuitansi (bukti pembayaran) uang tambang. Pada dasarnya konosemen diterbitkan setelah biaya pengangkutan atau pengiriman barang dibayar, tapi dalam realisasinya terdapat minimal 2 syarat pembayaran utang tambang atau biaya pengiriman barang, yaitu pembayaran dimuka dan pembayaran kemudian atau di pelabuhan tujuan. Sesuai dengan ketentuan dibidang pelayaran, biaya pengiriman atau pengangkutan barang ditetapkan berdasarkan jenis barang, sarana yang digunakan, atau sifat barang yang akan diangkut.
- 6) Tanda bukti lawan. Konosemen adalah satu-satunya dokumen sah atas kepemilikan pengiriman suatu partai barang. Artinya, jika seseorang mengakui kepemilikan suatu barang tanpa memperlihatkan konosemen, maka yang bersangkutan akan ditolak untuk menguasai barang yang diakuinya itu.

Pihak-pihak yang terlibat dalam konosemen adalah Penerbit, dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nakhoda kapal, Pihak penerima atau penggantinya. Penerima, sebagaimana dimaksud di atas, dapat:

- a) Orang yang namanya ditunjuk dalam konosemen;
- b) Kepada orang penggantinya pengirim atau kepada orang yang ditunjuk oleh pengirim (kepada pengganti);
- c) Kepada orang penggantinya pihak ketiga atau kepada orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga (kepada pengganti);

d) Kepada orang yang namanya disebut dalam konosemen atau pembawa (kepada pembawa);

e) Kepada orang yang membawa surat konosemen itu (kepada pembawa).

Jenis- jenis *Bill of Lading* atau Konosemen:¹⁹⁹

1) Berdasarkan Penerimaannya:

a) Konosemen atas pembawa (*aan tonder*), yaitu konosemen yang tidak mencantumkan nama penerima secara khusus dan hanya menyebutkan

“kepada pembawa”. Artinya pengangkut harus menyerahkan barang muatan kepada pembawa konosemen tersebut. Konosemen ini dapat dialihkan hanya dengan menyerahkan (*levering*).

b) Konosemen atas pengganti (*aan order*), yaitu konosemen yang menyebutkan nama penerima akan tetapi memuat keterangan “atau kepada pengganti”. Pengganti yang dimaksud adalah pengganti dari pihak yang namanya telah tercantum dalam konosemen tersebut. Konosemen jenis ini dialihkan dengan cara endorsemen.

c) Konosemen atas nama (*oop naam*), yaitu konosemen yang dicantumkan nama dari penerima, dan hanya penerima yang tercantum itulah yang berhak atas barang muatan. Konosemen jenis ini disebut juga sebagai Konosemen Rekta yang pengalihannya dengan menggunakan akta *cessie*.

2) Berdasarkan saat penerbitannya (sehubungan dengan penyerahan muatan dari pengirim kepada pengangkut):

¹⁹⁹ Abdul Rahim Arifin, 2009, *Konosemen sebagai Obyek Jaminan Gadai dan Fidusia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, halaman 132.

a) Konosemen diterima untuk dikapalkan (*to be shipped Bill of Lading*), yaitu konosemen yang diterbitkan oleh pengangkut saat barang diterima oleh pengangkut namun belum dikapalkan.

b) Konosemen dikapalkan (*shipped Bill of Lading*), yaitu konosemen yang diterbitkan setelah barang dimuat dalam kapal.

3) Berdasarkan keadaan muatan:

a) Konosemen bersih (*clean Bill of Lading*), yaitu konosemen yang tidak terdapat catatan kerusakan barang, kekurangan jumlah, atau ketidaksesuaian barang lainnya.

b) Konosemen kotor (*foul Bill of Lading*), yaitu konosemen yang terdapat catatan kerusakan barang, kekurangan jumlah, atau ketidaksesuaian barang lainnya.

4) Berdasarkan kebiasaan memperdagangkannya (*negotiability*):

a) Konosemen yang dapat diperdagangkan (*negotiable Bill of Lading*)

b) Konosemen yang tidak dapat diperdagangkan (*straight Bill of Lading*)

5) Berdasarkan pelabuhan tujuan:

a) *Domestic Bill of Lading*, yaitu konosemen yang digunakan untuk pengangkutan dalam negeri

b) *Direct Bill of Lading*, yaitu konosemen yang dikeluarkan untuk pengangkutan luar negeri atau barang-barang ekspor.

c) *Combined Transport Bill of Lading*, yaitu konosemen yang dikeluarkan ketika terjadi pengangkutan gabungan dari tempat

penerimaan hingga penyerahan barang, misalnya gabungan antara pengangkutan darat dan kapal laut.

Klausul yang Terdapat dalam Bill of Lading atau konosemen ada dua klausul yang terkait dengan penerbitannya yaitu sebagai berikut:²⁰⁰

1. Klausul Kasatoria (*Cassatoria Clause*), adalah klausul yang memberikan pengertian bahwa setiap lembar konosemen yang diterbitkan dapat berlaku sebagai lembar yang dapat digunakan sebagai tanda terima barang, sehingga tidak ada pemisahan fungsi lembar asli maupun duplikat. Akan tetapi jika salah satu lembar telah digunakan maka lembaran lainnya menjadi tidak berfungsi sebagai tanda terima barang. Lazimnya klausul ini dicetak dengan huruf berwarna merah (*bold*) yang dikenal dengan red clause, “Dengan diterimanya Konosemen pengirim, penerima dan pemilik barang menyetujui dan mengikat untuk semua pernyataan, pengecualian dan syarat-syarat baik yang tertulis, dicetak distempel di belakang atau dimuka halaman ini, dikecualikan peraturan-peraturan bea dan cukai atau yang diutamakan lainnya.

2. Klausul Paramount (*Paramount Clause*) adalah klausul yang memberikan perlindungan kepada pihak pengirim barang (*shipper*) berkenaan dalam proses angkutan melalui laut. Perlindungan dimaksud terkait dengan hal-hal yang terjadi atas barang-barang atau angkutan yang jika ternyata dikemudian hari, misalnya rusak dalam proses muat dan bongkar, atau hilang karena proses perjalanan yang tidak baik dan

²⁰⁰ Sufirman Rahman, *Ibid.*, halaman 183 - 184.

lain sebagainya tidak menjadi tanggung jawab pihak pengangkut.

Artinya pihak pengirim (*shipper*) dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud, jika terjadi diluar perbuatan disengaja.

3. Hak yang melekat pada konosemen sebagaimana diatur dalam pasal 506 KUHD yaitu sebagai orang yang atas barang yang disebutkan dalam konosomen tersebut. Dan sebagaimana yang diatur dalam pasal 506 ayat (2) KUHD adalah hak untuk mengalihkannya sebagaimana hak pengalihan atas benda bergerak. Hak terhadap dipenuhinya

perjanjian pengangkutan sebagaimana tercantum dalam pasal 468 ayat

(1) “KUHD yaitu keselamatan barang yang diangkut dari saat penyerahan hingga penerimaannya yang dijanjikan oleh pengangkut.”

Hak atas penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam pasal 510

KUHD sebagai orang yang berhak menuntut suatu penyerahan barang di pelabuhan kepada pengangkut yang kapalnya memuat barang pemegang konosemen tersebut.

Analisa penulis mengenai transaksi awal yang dilakukan oleh Quadra

Commodities SA dalam putusan, sama sekali tidak disebut jenis perjanjian jual

beli dengan metode apa yang dilakukan antara Quadra dengan PT. AAA, namun

dari gugatan telah dibuktikan jika PT. AAA adalah sebagai pemegang konosemen

(*B/L*) yang menggunakan *B/L* tersebut untuk melakukan perjanjian baru tentang

jual beli kepada PT. SMB tanpa mengalihkan *B/L* tersebut, dan juga telah terjadi

levering atau penyerahan barang yang dilakukan oleh PT. AAA ke gudang PT.

SMB setelah PT. SMB melakukan pelunasan kepada PT. AAA yang berarti PT.

AAA telah mendapat penyerahan atas kacang kedelai tersebut dari pengangkut

meskipun PT. AAA belum melakukan pelunasan terhadap Quadra, yang berarti PT. AAA saat melakukan jual beli barang kepada PT. SMB, sama sekali tidak melanggar aturan 506 – 517 KUHD tentang Konosemen dan cara pengalihannya, karena yang dialihkan oleh PT. AAA adalah barangnya saat PT. AAA telah menerima barang tersebut, dan bukan konosemennya yang dialihkan. Namun bagi penulis yang wajib bertanggungjawab dalam kasus ini adalah PT. AAA terhadap Quadra akibat wanprestasi karena tidak dilakukannya pelunasan kepada Quadra disebabkan telah menjual barang tersebut kepada SMB, serta barang yang sudah dijual terhadap PT. SMB, Quadra tidak memiliki hak lagi atas barang tersebut karena Quadra tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. SMB namun Quadra tetap berhak menuntut ganti rugi kepada PT. AAA yang telah melakukan wanprestasi.

Untuk melakukan pembayaran, PT. Sekawan Makmur Bersama menggunakan mekanisme transaksi jual beli dengan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang bersumber dari fasilitas *non-cash loan* dari PT. Bank Mandiri dengan memberikan jaminan fidusia terhadap kacang kedelai yang dibeli secara sah dan berdasar hukum dari PT. Alam Agri Adiperkasa.

Dalam Kitab Undang- undang hukum dagang telah diatur tentang jenis-jenis konosemen (*B/L*) dan bagaimana cara pengalihannya, dengan menunjukkan Konosemen sebagai bukti kepemilikan untuk penjualan yang akhirnya barang tersebut digunakan oleh pembeli sebagai Jaminan fidusia, lalu PT. AAA melakukan serah terima sendiri objek jual-beli, maka bisa dipastikan dalam jual beli komoditas kacang kedelai antara PT. AAA dengan PT. SMB sekaligus penjaminan fidusia komoditas kacang kedelai impor yang akan diterima antara

PT. SMB dengan PT. Bank Mandiri tidak ada peralihan Konosemen yang dilakukan oleh PT. AAA sehingga PT. AAA masih bisa mengambil sendiri barang yang diimpornya sekaligus melakukan serah terima barang di gudang milik PT. SMB, padahal pada saat dilakukan jual beli barang tersebut belum sampai dan masih terikat dengan *B/L* yang mana dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai *Bill of Lading* atau Konosemen jenis dan peralihannya diatur sebagai berikut:

“konosemen adalah surat yang bertanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan.”²⁰¹ Dalam alinea kedua pasal 506 KUHD disebutkan bahwa konosemen dapat diterbitkan secara atas nama (*Op naam*), atas pembawa (*ann tonder*) dan atas pengganti (*aan order*). Konosemen dapat dicirikan sebagai surat berharga karena kemudahannya untuk dialihkan, selain itu Pasal 507 KUHD dijelaskan jika konosemen dikeluarkan dua lembar yang dapat diperjualbelikan.

Namun penulis juga mengamati jika Pasal-pasal yang mengatur tentang konosemen tersebut diatur dalam KUHD Bab VA tentang Pengangkutan Barang-barang sehingga konteksnya adalah pengangkutan, dan fungsi konosemen sebagai bukti kepemilikan barang tersebut hanya berlaku jika ditunjukkan oleh pemegang konosemen kepada pengangkut. Oleh karena itu, PT. AAA sebagai Importir dan Sebagai penjual Barang telah menggunakan lembar konosemen yang dipegangnya

²⁰¹ Lihat Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

melebihi atau melampaui konteksnya, sehingga PT. AAA bisa dikategorikan sebagai pihak yang tidak memenuhi Itikad Baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai importir karena menjual muatan kacang kedelai yang belum dilunasi tersebut tanpa memberitahukan pihak Eksportir, tetapi tidak salah jika PT. AAA dan PT. SMB melakukan jual beli barang yang disebutkan dalam Konosemen yang dimiliki oleh PT. AAA, karena PT. SMB sebagai pembeli yang beritikad baik, wajar jika PT. SMB menganggap konosemen yang dimiliki oleh PT. AAA adalah bukti kepemilikan barang terlepas dari barang yang terdapat dalam konosemen tersebut oleh PT. AAA sudah dibayar atau tidak, karena itu adalah kontrak tersendiri yang dilakukan antara Quadra dengan PT. AAA dan yang dijual adalah barang bergerak. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli dalam materi hukum dagang, karena Konosemen memiliki sifat kebendaan (*droit de suit*) dimana setiap pemegang lembar konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang disebutkan di dalam konosemen tersebut di pelabuhan manapun barangnya berada.²⁰² Sesuai dengan pasal tersebut, maka penulis berpendapat jika PT. AAA yang awalnya sebagai pemegang Konosemen dan kemudian juga menguasai barang tersebut secara fisik, adalah penjual yang sah dan berhak untuk melakukan jual beli atas barang yang diimpornya dengan pihak lain.

Mengenai itikad baik dalam perjanjian antara PT. AAA dengan PT. SMB maupun perjanjian antara PT. AAA dengan Quadra, menurut analisa penulis tidak ada unsur kecacatan, karena PT. AAA menjual barang kepada PT. SMB sebelum barang yang diekspor Quadra sampai pada PT. AAA dan pembayaran serta serah terima barang oleh PT. SMB dan PT. AAA telah dilakukan sebelum jatuh tempo

²⁰² H.M.N Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jakarta, Djambatan, halaman 209

pelunasan yang harus dilakukan oleh PT. AAA terhadap Quadra, sehingga terkait dalam tuntutan penarikan kembali barang yang sudah dialihkan oleh PT. AAA ke gudang PT. SMB adalah wanprestasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh PT. AAA terhadap Quadra dan seharusnya PT. SMB sebagai pembeli yang jujur patut dilindungi dalam kasus ini.

Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa permasalahan dalam kajian itikad baik salah satunya adalah maknanya yang abstrak. Terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna maupun arti itikad baik.²⁰³ Bahkan James Gordley menyatakan dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.²⁰⁴ Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.²⁰⁵

Terminologi pemegang barang (bezitter) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli

²⁰³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003. Jakarta; Halaman 129.

²⁰⁴ Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker. *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge University Press 2000. Halaman 93.

²⁰⁵ Ridwan Khairandy, *Ibid*. Halaman 74.

dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam kajian ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.²⁰⁶

Dalam konsep yang hampir sama, Wirjono Prodjodikoro memahami itikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai itikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat - syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini harus dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.²⁰⁷ Pada akhirnya, penulis berpendapat jika asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam hubungan hukum diantara para pihak, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi, dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur patut merasakan kerugian akibat ketidakjujuran tersebut.

Analisa penulis menurut KUHPdata pada Kasus ini adalah jual beli serta peralihan komoditi kacang kedelai antara PT. AAA sebagai importir dan juga penjual kepada PT. SMB sebagai pembeli sudah sah karena sesuai dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPdata pembeli adalah pihak yang beritikad baik sehingga wajib dilindungi oleh hukum, dan sesuai pasal 584 KUHPdata peralihan hak milik atas suatu barang bergerak khususnya komoditi kacang kedelai hanya bisa dilakukan melalui 5 cara yang salah satunya adalah dilakukan peralihan oleh pihak yang memiliki hak milik atas barang tersebut, PT.

²⁰⁶Ridwan Khairandy, *Ibid.* Halaman 181.

²⁰⁷Wirjono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, Cetakan ke VIII, Halaman 56

AAA adalah pihak yang berwenang atau memiliki hak atas barang tersebut karena sebagai pemegang lembar konosemen yang menurut KUHD berfungsi sebagai bukti kepemilikan, maka perjanjian jual beli tersebut sudah sah, bagi penulis antara Quadra dengan PT. SMB tidak memiliki hubungan hukum, dan tidak terikat perjanjian karena perjanjiannya masing-masing hanya kepada PT. AAA, berdasarkan pasal 1338 ayat (1) perjanjian hanya berlaku kepada para pihaknya saja, sedangkan wanprestasi dilakukan oleh PT. AAA kepada Quadra, sangat tidak adil jika PT. SMB dan PT. Bank Mandiri harus menderita kerugian akibat sanksi yang diatur dalam perjanjian hanya berlaku untuk PT. AAA

4.1.2 Kepemilikan Benda Bergerak Berdasarkan Jaminan Fidusia Menurut

Undang-Undang Fidusia

Hukum tentang Benda secara umum telah diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan yang disebut dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.²⁰⁸

Hukum Benda merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda, yaitu “*Zakenrecht*”. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur segala sesuatu apa yang diartikan

²⁰⁸ Lihat Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan benda dan juga mengatur hak-hak atas kebendaan.²⁰⁹ Sedangkan menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam hukum adalah tentang pengertian dari benda, kemudian pembedaan dari macam-macam benda, selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.²¹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Benda secara umum adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.

Dalam penelitian ini utamanya yang menjadi objek sengketa merupakan kacang kedelai yang mana menurut jenisnya dapat dikategorikan sebagai benda. Dimana Kacang kedelai tersebut adalah termasuk benda bergerak yang dapat diperdagangkan.²¹¹ Benda bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan selanjutnya jenis benda bergerak ini terdapat dua macam yaitu antara benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.²¹² Sedangkan Kacang Kedelai adalah termasuk benda bergerak yang dapat dihabiskan dan termasuk benda yang dapat diperjual belikan karena memiliki nilai ekonomis.

Dalam kasus sengketa yang terjadi dalam Pertentangan Putusan Pengadilan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini keberadaan status hak kepemilikan kebendaan dari kacang kedelai menjadi rumit dan perlu untuk dibahas dan dicarilah status kepemilikan bendanya sesuai dengan skema hukum yang ada. Keberadaan benda yaitu Kacang Kedelai memang telah dikuasai oleh PT. SMB yang telah membelinya dari PT. AAA untuk kemudian telah dijamin

²⁰⁹ Soediman Kartohadiprodjo dalam P.N.H Simanjuntak. **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**. Jakarta: Djambatan. 2009. Halaman. 204.

²¹⁰ Sri Soedewi mascjhoen Sofwan, dalam *Ibid*, halaman. 204.

²¹¹ Lihat Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹² Lihat Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sebagai jaminan Fidusia kepada PT. Bank Mandiri dan pula telah didaftarkan kepada lembaga Fidusia. Masalah yang muncul menjadi semakin pelik dan rumit manakala Objek yaitu Kacang Kedelai telah disita secara sepihak oleh pihak ketiga yang mengaku memiliki hak atas kebendaan objek Kacang Kedelai tersebut.

Untuk memahami tentang hak kebendaan (*zakelijk recht*) itu sendiri merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.²¹³ Adapun macam-macam hak kebendaan itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:²¹⁴

- a) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yaitu hak kebendaan untuk dapat menikmati dan menggunakan benda tersebut, baik itu dengan memiliki (*eigendom*) menguasai benda, maupun untuk menguasai (*bezit*) benda itu.
- b) Hak kebendaan yang sifatnya memberi jaminan, yaitu hak kebendaan yang memungkinkan benda tersebut digunakan sebagai jaminan, seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, dan lain sebagainya.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini tentang status kepemilikan barang atau benda yang menjadi objek sengketa yaitu Kacang Kedelai yang mana harganya sebenarnya belum dibayar oleh importir (PT.AAA) tetapi telah dijual kepada *buyer* (PT. SMB) sebagai pihak yang sekarang menguasai barang dan telah dijamin secara fidusia kepada PT. Bank Mandiri.

Dari adanya masalah di atas maka memang sangatlah perlu untuk mengkaji tentang status kepemilikan benda yang telah dijual dan dijamin fidusia

²¹³Subekti dalam P.N.H Simanjuntak, *Op-Cit*, Halaman. 210.

²¹⁴Sri Soedewi Mascijhoen Sofwan, *Op-Cit*, halaman 28-30.

menurut skema hukum yang ada baik menurut skema Hukum Benda itu sendiri maupun juga menurut skema Hukum Jaminan Fidusia. Sebab barang objek sengketa yaitu Kacang Kedelai statusnya telah menjadi barang Jaminan Fidusia.

Suatu hak kebendaan akan selalu mengikuti kemanapun benda itu berada sesuai asas *droit de suit*. Artinya adalah bahwa hak kebendaan itu akan selalu mengikuti kemanapun benda itu berada dan dalam tangan siapapun juga barang itu berada, sedangkan hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.

Selain harus memperhatikan asas *droit de suit*, dalam kasus ini haruslah juga memperhatikan asas *droit de preference*, yaitu hak yang lebih didahulukan daripada hak-hak lainnya. Apabila suatu benda itu telah menjadi objek jaminan maka hak yang jaminan yang melekat pada benda tersebut haruslah didahulukan terlebih dahulu.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zakeheid* atau *cautie*, dimana yang artinya adalah mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.²¹⁵ Sedangkan untuk pengertian fidusia itu sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu *fiducie*, yang artinya adalah kepercayaan. Telah terdapat aturan khusus untuk jaminan fidusia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) pengertian fidusia adalah suatu “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

²¹⁵Salim, H.S. **Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2014. Halaman. 21.

benda itu”.²¹⁶ Pengalihan hak kepemilikan maksudnya adalah adanya pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan adanya syarat bahwa benda yang menjadi objek fidusia tetap berada di tangan pemberi fidusia itu sendiri.

Dalam kasus ini tampak sangat jelas bahwa PT. SMB sebagai pemberi fidusia dan PT. Bank Mandiri sebagai penerima fidusia, sedangkan keberadaan Objek fidusia yaitu Kacang Kedelai tetap berada di tangan PT. SMB untuk digunakan sebagai bahan baku produksi atau biasa disebut sebagai barang persediaan (*inventory*).

Pada pokoknya jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. SMB dengan PT. Bank Mandiri ini merupakan perjanjian ikutan yang sifatnya (*accessoir*) dari adanya suatu perjanjian pokok yaitu berupa perjanjian utang piutang (*non cash loan*) atau pinjaman kredit Bank yang diajukan oleh PT. SMB kepada PT. Bank Mandiri yang digunakan selanjutnya untuk melakukan pembayaran jual beli Kacang Kedelai asal dari PT.AAA dengan menggunakan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).

Keberadaan jaminan fidusia yang telah diikat oleh kedua belah pihak yaitu PT. SMB dengan PT. Bank Mandiri adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur jaminan fidusia dan selain itu juga telah dilakukan pengikatan dan didaftarkan pada lembaga fidusia dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam

²¹⁶Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

wilayah negara Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebankan jaminan fidusia wajib didaftarkan.²¹⁷

Adapun tujuan dari pendaftaran fidusia ini sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan juga memberikan hak yang didahulukan (*hak preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.²¹⁸ Dalam kasus yang terdapat dalam penelitian yang dikaji ini hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian Jaminan fidusia mengikat hanya kepada kedua belah pihak yaitu PT. SMB sebagai pemberi fidusia dan PT. Bank Mandiri sebagai penerima fidusia. Dengan telah didaftarkannya Objek Jaminan berupa Kacang Kedelai Kuning Bulk sebagai objek jaminan fidusia maka penerima fidusia memiliki hak preferen atas objek jaminan fidusia daripada kreditur yang lainnya.

Dalam hal ini, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah merupakan barang inventori yang digunakan oleh PT. SMB untuk kelangsungan produksi, maka diakibatkan dari adanya perampasan oleh pihak ketiga menyebabkan stabilitas produksi PT. SMB menjadi terganggu dan pada akhirnya PT. SMB melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran kepada PT. Bank Mandiri tertanggal 31 Maret 2011 perihal kejadian kelalaian. Di dalam akta perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam Akta Jaminan Fidusia telah jelas disebutkan Bahwa PT. Bank Mandiri dalam hal ini sebagai penerima fidusia dan memiliki hak untuk menerima angsuran kredit atau pelunasan dari PT. SMB yang pada kenyataannya

²¹⁷ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²¹⁸ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

telah lalai, maka sesuai dengan ketentuan titel eksekutorial di dalam akta jaminan fidusia, maka PT. Bank Mandiri memiliki kewenangan sebagai penerima fidusia untuk melaksanakan titel eksekutorial.²¹⁹ Yang dimaksud dengan titel eksekutorial adalah suatu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim.²²⁰

Hak kepemilikan barang yang diletakkan sita jaminan oleh PT. SMB terhadap PT. Bank Mandiri setelah jatuh tempo sudah sepatutnya menjadi milik Bank Mandiri karena telah dibuktikan berdasarkan laporan PT. SMB kepada PT. Bank Mandiri jika PT. SMB sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran disebabkan tidak mampu lagi menjalankan usahanya disebabkan atas penjarahan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan setelah PT. Bank mandiri memberikan surat peringatan kepada PT. SMB sebagai prosedur akibat pembayarannya terhenti. Walaupun PT. Bank Mandiri bisa melakukan sita jaminan secara titel eksekutorial terhadap barang jaminan PT. SMB tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun pada kenyataannya objek jaminan sudah dikuasai oleh Quadra berdasarkan penyitaan dimana Quadra tidak punya Legal Standing untuk melaksanakan penyitaan itu terhadap PT. SMB.

PT. Bank Mandiri sebagai Penerima Fidusia mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan penerima jaminan jenis lain, karena aturan pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan jika penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas kelalaian akibat hubungan kontraktual maupun

²¹⁹Lihat Pasal 15 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²²⁰Salim.HS. *Op-Cit*. Halaman: 90.

perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan oleh pemberi fidusia, pasal tersebut untuk melindungi kepentingan penerima jaminan fidusia karena jaminan fidusia adalah jaminan yang beresiko besar bagi penerima jaminan sebab penguasaan benda tidak ada pada penerima jaminan jenis ini. PT. Bank Mandiri sebagai penerima Fidusia memiliki hak sita terhadap barang dan mendapat perlindungan hukum terhadap barang jaminan meski diketahui barang jaminan yang dijaminkan PT. SMB dan telah didaftarkan adalah barang yang belum dilunasi pembayarannya oleh PT. AAA kepada Quadra Commodities SA.

4.2.1 Analisis Hukum Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012

Menurut hasil analisis mengenai kepemilikan benda bergerak dalam kasus sengketa yang penulis analisis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menurut penulis sangat tidak sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 yang amarnya menolak pengajuan Kasasi dari Pemohon Kasasi atas hasil Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PDT/2012/PT.BTN.

Isi Putusan tersebut adalah Dimana ekspor impor –antara Quadra Commodities SA dengan PT. Alam Agri Adiperkasa yang mekanisme Konosemennya sudah sesuai dan jual - beli antara PT. AAA dengan PT. SMB yang akta perjanjiannya sudah dibuat di hadapan notaris dan telah dilakukan *levering* (serah terima) dan pembayarannya dilunasi menggunakan jaminan fidusia oleh PT. Bank Mandiri yang telah didaftarkan, seharusnya kepemilikan barang tersebut sudah menjadi milik Pemberi Jaminan Fidusia. Namun dalam sengketa tersebut hakim

menetapkan barang tersebut adalah milik eksportir (Quadra) dikarenakan importir, (PT. AAA) belum melakukan pelunasan terhadap eksportir, mengenai sengketa kacang kedelai yang terjadi, menurut undang –undang sudah benar dan tidak bermasalah, namun yang bermasalah karena prosedurnya, walaupun tidak dilarang atau sah, seharusnya Quadra Commodities SA tidak sepenuhnya menyerahkan muatan kacang kedelai tersebut kepada PT. AAA jika pelunasan atau pembayaran yang sebagian besar dilakukan oleh PT. AAA terlebih dahulu, akibatnya barang tersebut dijual dan diserahkan kepada pihak pembeli (PT. SMB) yang akhirnya dijaminan oleh PT. SMB ke Bank Mandiri secara fidusia.

Ketentuan Pasal 584 KUHPdata tentang hak milik menyebutkan jika Hak milik atas suatu benda hanya bias diperoleh lewt 5 cara, salah satunya adalah melalui penyerahan oleh orang yang memiliki hak terhadap barang itu.²²¹ Adapun Penyerahan yang dilakukan PT. AAA kepada PT SMB di bisa dikatakan sah karena PT. AAA sebagai penjual pada awalnya adalah pemegang konosemen yang seperti diatas telah dijelaskan berfungsi sebagai hak milik, namun juga tidak dipungkiri jika pada perjanjian yang terdapat dalam *Sale Contract No. PQD 1008016* antara Quadra Commodities dengan PT. Alam Agri Adiperkasa (PT. AAA) juga menyebutkan jika barang berupa muatan kacang kedelai masih merupakan properti Quadra sampai pelunasan dilakukan oleh PT. AAA yang dimana hakim membenarkan jika nyatanya meskipun muatan kacang kedelai tersebut telah dijual, diantar kepada PT. SMB dan telah diterima pelunasannya namun PT. AAA belum melunasi kepada Quadra sehingga status kepemilikan barang pada PT. SMB dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

²²¹ Pasal 584 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Hakim Pengadilan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi seharusnya melihat kasus ini dan mempertimbangkan berdasarkan KUHPdata, KUHD, dan UU Jaminan Fidusia terutama mengenai Peralihan hak milik, dan melihat bahwa Quadra dalam Putusan Pengadilan Serang seharusnya tidak memiliki kapasitas sebagai pelawan yang mengajukan sita eksekusi terhadap sengketa kacang kedelai tersebut, karena hubungan hukumnya hanya kepada PT. AAA, dan jika hakim memutus perkara ini dengan memenangkan Quadra seharusnya menolak dulu dalam memutus perkara dengan pertimbangan perlu ditariknya PT. AAA ke dalam gugatan yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau diadili dalam putusan ini. Sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap PT. SMB dan PT. Bank Mandiri yang berdasarkan putusan ini penulis rasa tidak adil.

Dalam Putusan disebutkan oleh hakim dalam pertimbangannya bahwa:

“karena kacang kedelai tersebut bukan milik PT. Alam Agri Adiperkasa, sehingga tidak dibenarkan PT. Alam Agri Adiperkasa untuk menjual kacang kedelai tersebut kepada PT. Sekawan Makmur Bersama”

“Bahwa mengenai masalah sah atau tidaknya jual – beli antara PT. Alam Agri Adiperkasa dengan PT. Sekawan Makmur Bersama, merupakan urusan PT. Sekawan Makmur Bersama dengan PT. Alam Agri Adiperkasa sehingga tidak ada hubungannya dengan Quadra Commodities”

“Bahwa seandainya benar PT. Sekawan Makmur Bersama telah membeli kacang kedelai secara sah dari PT. Alam Agri Adiperkasa, menandakan bahwa PT. Sekawan Makmur Bersama tidak teliti dan

tidak cermat dalam melakukan jual-beli kacang kedelai tersebut dari pihak yang bukan pemilik, begitu juga PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam menerima jaminan fidusia telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga menerima barang bermasalah sebagai jaminan fidusia.”²²²

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim tersebut, dapat dilihat jika hakim membatalkan hubungan hukum jual – beli antara PT. AAA dengan PT. SMB.

Yaitu pembatalan perjanjian berdasarkan asas *Eksepsio non adimpleti contractus*, tetapi masalahnya PT. AAA tidak ada dalam putusan pengadilan ini, padahal PT.

SMB telah melakukan pelunasan kepada PT. AAA dan barang sudah diserahkan ke gudang PT. SMB, berarti hakim memaksakan tetap memutus perkara walaupun gugatan kurang pihak yang masuk dalam kategori *error in persona* dalam Hukum Acara Perdata. Dalam hal ini *error in persona* ada 3 jenis, yaitu:²²³

- 1) *Diskualifikasi in person*, yaitu dimana penggugatnya bukan termasuk yang *persona standi in judicio*, misalnya termasuk bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, belum dewasa atau dibawah pengampuan, orang yang menggugat tidak berkualitas atau tidak memiliki hak berkuasa.
- 2) *Gemis Aamhoedanig Heid*, dimana orang yang ditarik sebagai tergugat tidak benar atau keliru.
- 3) *Plurium Litis Consortium*, merupakan orang yang ditarik kedalam gugatan tidaklah lengkap.

²²² Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 03/PDT/2012/PT.BTN. bagian menimbang, halaman 25.

²²³ Abdul Salam, *Menyoal Masalah Kurang Pihak dalam Gugatan Waris*, Wakil Ketua PA Watansoppeng, 2012, halaman 2.

Dalam putusan ini, penulis melihat hakim memaksakan memutuskan perkara walaupun putusan ini masuk sebagai kategori *error in persona* yang lebih tepatnya adalah *Plurium Litis Consortium*, yaitu para pihak dalam gugatan tidak lengkap, dengan membatalkan perjanjian jual beli antara PT. AAA dengan PT. SMB dimana tidak adanya PT. AAA dalam gugatan, maka yang dirugikan dalam putusan ini tentunya hanya PT. Bank Mandiri dan PT. SMB.

Tidak dimasukkannya PT. AAA ke dalam gugatan seharusnya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima yang disebut sebagai *Exceptio Plurium Litis Consortium* dimana para pihak yang diajukan sebagai tergugat tidak lengkap atau tidak lengkap, karena sebetulnya ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai turut tergugat, yaitu PT. AAA, sehingga nantinya persoalan dapat diselesaikan secara tuntas. Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) dijatuhkan dengan alasan-alasan:²²⁴

- d) Gugatan tidak berdasarkan hukum,
- e) Gugatan tidak patut,
- f) Gugatan bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum,
- g) Gugatan salah,
- h) Gugatan tidak memenuhi persyaratan,
- i) Obyek gugatan tidak jelas,
- j) Subyek gugatan tidak lengkap.

²²⁴Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz. *Eksepsi Plurium Litis Consortium* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 401/PDT/2002/PT.SMG. jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 41/Pdt.G/2000/PN.Pwt). Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.2 Mei 2008, halaman 125.

Hakim berhak memutus perkara berdasarkan bukti di pengadilan, dalam kasus ini jika hakim ingin membatalkan jual – beli antara PT. AAA dengan PT. SMB, seharusnya hakim mempertimbangkan bukti jual beli antara PT. AAA dengan PT. SMB, karena PT. SMB juga tidak mengetahui kontrak antara Quadra dengan PT. AAA. Harus dipertimbangkan pula oleh hakim dalam memutus perkara jika PT. SMB melihat PT. AAA sebagai pemilik Konosemen sebagai bukti kepemilikan barang, dan bukti pelunasan berdasarkan fasilitas *non-cash loan* yang didapatkan oleh PT. SMB, serta bukti faktur penjualan dan bukti pengiriman barang *Delivery Order* yang dilakukan oleh PT. AAA kepada PT. SMB yang jelas diatur dalam KUHPerdata tentang beralihnya hak milik benda bergerak, serta bukti sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan oleh PT. Bank Mandiri. Seharusnya Bank Mandiri sebagai penggugat dan pembanding yang berkapasitas untuk dimenangkan dalam putusan tersebut, bukan Quadra Commodities yang tidak memiliki kapasitas sebagai pelawan dalam putusan P.N. Serang yang diajukan banding dan dikuatkan hasil putusannya.

4.2.2 Analisis Hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015

Dalam putusan peninjauan kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 hakim akhirnya mengabulkan tuntutan PT. Bank Mandiri yang membatalkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Serang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi karena dalam putusan terdapat unsur kekhilafan hakim atau disebabkan kekeliruan yang nyata, sehingga Hakim Pengadilan Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan kembali mengesahkan Komoditas Kacang kedelai yang dipersengketakan menjadi sah

milik PT. Bank Mandiri berdasarkan hak sita (Eksekutorial) dalam sertifikat jaminan fidusia milik Bank Mandiri.

Hal ini karena adanya unsur kekhilafan hakim sesuai pasal 67 huruf 'f' Undang-undang Nomor 18 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan jika PK bisa diajukan jika ada 6 unsur salah satunya adalah jika pada putusan sebelumnya atau kasasi terdapat kekhilafan hakim/ kekeliruan yang nyata.²²⁵

Adapun kekhilafan hakim yang dijadikan pada pertimbangan hakim MA di tingkat PK adalah karena pertimbangan Hakim MA di tingkat kasasi adalah pertimbangan yang didasarkan pada Bukti fotokopi yang tidak disertai aslinya, yaitu bukti yang dilampirkan oleh Quadra Commodities SA, termasuk bukti sale Contract yang memang pada pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi bukti ini diakui oleh hakim dan tidak disebut sebagai bukti fotokopi. Bukti tersebut hanyalah berupa bukti fotokopi dan tidak ditandatangani oleh importir yaitu PT. AAA.

Sehingga belum bisa dibuktikan apakah PT. AAA memang belum melunasi muatan kacang kedelai yang diimpornya seperti yang didalilkan. Pertimbangan hakim tersebut mengacu pada pasal 1888 KUHPdata yang menyebutkan jika "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya..." Dan dianalogikan oleh Mahkamah Agung pada suatu praktek pada putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"

²²⁵ Pasal 67 huruf "f" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pertimbangan Putusan yang lain adalah karena Komoditas Kacang kedelai yang dijadikan sengketa telah dijaminkan secara fidusia dimana ketentuan fidusia telah pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang berbunyi “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia” sehingga PT. Bank Mandiri sebagai penerima fidusia mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak menanggung kewajiban atas permasalahan antara PT. SMB dengan PT. AAA.²²⁶

Pertimbangan lain Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa berkaitan dengan belum dilunasinya objek jual beli kacang kedelai oleh PT Alam Agri Adiperkasa (PT AAA) kepada Quadra sebagai termohon peninjauan kembali dan juga sebagai pelawan, maka seharusnya Quadra selaku eksportir dan penjual mengajukan tuntutan terhadap PT AAA selaku importir dan pembeli yang belum melunasi atas harga barang yang diimpornya, bukan kepada PT Bank Mandiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi jual beli kacang kedelai yang dilakukan oleh Quadra dengan PT AAA.²²⁷ Menurut Pasal 1340 KUHPerdara perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya²²⁸, sehingga pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai, tidak seharusnya Quadra sebagai pelawan menuntut perlawanan kepada PT. Bank Mandiri terkait

²²⁶ Lihat putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 319 PK/Pdt/2015, *bagian Menimbang*, hal 31

²²⁷ Lihat Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015, *Bagian menimbang*, hal 32

²²⁸ Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

belum dilunasinya Komoditas Kacang kedelai yang diimpor oleh PT AAA, karena PT. Bank Mandiri tidak punya hubungan hukum kepada Quadra.

4.2.3 Analisis Hukum Pertentangan Kedua putusan Berdasarkan teori konflik hukum

Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dan di tingkat Peninjauan Kembali isi putusannya bertentangan, padahal putusan hakim adalah yurisprudensi yang menjadi sumber hukum sehingga terjadi pertentangan/konflik antar sumber hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun asas yang digunakan dalam penyelesaian konflik hukum pada kedua putusan yang bertentangan yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 adalah asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yaitu asas yang menyebutkan jika ada pertentangan peraturan yang sederajat, maka aturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan asas ini peraturan yang lama menjadi tidak berlaku lagi.

Begitu pula Putusan Pengadilan, karena Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 adalah putusan yang lebih baru dan memperkarakan hal yang sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 walaupun hasil putusannya berbeda, maka berlaku asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, sehingga Putusan Nomor 2206 K/Pdt/2012 dan yang dibawahnya menjadi batal tidak berlaku lagi dan tidak berkekuatan hukum.

Adapun diterimanya permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali dan dikabulkannya gugatan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 disebabkan telah ditemukannya unsur kekhilafan hakim dan

pertentangan Putusan Kasasi pada pihak dan persoalan yang sama, termasuk didalamnya adalah tidak dimasukkannya PT. AAA ke dalam Gugatan oleh PT. SMB maupun PT Bank Mandiri sejak putusan Pengadilan Negeri hingga kasasi dikarenakan dalam kontrak penjualan yang dilakukan oleh Quadra dengan PT. AAA menyebutkan “jika ada perselisihan antara Quadra dengan PT AAA akan diselesaikan melalui Arbitrase, dan Quadra sedang melakukan proses/ upaya hukum arbitrase” sehingga PT. AAA tidak bisa bersengketa di dalam Pengadilan karena telah mengakui lembaga Arbitrase dalam perjanjian, dan begitu pula Quadra tidak bisa menarik PT AAA ke dalam tuntutan perlawanan disebabkan sedang mengupayakan proses hukum secara tersendiri melalui arbitrase.²²⁹

Namun diketahui sejak diputusnya perkara sejak tingkat Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali, penyelesaian secara hukum melalui Arbitrase tersebut belum dilakukan mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015 yang menyebabkan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali yang seharusnya untuk membuktikan belum dilunasinya Kacang kedelai tersebut oleh PT. AAA Quadra harus menyertakan Putusan Arbitrase, namun tidak diajukan atau disertakan pada bukti dalam PK.

Putusan Perkara Kasasi Nomor 2206 K/Pdt/2012 berbeda dengan Putusan Perkara Kasasi Nomor 461 K/Pdt/2012 dimana kedua putusan tersebut dilakukan oleh pihak yang sama, dengan persoalan yang sama dengan dasar yang sama namun isi putusannya berbeda, putusan nomor 2206 adalah hasil kasasi dari Putusan Pengadilan Tinggi Banten sedangkan Putusan nomor 461 adalah Hasil

²²⁹ Lihat Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015, *Bagian menimbang*, hal 19

kasasi dari pengadilan tinggi surabaya, adanya kedua putusan yang sama tersebut disebabkan barang yang disengketakan terletak dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda, dengan adanya perbedaan kedua putusan di tingkat kasasi tersebut mengakibatkan suatu pertimbangan hakim di tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012.²³⁰

Berdasarkan rasa keadilan dan asas *lex posteriori derogat legi priori*, penulis sepakat jika Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 adalah putusan yang tepat, karena hakim dalam PK memutus perkara dengan mempertimbangkan adanya pihak yang sebenarnya melakukan wanprestasi yaitu PT. AAA (importir) namun tidak masuk dalam gugatan sehingga jika putusan kasasi tidak dibatalkan akan menimbulkan kerugian kepada 2 pihak, yaitu PT. SMB (pembeli) dan juga PT. Bank Mandiri (Penerima Fidusia dari pembeli). karena Putusan PK memenangkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik barang yang disengketakan tersebut maka menjadi jelas lagi perlindungan hukum pada aturan pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan jika Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas kelalaian akibat hubungan kontraktual maupun perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan oleh pemberi fidusia, sehingga aturan yang lebih umum yang bertentangan dengan pasal tersebut wajib dikesampingkan.

Sedangkan dalam putusan kasasi nomor 2206 K/Pdt/2012 menurut penulis sangat dipaksakan, sebab hakim tetap memutus perkara hanya berdasarkan bukti fotokopi yang tidak ada Salinan aslinya, kekuatan pembuktiannya menurut KUHPerdara menjad lemah atau tidak ada sama sekali. Hakim juga memaksa

²³⁰ Lihat Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015, *bagian menimbang*, hal 33-34

memutus perkara tanpa adanya pihak yang sudah jelas diakui hakim melakukan wanprestasi kepada eksportir, sehingga menurut penulis gugatan kurang pihak, sehingga pihak yang harus bertanggungjawab akibat wanprestasi yang dilakukannya menjadi tidak muncul, kemudian pihak pembeli dan penerima fidusia dari pembeli menjadi dirugikan.

Putusan Kasasi MA No. 2206 K/Pdt/2012 menurut penulis tidak melihat aturan pasal 24 UUJF yang merupakan perlindungan hukum penerima fidusia sehingga perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki PT. Bank Mandiri menjadi lemah. Untuk itu maka penulis setuju jika putusan nomor 2206 K/Pdt/2012 adalah putusan yang terdapat kekhilafan hakim, bukan karena berdasarkan pembuktian materilnya saja, namun juga karena berdampak buruk bagi pembeli dan penerima fidusia yang harus menerima sanksi dalam perjanjian antara Quadra dengan PT. AAA yang mana sanksi tersebut hanya berlaku kepada PT. AAA. Sedangkan Putusan Peninjauan Kembali nomor 319 K/Pdt/2015 adalah putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari bab ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang menentukan putusan yang paling tepat dalam pertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015. Berdasarkan analisis aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama Pasal 1458 tentang peralihan hak milik benda bergerak, dan aturan Kitab Undang-undang Hukum Dagang terutama dalam pasal 507 tentang hak pemegang Konosemen atau serta Undang-Undang Nomor 42. Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kesimpulan Penulis pada dasar- dasar pertimbangan hingga putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 mengacu kepada asas perjanjian dan asas hak kebendaan pada pasal- pasal yang terdapat pada KUHPerdata dimana perjanjian antara PT. Sekawan Makmur Bersama dengan PT. Alam Agri Adiperkasa menjadi batal dan hak sita jaminan PT. Bank Mandiri kepada PT. Sekawan Makmur Bersama juga dibatalkan, serta perpindahan hak milik atas benda bergerak yg berupa muatan kacang kedelai tersebut juga dibatalkan sebab wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa terhadap Quadra Commodities SA dalam memperoleh muatan kacang kedelai tersebut. Sedangkan berdasarkan Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319/PK/2015 mengacu pada asas itikad baik dalam KUHPerdata, pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau

kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang berarti menurut penulis PT. Bank Mandiri sebagai penerima fidusia dari PT. Sekawan Makmur Bersama tidak dapat menanggung kewajiban atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa terhadap PT. Sekawan Makmur bersama sebagai pemberi Fidusia.

Serta ditemukannya unsur kekhilafan hakim/ kekeliruan yang nyata pada pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan pengadilan tingkat kasasi hanya berdasarkan bukti fotokopi dari Quadra Commodities tanpa adanya bukti asli dan tidak ada tanda tangan dari PT. Alam Agri Adiperkasa, sehingga tidak bisa dibuktikan apakah benar PT. Alam Agri Adiperkasa belum melakukan pelunasan atau tidak, karena bukti fotokopi yang tidak disertai aslinya menurut pasal 1888 KUHP data harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Dan secara analisis yuridis yang dilakukan penulis terhadap kedua putusan yang saling bertentangan berdasarkan teori konflik hukum, maka Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 lah yang sesuai dengan rasa keadilan dan berkekuatan hukum menurut asas *lex posteriori derogate lagi priori*.

Dikarenakan PK adalah Putusan MA yang terbaru dan pertimbangan sampai putusannya berdasarkan unsur kekhilafan hakim yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri hingga Kasasi, serta berdasarkan dasar hukum yang digunakan yaitu aturan hak kebendaan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang lebih khusus dibandingkan aturan hak kebendaan pada Buku II

KUHPerdata yang sifatnya umum, sehingga berlaku pula asas *Lex specialis derogate legi generali*

5.2.Saran

Bagipenyelesaian kasus dalam Putusan Pengadilan yang bertentangan tersebut, seperti pada Putusan Mahkamah agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 yang berbeda tersebut, penulis menyarankan agar menyelesaikannya atau mendapatkan kepastian hukumnya sesuai penyelesaian konflik hukum, yaitu:

1. Pada sumber hukum yang bertentangan maka menggunakan asas *Lex posteriori derogat legi fori* karena putusan pengadilan yang terbaru khususnya dalam tingkat Peninjauan Kembali, adalah putusan terbaru berdasarkan pertimbangan baru oleh hakim yang dirasa penting, karena tidak dikemukakan oleh hakim pada putusan tingkat sebelumnya atau karena menemukan kesalahan pada putusan hakim sebelumnya.
2. Terkait dengan undang-undang apa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim pada putusan yang terbaru tersebut adalah kewenangan hakim untuk menganalogikan berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang artinya “Putusan Hakim (Pengadilan) adalah benar”, di bandingkan aturan undang-undang yang mengatur, namun asas tersebut hanya berlaku kepada pihak yang berperkara/ bersengketa dalam putusannya saja, untuk aturan yang digunakan menyeluruh kepada masyarakat, undang-undang tetap berlaku.

3. Dalam menyelesaikan konflik antar undang-undang, seperti pasal yang mengatur kebendaan pada aturan dalam KUHPerdara dan juga pasal pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jika ada pertentangan pada pasal yang mengatur hal yang sama namun aturannya berbeda, maka cara menyelesaikannya berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.



DAFTAR PUSTAKA

Data Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Djoko Imbawani, **Hukum Dagang Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014
- Herman A. Carel Lawalata, **Konosemen Dem Forwarding Agency (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)**, Jakarta 1983
- Salim, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok- Pokok Hukum jaminan dan jaminan Perorangan di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Soegijatna Tjakranegara, **Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Sudigno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, **Hukum Surat Berharga Pasar Uang**, Sinar Grafika, Jakarta 2013,
- Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 – Hukum Surat Berharga** Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1990
- R. Soeroso. 2011. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- P.N.H Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2009
- Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, **Good Faith in European Contract Law**, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
- Ridwan Khairandy, **Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003
- Salim, H.S, **Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Subekti, R, Prof, S.H dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001,
- Subekti, R, Prof, S.H dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Dagang**, Cetakan ke-11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Wirjono Prodjodikoro, **Azas – Azas Hukum Perjanjian** Cetakan ke VIII, Sumur, Bandung, 1998

Data jurnal dan Artikel

Abdillah Sinaga, 2006, **Aspek Hukum Konosemen dan Fungsinya dalam Pengangkutan Laut**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Abdul Salam. 2012. **Menyoal Masalah Kurang Pihak dalam Gugatan Waris**. Wakil Ketua PA Watansoppeng.

Agus Svarnha Nurpatricia, 2007, **Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Pada cv. Golden Teak Garden Semarang**, Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Abdul Rahim Arifin, 2009, **Konosemen Sebagai Objek Jaminan Gadai dan Fidusia**, Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz. 2008. ***Eksepsi Plurium Litis Consortium*** (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 401/PDT/2002/PT.SMG. jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 41/Pdt.G/2000/PN.Pwt). Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.2 Mei 2008

Ngruh Wahyu Resta. 2016. Bab II Jurnal Tesis **Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah**. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Data Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem

Nilai Tukar

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal jo.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2015 jo. Peraturan

Menteri Nomor PM 93 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan

Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 05/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi

Impor.

International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to

Bills of Lading (“Hague Rules”) , Brussels, 25 Agustus 1924

Data Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg Jo. Nomor

13/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 03/PDT/2012/PT BTN.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 319 PK/Pdt/2015

Data Internet:

Amanita Novi. 2015. **Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.** (online)

(Staff.uny.ac.id). diakses 4 Agustus 2016

Legal Akses, **Asas-asas Perjanjian** (online), [http://www.legalakses.com/asas-asas-](http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/)

[perjanjian/](http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/). Diakses pada senin 9 Agustus 2016.

Legal Banking, 2015, **Hukum Surat Berharga.** (online)

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga>,

diakses pada 26 November.

